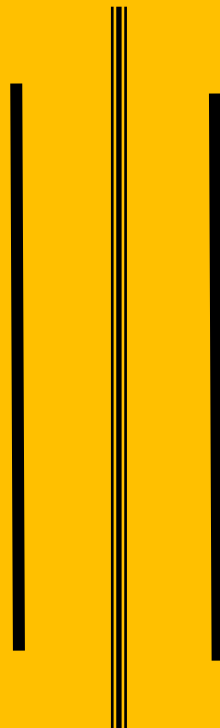




RENCANA KERJA
KEPOLISIAN RESOR LOMBOK BARAT
T.A. 2027



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESOR LOMBOK BARAT



RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
POLRES LOMBOK BARAT
T.A. 2027

**SPRIN POKJA PENYUSUNAN
RENCANA KERJA POLRES LOMBOK
BARAT T.A. 2027**

**RENCANA KERJA KEMENTERIAN / LEMBAGA
(RENJA KL) VERSI BAPPENAS MANUAL
TAHUN ANGGARAN 2027**

REKAP 1
RENCANA KERJA KEMENTERIAN / LEMBAGA (RENJA KL)
T.A. 2027

PROGRAM DAN PENDANAAN
RENCANA KERJA KEMENTERIAN / LEMBAGA (RENJA KL)
T.A. 2027

REKAP 2 PER PROGRAM
RENCANA KERJA KEMENTERIAN / LEMBAGA (RENJA KL)



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR LOMBOK BARAT

Nomor: Kep/ 561 /VI/2026

tentang

RENCANA KERJA RESOR LOMBOK BARAT T.A. 2027

KEPALA KEPOLISIAN RESOR LOMBOK BARAT

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Polres Lombok barat pada Tahun 2026, dipandang perlu menetapkan dengan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 dan perubahan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Pada tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah (Polres);
7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Polres dan Polsek;
8. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Lombok Barat Nomor: Sprin/561/VI/REN.1.3./2026 tanggal 30 Juni 2026 tentang Tim Pokja Penyusunan Rencana Kerja Polres Lombok Barat T.A. 2027;

Memperhatikan.....

- Memperhatikan : 1. Rencana Strategis, Peta Strategis dan Indikator Kinerja Utama Polres Lombok Barat Tahun 2025-2029;
2. Rencana Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia T.A. 2027.

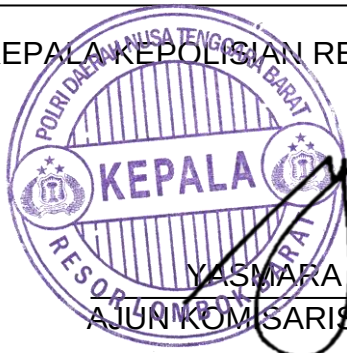
MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR LOMBOK BARAT TENTANG RENCANA KERJA KEPOLISIAN RESOR LOMBOK BARAT TAHUN ANGGARAN 2027.

1. rencana kerja merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh setiap K/L;
2. hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan keputusan tersendiri;
3. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lembar
pada tanggal : 30 Juni 2026

KEPALA KEPOLISIAN RESOR LOMBOK BARAT POLDA NTB




YASMARA HARAHAP, S.I.K., M.Si.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 82041469

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESOR LOMBOK BARAT

DAFTAR ISI

BAB I	LATAR BELAKANG.....	1
	1. Kondisi Umum	1
	2. Pra Anggaran.....	5
	3. Analisis SWOT.....	82
	4. Perkiraan Ancaman di Wilayah Lombok Barat	53
	5. Identifikasi Masalah	89
BAB II	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PRIORITAS DAN PROGRAM PEMERINTAH	92
	1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prioritas Polres Lombok Barat	93
	2. Program Pemerintah.....	94
BAB III	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL, ARAH KEBIJAKAN, DAN STRATEGI OPERASIONAL POLRES LOMBOK BARAT.....	98
	1. Program Prioritas Nasional.....	98
	2. Sasaran Prioritas, Arah Kebijakan, dan Strategi Polres Lombok Barat Tahun 2027.....	141
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, DAN PAGU INDIKATIF POLRES LOMBOK BARAT TAHUN 2027	166
	1. Program Kerja dan Kegiatan Polres Lombok Barat.....	166
	2. Usulan Pagu Indikatif Definitif Polres Lombok Barat T.A. 2027	169
	3. Matriks Usulan Belanja Modal Baru Sumber Dana SBSN.....	171
BAB V	PENUTUP.....	175
	Penutup.....	175

LAMPIRAN:

1. Rencana Kerja Tahunan (RKT) POLRES LOMBOK BARAT T.A. 2027.
2. RKA-KL Versi Bappenas manual.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESOR LOMBOK BARAT



RENCANA KERJA POLRES LOMBOK BARAT T.A. 2027

BAB I

PENDAHULUAN

1. Kondisi Umum

Tahun 2027 merupakan Tahun ke-3 (tiga) dari Tahapan Rencana Strategis Polres Lombok Barat Tahun 2025–2029 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Polda Nusa Tenggara Barat Tahun 2025–2029. Rencana Kerja Polres Lombok Barat Tahun Anggaran 2027 disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, yaitu: (1) pilar penguatan keamanan dalam negeri, penguatan intelijen, dan penanggulangan terorisme; (2) pilar penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai “Safe Guarding” dalam mendukung penuntasan target prioritas nasional RPJMN 2025–2029, serta mengacu pada Renstra Polri Tahun 2025–2029 dan Renstra Polda Nusa Tenggara Barat Tahun 2025–2029 dalam rangka mendukung terwujudnya program pemerintah melalui Asta Cita, program ketahanan pangan, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka stunting, khususnya di wilayah hukum Polres Lombok Barat.

Berbagai tantangan, harapan dan tuntutan dari masyarakat maupun pemerintah kepada Polri menuntut Polres Lombok Barat untuk senantiasa meningkatkan kinerja dan pelayanan masyarakat di bidang kepolisian secara berkelanjutan. Tantangan dan harapan tersebut antara lain terwujudnya Polri yang adaptif, profesional, cerdas, berintegritas, transparan, adil dan humanis namun tetap tegas, bermoral, modern serta bebas dari praktik KKN dalam memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat

yang “Presisi”, penggelaran kekuatan kepolisian hingga tingkat desa melalui peran Bhabinkamtibmas dalam rangka mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas di tengah masyarakat sehingga kehadiran anggota Polri dapat memberikan rasa aman, tentram dan nyaman, pelaksanaan penegakan hukum secara adil, transparan, legal, humanis dan setara dengan menitikberatkan pada integritas dan akuntabilitas dalam setiap proses, serta peningkatan fungsi intelijen melalui pendekatan berbasis data dan pemanfaatan teknologi analitik guna meningkatkan kemampuan deteksi dini dan peringatan dini terhadap potensi ancaman, sehingga Polres Lombok Barat mampu menjadi institusi yang prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan dalam menjaga stabilitas keamanan.

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 beserta perubahannya (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resor, Polres merupakan pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok Polri serta tugas-tugas kepolisian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Polres Lombok Barat berkedudukan di wilayah Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan bagian dari wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Barat dengan karakteristik wilayah pesisir, perbukitan dan kawasan pariwisata, dimana kawasan Senggigi merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Provinsi Nusa Tenggara Barat serta wilayah Sekotong memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar namun juga memiliki kerawanan konflik, khususnya terkait aktivitas pertambangan dan sengketa lahan, serta posisi Kabupaten Lombok Barat sebagai wilayah penyangga kawasan strategis pariwisata nasional di Mandalika menjadikan stabilitas keamanan wilayah ini sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Perkembangan lingkungan strategis di wilayah hukum Polres Lombok Barat dipengaruhi oleh berbagai permasalahan antara lain sengketa lahan dan tata ruang

agraria, sengketa tempat ibadah, tuntutan penyediaan lapangan pekerjaan serta aktivitas organisasi kemasyarakatan dan LSM dalam menyikapi permasalahan sosial, ekonomi dan politik yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas, selain itu wilayah Kabupaten Lombok Barat juga memiliki kerawanan terhadap bencana alam mengingat Provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada jalur rawan gempa dengan karakteristik wilayah perbukitan dan dataran rendah. Kasus tindak kejahatan/kriminalitas yang menjadi perhatian serius yaitu tindak kriminalitas 3C (Curat, Curas dan Curanmor) yang masih cukup tinggi dan menjadi tren kejahatan dominan di wilayah Pulau Lombok termasuk Kabupaten Lombok Barat.

Seiring dengan perkembangan meningkatnya potensi ancaman gangguan keamanan dalam bentuk kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan yang merugikan kekayaan negara serta kejahatan yang berimplikasi kontijensi, serta tingginya tuntutan masyarakat terhadap profesionalisme Polri, maka diprediksi tugas dan peran Polres Lombok Barat akan semakin kompleks dalam menjaga stabilitas Kamtibmas dengan munculnya potensi konflik sebagai eksekusi dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan, sehingga situasi Kamtibmas Tahun 2027 berpotensi mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas apabila tidak diminimalisir oleh seluruh fungsi kepolisian melalui langkah preemtif, preventif dan represif secara terpadu serta didukung oleh sinergi dengan Pemerintah Daerah, dan para stakeholder dan lain-lainnya.

Beberapa agenda Event Internasional dan Nasional serta kegiatan pariwisata Provinsi NTB, Kalender event wisata Tahun 2027 Kota/Kabupaten yang perlu mendapatkan atensi pada wilayah hukum Polres Lombok Barat, antara lain:

1. Event Internasional dan Nasional yang Berdampak Langsung Terhadap Wilayah Hukum Polres Lombok Barat Tahun 2027:
 - a. Pebruari 2027: Event Lari Internasional Merrumata Coast Trail 2027 di kawasan wisata Senggigi, Kecamatan Batulayar;
 - b. Desember 2027: Event Budaya Nasional Perang Topat di kawasan Pura Lingsar, Kecamatan Lingsar, sebagai pusat atensi pengamanan toleransi dan kondusifitas massa;

2. Agenda Kegiatan Lokal/Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2027 (Kalender Event Wisata Rutin Pemerintah Daerah):
 - 1) Januari 2027:
 - a. Pergantian Tahun Baru dan Perayaan Hari Besar Keagamaan Isra Mi'raj
 - 2) Februari 2027:
 - a. Event Merumatta Coast Trail di kawasan Senggigi;
 - 3) Maret 2027:
 - a. Pawai Ogoh-Ogoh dalam rangka menyambut Hari Raya Nyepi;
 - b. Hari Raya Idul Fitri Tahun 2027;
 - 4) April 2027:
 - a. Perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Lombok Barat;
 - 5) Juni 2027:
 - a. Senggigi Lombok Fun Run;
 - 6) Oktober 2027:
 - a. Event Senggigi Sunset Jazz di kawasan wisata Kerandangan;
 - b. Merumatta Half Marathon Senggigi;
 - 7) Desember 2027:
 - a. Senggigi Surfing Event;
 - b. Perayaan Malam Pergantian Tahun Baru;
3. Kegiatan-kegiatan event budaya, yaitu :
 - 1) bagian dari promosi pariwisata daerah yang menampilkan potensi seni budaya serta pameran ekonomi kreatif masyarakat;
 - 2) Maret/April 2027: Pengamanan Tradisi Lebaran Ketupat (Lebaran Topat) yang dilaksanakan serentak oleh masyarakat seminggu setelah Idul Fitri di sepanjang destinasi wisata Pantai Duduk Senggigi dan pusat keramaian lainnya di Lombok Barat.

2. Pra Anggapan

a. Aspek Lingkungan Strategis Global, Regional, Nasional dan Daerah.

1) Lingkungan Strategis Global.

a) perkembangan lingkungan strategis global konflik geopolitik global yang menjadi fokus utama dan diperkirakan akan terus berlanjut hingga tahun 2027 ditandai dengan intensitas tinggi, keterlibatan kekuatan besar (superpower), serta risiko eskalasi yang berdampak pada stabilitas ekonomi dan keamanan global, yang secara implisit memengaruhi wilayah hukum Polres Lombok Barat melalui sektor pariwisata dan investasi.

- (1) Perang Rusia-Ukraina, memicu fluktuasi harga energi global yang berimplikasi pada kenaikan harga bahan bakar dan operasional industri serta logistik di pintu masuk Pelabuhan Lembar dan Gilimas, selain itu ketidakstabilan di Eropa ini diprediksi menekan angka kunjungan wisatawan mancanegara asal Eropa ke kawasan wisata Senggigi dan Sekotong;
- (2) Ketegangan Taiwan-Tiongkok, sebagai episentrum "Perang Dingin baru" berpotensi mengganggu jalur suplai perdagangan laut di kawasan Asia Timur. Bagi Lombok Barat, kondisi ini dapat menghambat realisasi investasi modal asing (PMA) pada proyek pembangunan resort dan hotel di wilayah Sekotong serta gili-gili sekitarnya akibat sikap investor yang cenderung *wait and see*;
- (3) Krisis Timur Tengah, eskalasi konflik antara Israel-Iran dan sekutunya memicu sentimen solidaritas keagamaan di dalam negeri. Di wilayah Lombok Barat, kerawanan yang perlu diantisipasi adalah peningkatan eskalasi aksi unjuk rasa (Unras) oleh elemen Ormas Islam atau kelompok masyarakat tertentu yang memanfaatkan isu kemanusiaan/Palestina untuk menggalang massa, yang apabila tidak dikawal berpotensi mengganggu ketertiban umum;

- (4) Konflik Regional yang Intensif (Sudan, Myanmar, Sahel), memperpanjang ketidakpastian keamanan non-tradisional di Asia Tenggara, meningkatkan kewaspadaan instansi kepolisian terkait pengawasan pintu masuk perairan guna mencegah penyelundupan manusia atau migran ilegal.
- b) Hingga tahun 2027, Polres Lombok Barat akan menghadapi berbagai isu strategis global yang berdampak langsung pada stabilitas keamanan kewilayahan, yang menuntut kesiapan personel untuk bertransformasi melalui langkah prediktif dan pemanfaatan teknologi, antara lain:
- (1) ancaman siber dan teknologi digital yang mencakup Kejahatan Siber Canggih menggunakan *Agentic AI* (AI yang bekerja mandiri). Di tingkat lokal, hal ini berkorelasi dengan maraknya tindak pidana penipuan daring (*online scam*), judi online, dan pinjaman online ilegal yang menyasar masyarakat pedesaan di Lombok Barat. Selain itu, polusi informasi berupa penyebaran hoaks dan narasi provokatif di ruang digital menjelang pelaksanaan Pilkadaes Serentak Lombok Barat 2027 menjadi target utama fungsi Siber dan Intelkam;
 - (2) kejahatan transnasional terorganisir, khususnya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang secara historis masih menjadi kerawanan di wilayah kantong PMI Lombok Barat. Di samping itu, posisi geografis Lombok Barat yang memiliki pelabuhan laut dan garis pantai panjang rawan dimanfaatkan oleh jaringan internasional sebagai jalur penyelundupan narkoba;
 - (3) ketegangan geopolitik dan ekonomi global, yang menuntut peran aktif Polres Lombok Barat dalam menjamin keamanan objek vital nasional, kawasan industri, dan destinasi pariwisata agar aktivitas

ekonomi daerah tetap berjalan stabil di tengah ancaman resesi global;

- (4) perubahan iklim dan bencana alam, yang memerlukan kesiapsiagaan fungsi Satsamapta dan Satpolairud dalam menghadapi dampak cuaca ekstrem, seperti abrasi pantai di sepanjang pesisir Senggigi hingga Sekotong, banjir rob yang mengganggu operasional pelabuhan, serta darurat pengelolaan sampah/limbah di destinasi wisata unggulan;

b. Lingkungan Strategis Regional.

- 1) Pada tahun 2027, lingkungan strategis regional di Asia Tenggara dan Indo-Pasifik diprediksi akan didominasi oleh persaingan kekuatan besar (U.S.-China Rivalry) dan sengketa Laut Tiongkok Selatan yang memperlambat pergerakan ekonomi regional. Implikasinya terhadap Polres Lombok Barat adalah diperlukannya penguatan pengamanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar/gili wisata (Gili Gede, Gili Nanggu, Gili Tangkong) melalui patroli perairan Satpolairud guna mengantisipasi kejahatan lintas negara (*transnational crime*) seperti *illegal fishing*, penyelundupan barang terlarang, serta kejahatan siber lintas batas (*online scam* jaringan regional) yang memanfaatkan wilayah hukum Lombok Barat sebagai basis operasi terselubung. Di sisi lain, isu domestik krisis Myanmar dan kelambatan pertumbuhan ASEAN menuntut kepolisian sektor jajaran Polres Lombok Barat untuk lebih peka terhadap dinamika ekonomi masyarakat kelas bawah yang rentan mengalami gejolak sosial akibat imbas melemahnya daya beli di tingkat regional.

c. Lingkungan Strategis Nasional.

- 1) Perkembangan lingkungan strategis nasional Indonesia pada tahun 2027 berada dalam periode krusial pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, dengan fokus percepatan transformasi ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan penguatan

ketahanan domestik yang diselaraskan dengan program prioritas pemerintah (Asta Cita);

- 2) beberapa isu nasional yang diprediksi memunculkan kontroversi dan potensi reaksi masyarakat yang berimplikasi pada tugas kepolisian di kewilayahan Polres Lombok Barat meliputi:
 - a) terkait pengelolaan ekonomi dan utang negara yang berdampak pada ruang fiskal daerah. Adanya pembatasan anggaran dapat memengaruhi alokasi dana hibah pengamanan, sehingga Polres Lombok Barat dituntut melakukan efisiensi anggaran operasional tanpa mengurangi kualitas pelayanan kamtibmas;
 - b) Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Agraria, yang tetap menjadi pemicu utama gesekan sosial. Bagi Polres Lombok Barat, fokus pengamanan diarahkan pada penyelesaian konflik pertanahan yang masih menyisakan potensi riak di lapangan, seperti penanganan konflik agraria secara persuasif di Dusun Pansing, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, agar tidak berkembang menjadi konflik komunal;
 - c) Terkait implementasi hukum seiring mulainya pemberlakuan penuh KUHP baru. Polres Lombok Barat melalui fungsi Satreskrim mengedepankan sosialisasi dan penegakan hukum yang presisi, legal, dan humanis untuk menghindari kontroversi atau tuduhan kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi masyarakat.
 - d) program sosial unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam rangka menekan angka stunting. Polres Lombok Barat mengerahkan penggelaran personel Bhabinkamtibmas di setiap desa untuk melakukan pengawalan, pengawasan distribusi logistik MBG, serta mendukung ketahanan pangan lokal guna memastikan program berjalan aman, tepat sasaran, dan bebas dari praktik penyelewengan.
- 3) terkait Implementasi Demokrasi. Wacana pengunduran jadwal Pilkada dari 2024 ke 2027 menjadi sorotan politik karena risiko kekosongan kepemimpinan daerah yang terlalu lama dan potensi gangguan pada tatanan

- kenegaraan. Strategi pemerintah merangkul hampir semua kekuatan politik ke dalam pemerintahan (koalisi tanpa oposisi) memicu kekhawatiran melemahnya fungsi kontrol (*check and balances*) di parlemen;
- 4) program Sosial Unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), implementasi program ini terus diawasi ketat karena masalah anggaran dan efektivitasnya. Kelompok kritis sering menyoroti potensi inefisiensi dan dampaknya terhadap ruang fiskal negara;
 - 5) pemerintah menargetkan penghentian impor BBM pada tahun 2027. Kebijakan ini berpotensi kontroversial jika tidak dibarengi dengan kesiapan infrastruktur energi terbarukan atau produksi dalam negeri, yang memicu kekhawatiran akan kelangkaan atau kenaikan harga BBM;
 - 6) wacana atau kelanjutan revisi undang-undang yang dinilai memperluas peran militer (RUU TNI) atau mempermudah izin pertambangan sering memicu perdebatan mengenai supremasi sipil dan keadilan ekologis;
 - 7) prediksi beberapa lembaga internasional bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan stagnan (4,8% - 5,2%) hingga 2027, di tengah ketidakpastian global dan beban utang, dapat memicu ketidakpuasan sosial.
- d. Lingkungan Strategis Daerah NTB dan Implikasinya Terhadap Wilayah Hukum Polres Lombok Barat.
- 1) provinsi NTB diperkirakan akan menghadapi sejumlah isu dan permasalahan utama pada tahun 2027, antara lain:
 - a) pemerintah Provinsi NTB menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0% paling lambat pada tahun 2027. Tantangan utamanya adalah konsolidasi data dan integrasi program bantuan sosial agar tepat sasaran di seluruh kabupaten/kota. Selain itu, penurunan angka stunting tetap menjadi prioritas krusial mengingat adanya lonjakan angka kasus di beberapa daerah zona merah pada akhir 2025. Terhadap hal tersebut, Polres Lombok Barat menugaskan fungsi Satbinmas dan Bhabinkamtibmas untuk melakukan pengawalan serta pengawasan distribusi bantuan sosial secara tepat sasaran,

sekaligus mengawal program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program ketahanan pangan guna menekan angka stunting di wilayah hukum Polres Lombok Barat;

- b) pada tahun 2027, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lombok Barat fokus pada penguatan fondasi transformasi ekonomi melalui pergeseran struktur dari ketergantungan pada sektor pertambangan ke sektor non-tambang, seperti sektor pertanian, industri pengolahan, dan optimalisasi sektor pariwisata kontemporer. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Barat diproyeksikan bergerak stabil mengacu pada tren pertumbuhan positif pasca-pandemi yang berada di angka 5,03% (lebih tinggi dari rata-rata Provinsi NTB sebesar 4,75%). Namun, tantangan nyata di lapangan adalah menjaga agar pertumbuhan ekonomi tersebut bersifat inklusif, mampu memperluas lapangan berusaha, serta menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang saat ini berada pada angka sangat baik yaitu 2,75% agar dapat menyerap tenaga kerja lokal secara luas. Implikasinya, Polres Lombok Barat dituntut memberikan jaminan keamanan yang prima (*safe guarding*) serta kepastian hukum guna melindungi keberadaan sentra industri pengolahan, stabilisasi operasional gerbang logistik utama di Pelabuhan Lembar, serta destinasi wisata unggulan demi terciptanya iklim investasi yang aman dan kompetitif;
- 2) pemerintah Provinsi NTB bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0% paling lambat pada tahun 2027, di mana secara regional angka kemiskinan Lombok Barat telah berhasil ditekan secara progresif hingga menyentuh 12,65% pada akhir tahun 2024 (dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 96.570 jiwa). Tantangan utamanya adalah konsolidasi data dan integrasi program bantuan sosial agar tepat sasaran di seluruh kecamatan, serta pengawalan program unggulan daerah seperti ikhtiar "Sejahtera Dari Desa" melalui alokasi pembagian dana stimulus pembangunan berbasis desa dan dusun

guna mewujudkan pemerataan ekonomi. Selain itu, penurunan angka stunting tetap menjadi prioritas krusial nasional dan daerah sejalan dengan misi menekan angka kasus stunting secara masif di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Terhadap hal tersebut, Polres Lombok Barat memformulasikan fungsi Satbinmas dan unit Bhabinkamtibmas di 10 kecamatan dan 119 desa/3 kelurahan untuk melakukan pengawalan ketat, asistensi, serta pengawasan distribusi bantuan sosial, program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan program aksi ketahanan pangan daerah guna memastikan stabilitas sosial berjalan kondusif bebas dari penyelewengan;

- 3) Masalah lingkungan hidup diprediksi tetap menjadi isu sensitif di Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2027, khususnya ancaman degradasi lingkungan, abrasi, dan pencemaran kimia dari aktivitas pertambangan terhadap gugusan pulau kecil/gili (termasuk 90 gili tidak berpenghuni di Sekotong dan Pulau Terluar Gili Sepatang) serta kawasan pesisir. Mengantisipasi hal tersebut, Polres Lombok Barat melalui Satreskrim (Unit Tipidter) dan Satpolairud mengintensifkan penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup serta memperkuat sinergi bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) guna menjaga kelestarian ekologi dan mendukung kelangsungan pariwisata daerah;
- 4) Pembangunan industri lokal berbasis ekspor dan peningkatan kapasitas SDM digital di 10 kecamatan menjadi fokus Pemkab Lombok Barat untuk menekan pengangguran. Menanggapi hal ini, Polres Lombok Barat mengoptimalkan peran Binmas dan Bhabinkamtibmas dalam menjaga kondusifitas pusat industri, membina Pam Swakarsa, serta mengantisipasi kejahatan siber (*online scam*) guna melindungi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif lokal.
- 5) Pengendalian inflasi komoditas pangan dan Bahan Pokok Penting (Bapokting) tetap menjadi tantangan akibat dinamika ekonomi dan cuaca, khususnya di sentra pertanian seperti Kecamatan Narmada, Lingsar, dan Gunungsari. Guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat,

Satgas Pangan Polres Lombok Barat mengintensifkan pemantauan pasar tradisional, memperketat pengawasan distribusi di Pelabuhan Lembar, serta menindak tegas praktik penimbunan maupun spekulasi harga.;

- 6) terkait permasalahan sengketa lahan dan aktivitas tambang ilegal tetap menjadi fokus perhatian utama karena dampaknya yang signifikan terhadap stabilitas sosial dan investasi di wilayah hukum Polres Lombok Barat. Beberapa permasalahan nyata yang perlu diantisipasi dan dimitigasi meliputi.

(a) sengketa lahan strategis, yaitu:

- (1) masalah klaim lahan yang belum tuntas di KEK Mandalika, Kab. Lombok Tengah (terhadap ±42 hektar lahan sengketa warga lokal dengan ITDC), yang secara tidak langsung berimplikasi pada wilayah hukum Polres Lombok Barat sebagai penyangga utama jalur pergerakan logistik, sekat arus kendaraan, serta mobilisasi massa wisatawan yang melintasi jalur bypass maupun pelabuhan laut di Lombok Barat;
- (2) Gili Trawangan (Lombok Utara): Konflik aset daerah berpotensi memicu solidaritas dan dampak sosial bagi pelaku usaha pariwisata di kawasan Senggigi.;
- (3) Kerawanan Agraria Dusun Pansing (Sekotong): Konflik pertanahan di Desa Buwun Mas menyimpan risiko eskalasi gangguan kamtibmas tinggi apabila proses pemetaan dan ganti rugi program penataan agraria mengalami kendala.;
- (4) Monitoring Lahan Pembangunan Publik: Pengawasan proaktif terhadap potensi sengketa lahan proyek strategis di wilayah sekitar guna mengantisipasi gejolak sektoral.

(b) aktivitas Tambang Ilegal (PETI), yaitu:

- (1) Penindakan PETI Sekotong: Menjadi atensi penegakan hukum berskala nasional (termasuk KPK) akibat tingginya nilai produksi, sehingga memerlukan kombinasi penindakan hukum tegas

- (*represif*) dan penanganan sosial (*persuasif*) guna menghindari benturan fisik;
- (2) Pengawasan Distribusi Bahan Kimia Berbahaya: Memperketat pengawasan lalu lintas perlintasan material tambang ilegal serta bahan kimia berbahaya (merkuri/sianida) di jalur hukum Lombok Barat untuk meminimalisir dampak ekologis kawasan pariwisata;
- (3) Mitigasi Konflik Horizontal: Mengantisipasi gesekan antar-kelompok penambang, sengketa batas lubang tambang, maupun penolakan masyarakat lokal guna mencegah aksi anarkis dan merusak fasilitas di wilayah hukum Polres Lombok Barat.
- 7) Aktivitas sel-sel eks-organisasi terlarang (seperti eks-HTI) di wilayah NTB dan daerah penyangga terindikasi masih berlangsung secara terselubung. Modus operandi dilakukan dengan memanfaatkan isu sensitif—seperti aksi solidaritas kemanusiaan Palestina—serta memproduksi narasi provokatif guna mendelegitimasi pemerintah dan aparat keamanan. Polres Lombok Barat melalui Satintelkam mengintensifkan deteksi dini, kontra-radikalisasi, dan pemantauan ketat terhadap forum kajian keagamaan yang terindikasi menyimpang guna mencegah berkembangnya ideologi radikal.
- 8) Proses hukum dugaan tindak pidana korupsi/gratifikasi di tingkat legislatif provinsi oleh Kejaksaan Tinggi NTB berpotensi memicu gejolak politik dan reaksi ketidakpuasan konstituen. Langkah antisipasi Polres Lombok Barat difokuskan pada pengawalan dan pengamanan aksi unjuk rasa elemen mahasiswa, OKP, maupun LSM agar penyampaian aspirasi terkait transparansi penegakan hukum tidak mengganggu ketertiban umum dan pelayanan publik.
- 9) Potensi cuaca ekstrem di Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2027 diproyeksikan masih didominasi oleh fenomena hidrometeorologi dengan peta kerawanan meliputi:
- (a) Hidrometeorologi Basah (Puncak Des–Feb): Ancaman banjir bandang, luapan sungai, dan tanah longsor di kawasan perbukitan (Lingsar,

- Narmada, Gunungsari, dan Sekotong) yang berpotensi memutus akses jalan strategis;
- (b) Anomali Cuaca dan Rob Ekstrem: Kerentanan tinggi di sepanjang wilayah pesisir (Batulayar, Senggigi, Lembar, Sekotong) yang mengancam fasilitas wisata, permukiman nelayan, serta kelancaran distribusi logistik di Pelabuhan Lembar dan Gilimas;
 - (c) Abrasi dan Kenaikan Muka Air Laut: Ancaman jangka panjang terhadap kelestarian ekosistem gili-gili wisata yang memerlukan langkah mitigasi bencana terpadu.
- 10) Aktivitas unjuk rasa oleh aliansi mahasiswa, LSM, dan masyarakat diprediksi tetap intensif pada tahun 2027. Antisipasi Polres Lombok Barat diarahkan pada pencegahan adopsi modus operandi anarkis dari wilayah luar (seperti pemblokiran total jalan utama). Satlantas dan Satsamapta disiapkan sesuai SOP penanganan Unras untuk menjamin kebebasan berpendapat tanpa mengganggu arus lalu lintas jalur logistik nasional dan operasional pelabuhan;
 - 11) Kasus Curat, Curas, dan Curanmor (3CR) diprediksi masih menjadi tren dominan yang digerakkan oleh jaringan lintas kabupaten (Lobar, Loteng, Lotim, dan Kota Mataram). Satreskrim Polres Lombok Barat mengedepankan pembentukan Tim Opsnal gabungan, optimalisasi Kring Serse, serta *blue light patrol* malam hari, disamping mengantisipasi perkelahian pemuda/penganiayaan berat agar tidak berkembang menjadi konflik horizontal antar-kampung;
 - 12) Ancaman konflik komunal antar-warga/kampung berbasis SARA atau pemuda, serta potensi reaktivasi jaringan terorisme (JAD/JI) tetap membutuhkan kewaspadaan tinggi. Fungsi intelijen Polres Lombok Barat mengoptimalkan pemetaan (*mapping*) berkala terhadap titik rawan konflik dan pemantauan eks-narapidana terorisme (napiter), disertai penindakan hukum yang tegas dan terukur terhadap setiap indikasi provokasi intoleran;

- 13) Secara keseluruhan, dinamika Kamtibmas di wilayah hukum Polres Lombok Barat pada tahun 2027 berpotensi mengalami peningkatan kualitas maupun kuantitas ancaman. Guna mengantisipasinya, Polres Lombok Barat menyiapkan keterpaduan cara bertindak (preemptif, preventif, dan represif) yang didukung penguatan sinergitas bersama Pemkab Lombok Barat, TNI, *stakeholder* pariwisata, tokoh agama, tokoh adat, dan elemen masyarakat.
- e. Beberapa agenda Event Internasional dan Nasional serta kegiatan pariwisata di wilayah NTB yang perlu mendapatkan atensi pada tahun 2027 (berdasarkan event/kegiatan tahun 2026 yang telah dijadwalkan) dan implikasi taktisnya terhadap manajemen kamtibmas Polres Lombok Barat:
 - 1) agenda internasional pada tahun 2027, yaitu:
 - a) Januari 2027 Pertamina VR46 Riders Academy;
 - b) Februari 2027 Mandalika *Endurance Challenge*;
 - c) Februari 2027 Merrumata Coast Trail 2027;
 - d) Mei 2027 Balap Mobil Fanatec GT World Challenge Asia 2027 di Sirkuit Internasional Mandalika;
 - e) April, Juni, Juli, Agustus dan Nopember 2027 Pertamina Mandalika *Racing Series* (MRS);
 - f) Mei 2027 Paragliding *Accuracy World Cup* (PGAWC) di Sky Lancing Kab. Lombok Tengah;
 - g) Mei 2027 Event Lari Rinjani 100;
 - h) Mei 2027 GT World Challenge Asia;
 - i) April, Mei, Juni dan Agustus 2027 Mandalika *Festival of Speed* (MFoS);
 - j) Juli 2027 *Blu Cru Yamaha Sunday Race*;
 - k) Oktober 2027 *MotoGP* Mandalika;
 - l) Oktober 2027 Sembalun Paragliding.
 - 2) Agenda Kegiatan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2027;
 - a) Desember 2027 , Perang Topat, Kab. Lombok Barat;
 - b) Februari 2027: Event Wisata Olahraga Lari Lintas Alam (Sport Tourism) Merumatta Coast Trail

- c) Maret 2027: Pawai Ogoh-Ogoh menyam
- d) April 2027; Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Lombok Barat
- e) Juni 2027: enggigi Lombok Fun Run
- f) Oktober 2027: Musik Senggigi Sunset Jazz
- g) Desember 2027: Surfing Event

2. Dalam Negeri.

Lingkungan strategis domestik/nasional tidak bisa terlepas dari situasi dan kondisi dalam negeri yang meliputi aspek Astagatra. Aspek Astagatra dibagi menjadi dua bagian besar yaitu Tri Gatra dan Panca Gatra. Dinamika lingkungan strategis nasional sangat mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dan bahkan dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas dalam negeri. Berikut diuraikan potensi gangguan Kamtibmas secara keseluruhan Asta Gatra.

a. Geografi.

- 1) letak geografis Indonesia menghadirkan kerawanan strategis dari ancaman luar dan dalam negeri pada tahun 2026. Kerawanan utama ini dapat dikategorikan menjadi ancaman fisik/geologis dan ancaman non-fisik/keamanan, yang saling terkait erat dengan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di persimpangan dua benua dan dua samudra;
- 2) ancaman dari dalam negeri yang dapat berpegaruh terhadap keamanan dalam negeri, antara lain:
 - a) bencana alam, merupakan kerawanan geografis paling signifikan di dalam negeri. Indonesia terletak di Cincin Api Pasifik dan pertemuan tiga lempeng tektonik utama, membuatnya sangat rentan terhadap gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Selain itu, bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem (yang dipengaruhi oleh fenomena seperti La Niña dan pemanasan global) diperkirakan akan tetap menjadi ancaman besar pada tahun 2027;

- b) ketimpangan Sosial dan Konflik Komunal, bisa diakibatkan oleh pengelolaan keragaman sosial dan budaya yang tidak efektif berisiko memicu ketegangan sosial dan konflik komunal di berbagai daerah;
- c) separatisme dan Pemberontakan Bersenjata, terutama di beberapa wilayah terpencil atau perbatasan, gerakan separatisme bersenjata dapat muncul sebagai ancaman yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah;
- d) ancaman *Siber Internal*, dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi digital yang meningkat pesat di Indonesia tanpa diimbangi dengan kematangan keamanan siber yang memadai meningkatkan risiko serangan siber terhadap infrastruktur penting dan data pemerintah;
- e) ancaman dari luar negeri yang dapat berpegaruh terhadap keamanan dalam negeri, antara lain:
 - (1) sebagai negara kepulauan dengan ribuan pulau dan perbatasan maritim serta darat yang luas, Indonesia rentan terhadap pelanggaran kedaulatan, baik oleh negara lain maupun oleh aktivitas ilegal seperti penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*) dan perompakan;
 - (2) letak Indonesia yang strategis sebagai jalur pelayaran internasional utama menjadikannya target untuk perdagangan ilegal, termasuk narkoba, penyelundupan manusia, dan barang-barang terlarang lainnya;
 - (3) indonesia berada di antara dua kekuatan militer besar dan di tengah dinamika geopolitik Indo-Pasifik yang kompleks. Hal ini menciptakan kerawanan strategis di mana Indonesia harus secara proaktif mengelola hubungan internasional untuk menjaga stabilitas regional dan kedaulatan negara;

- (4) ancaman siber dari aktor negara atau non-negara asing yang menargetkan sistem pertahanan, ekonomi, atau politik Indonesia diprediksi akan menjadi lebih canggih dan berbahaya pada tahun 2027, terutama dengan percepatan adopsi kecerdasan buatan (AI);
- (5) pengaruh Budaya Asing yang Tidak Sesuai, dipengaruhi oleh Interaksi intensif dengan warga negara asing akibat posisi geografis juga membawa risiko terkikisnya nilai-nilai budaya dan norma nasional oleh budaya asing yang tidak sesuai.

b. Demografi.

- 1) demografi Indonesia masih berada dalam fase puncak bonus demografi, namun secara bersamaan mulai merasakan transisi menuju *aging population* (penuaan penduduk). Tahun 2027 akan menjadi periode krusial di mana jumlah penduduk usia produktif sangat besar, tetapi tantangan penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas SDM sangat tinggi;
- 2) penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai sekitar 288,4 juta hingga 297,3 juta jiwa pada tahun 2027. Indonesia masih berada dalam periode puncak bonus demografi (2020–2035), di mana jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun) mendominasi struktur populasi;
- 3) perkembangan demografi Indonesia tahun 2027, yaitu :
 - a) Indonesia diprediksi akan memiliki jumlah angkatan kerja yang sangat besar pada tahun 2027, dengan dominasi penduduk usia produktif (15-64 tahun). Ini adalah jendela kesempatan di mana jumlah penduduk tidak produktif (anak-anak dan lansia) lebih sedikit dibandingkan usia kerja;
 - b) meskipun bonus demografi, jumlah penduduk lanjut usia (lansia) terus meningkat signifikan. Pada tahun 2025 saja, jumlah lansia sudah mencapai lebih dari 33 juta jiwa atau sekitar 12% dari total

- penduduk. Pada 2027, persentase ini diproyeksikan terus meningkat, menandakan Indonesia bergeser dari struktur penduduk muda ke menua;
- c) total penduduk Indonesia diperkirakan mendekati 300 juta jiwa. Tren urbanisasi juga terus berlanjut, dengan mayoritas penduduk tinggal di daerah perkotaan, yang meningkatkan tekanan pada infrastruktur kota;
 - d) angka kelahiran (*Total Fertility Rate/TFR*) terus menurun, terutama di wilayah perkotaan, yang berarti laju pertumbuhan penduduk cenderung melambat dalam jangka panjang.
- 4) kerawanan utama demografi indonesia tahun 2027 bukan lagi pada jumlah penduduk yang terlalu banyak, melainkan pada kualitas dan produktivitas SDM yaitu :
- a) jebakan Pendapatan Menengah (*Middle-Income Trap*), jika bonus demografi tidak dikelola dengan pertumbuhan ekonomi minimal 6-7% per tahun, Indonesia berisiko terjebak menjadi negara berpendapatan menengah. Padahal, pada 2027 Indonesia diharapkan sudah memaksimalkan potensi ini untuk Indonesia Emas 2045;
 - b) pengangguran Usia Muda dan Informalitas, sektor informal masih mendominasi lapangan kerja, sementara penciptaan lapangan kerja formal berkualitas tinggi belum mampu menyerap seluruh angkatan kerja baru. Hal ini menciptakan kerawanan sosial dan risiko tingginya pengangguran;
 - c) beban *Aging Population* (bonus demografi kedua), peningkatan jumlah lansia yang pesat jika tidak dibarengi dengan sistem pensiun dan perlindungan sosial yang merata akan meningkatkan beban ekonomi negara dan keluarga (beban tanggungan);
 - d) kualitas SDM (*Stunting dan Pendidikan*), tantangan stunting dan ketidaksesuaian (*mismatch*) antara kompetensi lulusan

pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja (*skill gap*) berpotensi menurunkan daya saing tenaga kerja produktif;

- e) ketimpangan Regional, perkembangan demografi yang cepat di Pulau Jawa/perkotaan tidak berbanding lurus dengan wilayah Timur Indonesia, menciptakan kesenjangan potensi produktivitas yang besar.

c. Sumber Daya Alam.

- 1) pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia pada tahun 2027 diproyeksikan masih berfokus pada hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah, transisi energi menuju ekonomi hijau, serta penguatan swasembada pangan dan energi. Namun, upaya ini dihadapkan pada kerawanan serius terkait kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan ancaman bencana hidrometeorologi;
- 2) adapun proyeksi pemanfaatan SDA Indonesia tahun 2027 dan potensi kerawanannya berdasarkan arah kebijakan dan tren saat ini, yaitu Pemanfaatan SDA Indonesia Tahun 2027 Hilirisasi Mineral dan Batu Bara (Minerba), pemerintah terus melanjutkan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, khususnya pada nikel (untuk baterai EV), tembaga, dan bauksit. MIND ID dan pelaku usaha mineral akan mengoptimalkan cadangan mineral profesional untuk pertumbuhan ekonomi.
- 3) transisi Energi dan Ekonomi Hijau yaitu melalui:
 - a) penggunaan bioavtur dengan target sebesar 1% mulai 2027, yang akan meningkatkan pemanfaatan sawit sebagai bahan baku;
 - b) pengembangan energi bersih untuk mendukung industri hijau, menggeser ketergantungan semata-mata pada SDA fosil;
 - c) penguatan swasembada pangan dan air yang berfokus pada pembangunan infrastruktur 2027 diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan dan pengelolaan air yang berkelanjutan;

- d) pemanfaatan ekosistem gambut dan hutan akan diatur untuk mendukung pengendalian emisi gas rumah kaca.
- 4) kerawanan dan Risiko Pengelolaan SDA:
 - a) eksploitasi berlebihan, termasuk pertambangan dan konversi lahan, berpotensi menghilangkan habitat flora-fauna serta merusak ekosistem;
 - b) wilayah Indonesia rentan terhadap banjir, tanah longsor, dan kekeringan yang diperparah oleh cuaca ekstrem, yang sering kali terjadi akibat alih fungsi lahan;
 - c) pemanfaatan lahan yang intensif dapat memicu sengketa antara perusahaan pengelola SDA dengan masyarakat lokal atau adat;
 - d) masih tingginya ketergantungan pada batubara (*captive power plants*) untuk industri, yang bertentangan dengan target pengurangan emisi karbon dan paris agreement;
 - e) ketergantungan ekonomi yang terlalu tinggi pada SDA, jika tidak dikelola dengan tata kelola (*good governance*) yang baik, dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan permanen.

d. Ideologi.

- 1) perkembangan kondisi ideologi Indonesia menuju tahun 2027 diprediksi berada dalam fase kontestasi dinamis antara upaya penguatan Pancasila sebagai *core value* dan tantangan ideologi transnasional/konservatisme di era digital. Pada tahun 2027, pemerintah akan berfokus pada "pembumian" nilai-nilai Pancasila yang dioptimalkan melalui media sosial dan teknologi untuk menjangkau generasi milenial dan Gen Z;
- 2) Adapun rincian perkembangan kondisi ideologi Indonesia 2027 dan kerawanannya berdasarkan tren saat ini;
- 3) Perkembangan Kondisi Ideologi 2027.

- a) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengintensifkan sosialisasi Pancasila melalui pendekatan digital/media sosial untuk menghadapi radikalisasi ruang digital yang lebih cepat dari pada konvensional;
 - b) Di tengah ketidakpastian ideologi, pemerintah, melalui Kementerian Pertahanan, menekankan konsep Bela Negara sebagai strategi utama untuk memurnikan kesadaran dan kecintaan tanah air, terutama di kalangan generasi muda;
 - c) Nilai Pancasila difungsikan sebagai panduan moral dalam mencapai target pembangunan ekonomi (diproyeksikan tumbuh tinggi di 2027) dan keadilan sosial, guna memastikan pembangunan tidak melupakan etika;
 - d) Masih berkembang tiga arus utama : Nasionalisme Konvensional, Konservatisme Islamis, dan Konvergensi keduanya (NKRI Bersyariah).
- 4) Kerawanan dan Ancaman Ideologi 2027.
- Meskipun Pancasila tetap menjadi dasar negara, terdapat beberapa titik kerawanan yang diprediksi masih menjadi tantangan di tahun 2027, yaitu :
- a) ancaman ideologi yang berupaya mengganti Pancasila, radikalisme, dan terorisme masih nyata, seringkali disebarkan melalui "perang mindset" (*mindset warfare*) di media sosial;
 - b) BNPT memperingatkan bahwa radikalisasi di ruang digital berkembang sangat cepat. Serangan berita bohong (hoax) dan disinformasi berpotensi menggerogoti kohesi sosial;
 - c) sisa-sisa kontestasi politik dapat menciptakan polarisasi sosial yang tajam, di mana masyarakat terbelah menjadi dua kutub berlawanan, mengikis persatuan;

- d) belum optimalnya pengamalan nilai Pancasila akibat kesenjangan sosial yang tinggi memicu eksklusivisme sosial, yang dapat dimanfaatkan oleh ideologi ekstremis.
- e. Politik.
 - 1) masih adanya kelemahan dalam pelebagaan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi dan politik, serta kurangnya konsistensi menjadikan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Pada tahun 2027 diprediksi menjadi tahun konsolidasi politik yang penting bagi pemerintahan Prabowo-Gibran, sekaligus menjadi tahun "panas" karena persiapan menuju pilkada serentak lanjutan dan pemilu 2029;
 - 2) perkembangan Situasi Politik tahun 2027.
 - a) pemerintahan Prabowo Subianto diprediksi telah memperkuat koalisi, dengan fokus pada kesinambungan kebijakan Jokowi. Politik cenderung stabil dengan oposisi yang terbatas, menciptakan pemerintahan yang kuat (majoritarianism);
 - b) tahun 2027 diprediksi akan diwarnai persiapan intensif atau pelaksanaan Pilkada serentak lanjutan/baru, yang menjadi ajang perebutan kekuasaan tingkat lokal;
 - c) pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8% pada 2027 melalui hilirisasi 28 komoditas dan target investasi tinggi (Rp2,6 ribu triliun). Situasi politik akan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan target ekonomi ini;
 - d) politik luar negeri diprediksi lebih aktif dan tegas dibandingkan sebelumnya, namun tetap memegang prinsip non-blok;
 - e) tahap lanjutan pemindahan ASN dan pusat pemerintahan ke IKN terus berlanjut, yang berpotensi menjadi ajang pamer pencapaian politik.
 - 3) kerawanan Politik tahun 2027.

- a) risiko munculnya krisis politik akibat penurunan nilai-nilai demokrasi, disrupsi digital, serta ketimpangan ekonomi masyarakat yang belum teratasi sepenuhnya;
 - b) persaingan antar calon kepala daerah yang sangat ketat pada kegiatan Pilkada di berbagai wilayah berpotensi menimbulkan konflik sosial yang lebih tinggi dibandingkan pilpres, terutama jika netralitas ASN dan penyelenggara pemilu dipertanyakan. Kerawanan tinggi terkait praktik politik uang (*money politics*) dalam Pilkada, yang menggerogoti prinsip demokrasi;
 - c) meskipun ada proyeksi pertumbuhan, ketidakpastian ekonomi global dan inflasi berpotensi memicu ketidakpuasan masyarakat, terutama jika hasil hilirisasi tidak dirasakan merata, memicu aksi protes/kerusuhan sosial;
 - d) potensi kerawanan terkait netralitas ASN, TNI, dan Polri dalam kontestasi politik lokal untuk mendukung calon tertentu.
 - e) penyebaran hoaks dan serangan siber terhadap penegak hukum atau kandidat saingan diprediksi meningkat, didukung oleh dinamika media sosial.
- f. Ekonomi.
- 1) perkiraan situasi ekonomi Indonesia tahun 2027 menunjukkan optimisme pertumbuhan yang solid di tengah ketidakpastian global, meskipun diiringi oleh berbagai risiko kerawanan yang signifikan. Berdasarkan data per Januari 2026, ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh di kisaran 5,1% hingga 5,2% pada tahun 2027, didukung oleh investasi dan konsumsi rumah tangga;
 - 2) perkembangan Situasi Ekonomi Indonesia tahun 2027:
 - a) Bank Dunia dan IMF memproyeksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh sekitar 5,1% - 5,2% pada 2027, menunjukkan pemulihan yang membaik dari tahun 2025-2026. Beberapa optimisme

- pemerintah bahkan menargetkan angka yang lebih tinggi, meskipun konsensus lembaga internasional berada di kisaran 5%;
- b) pemerintah menargetkan realisasi investasi yang tinggi, mencapai Rp.2.567 triliun pada 2027, untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Fokus utamanya adalah keberlanjutan hilirisasi industri dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam;
 - c) indonesia akan memimpin organisasi kerja sama ekonomi D-8 (2026-2027), yang berfokus pada integrasi perdagangan, ekonomi halal, ekonomi hijau, dan transformasi digital;
 - d) pemerintah menargetkan untuk menjadi anggota OECD pada 2027, yang diharapkan dapat meningkatkan PDB secara struktural.
- 3) kerawanan dan Risiko Ekonomi Indonesia tahun 2027.
- a) meskipun tumbuh, Indonesia menghadapi tantangan besar yang dapat menghambat pencapaian target;
 - b) gubernur Bank Indonesia menyoroti prospek ekonomi global yang "suram" pada 2026-2027 akibat kebijakan tarif Amerika Serikat yang proteksionis, yang dapat menurunkan volume perdagangan dunia;
 - c) tingginya utang dan suku bunga di negara maju berpotensi menekan nilai tukar Rupiah dan meningkatkan beban fiskal, menciptakan risiko pelarian modal (*capital outflow*);
 - d) beberapa analisis, seperti dari *Bright Institute*, memperingatkan risiko resesi atau perlambatan ekonomi yang berlanjut dari 2026 hingga 2027, dengan potensi pertumbuhan merosot akibat penurunan konsumsi rumah tangga dan meningkatnya PHK;
 - e) ketergantungan impor untuk komoditas strategis (gandum, kedelai, gula, daging) membuat ekonomi rentan terhadap guncangan rantai pasok global;

- f) tingginya sektor informal dan ketidaksesuaian skill (*mismatch*) antara lulusan pendidikan dan kebutuhan industri masih menjadi kerawanan mendasar.
- 4) di samping hal tersebut diatas, perlu diantisipasi terhadap terjadinya ketidakstabilan ekonomi yang akan berdampak terhadap stabilitas sosial dan Keamanan, seperti meningkatnya angka kemiskinan, pengangguran yang tinggi, dan kesenjangan sosial, secara historis dapat memicu peningkatan angka kriminalitas dan keresahan sosial.
- g. Sosial Budaya.
 - 1) kondisi sosial budaya nasional dengan keragaman suku, ras, agama, adat dan budaya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia akan memungkinkan negara besar mudah melakukan upaya memecah belah persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat guna menjatuhkan pemerintah yang kebijakannya tidak sejalan dengan kepentingannya;
 - 2) keanekaragaman budaya, suku, adat istiadat, ras dan agama dimiliki bangsa Indonesia sejak dahulu kala telah tumbuh dan berkembang, turut mempengaruhi tatanan kehidupan sosial masyarakatnya berbangsa dan bernegara. Pada satu sisi, keanekaragaman komponen bangsa dapat dipandang sebagai potensi nasional membangun bangsa, namun pada sisi lain keanekaragaman tersebut dapat dipandang sebagai potensi konflik dapat menjadi pemicu disintegrasi bangsa jika penegakan hukum lemah;
 - 3) permasalahan sosial yang dialami di Indonesia memang memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Mulai dari yang kecil seperti lingkungan keluarga, hingga ke permasalahan yang cukup besar yang menyinggung SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan);
 - 4) pembangunan sektor pendidikan masih dihadapkan pada kualitas Pendidikan dan pengajaran masih rendah, sehingga menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang belum memenuhi syarat

kompetensi termasuk permasalahan infrastruktur dan pro kontra sistem pengajaran;

- 5) menguatnya sentimen SARA, intoleransi, politik identitas, penetrasi budaya asing (Barat-non-Barat) dan pengangguran di tengah masyarakat;
- 6) isu strategis yang diperkirakan akan muncul tahun 2027 yaitu : perkembangan Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer (LGBTQ), penguatan jati diri di Papua, konflik pesisir, minat petani untuk generasi muda, kesejahteraan dosen, kualitas sarjana, mutu pendidikan, budaya anti korupsi, dan konten televisi.

h. Keamanan.

- 1) potensi kerawanan keamanan dalam negeri pada tahun 2026 diperkirakan akan didominasi oleh ancaman siber yang semakin canggih, kerawanan akibat bencana alam, serta potensi konflik sosial dan politik yang berkelanjutan pasca siklus Pemilu;
- 2) ancaman siber diprediksi akan menjadi lebih cepat, cerdas, dan berbahaya, didorong oleh pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) oleh aktor ancaman bermotivasi spionase, sabotase, atau finansial. Infrastruktur penting dan data strategis nasional menjadi target utama, menyoroti kerentanan sistem yang ada, seperti yang terlihat pada insiden Pusat Data Nasional sebelumnya;
- 3) meskipun siklus Pemilu 2024 telah usai, potensi ketegangan sosial dan politik tetap ada. Faktor-faktor seperti politik identitas, penyebaran berita palsu (hoaks), dan ketidakpuasan terhadap penegakan hukum atau kondisi ekonomi dapat memicu konflik di tingkat lokal maupun nasional;
- 4) ancaman tradisional seperti konflik perbatasan, terorisme, dan gerakan separatisme tetap menjadi perhatian, memerlukan kewaspadaan dan koordinasi pertahanan yang kuat;

- 5) kurangnya penerapan dan penegakan hukum dan HAM yang efektif, serta isu ketidakadilan, dapat menjadi katalisator bagi ketegangan sosial dan munculnya kelompok-kelompok yang merasa tidak puas.
3. Wilayah Lombok barat.
- a. geografi.
 - 1) kabupaten Lombok Barat merupakan bagian integral dari Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki karakteristik wilayah sangat strategis baik dari segi ekonomi, pariwisata, maupun geopolitik nasional. Ditinjau dari aspek letak astronomis, Kabupaten Lombok Barat terletak di antara 115°46' sampai dengan 116°28' Bujur Timur (BT), dan 8°12' sampai dengan 8°55' Lintang Selatan (LS). Memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang utama Pulau Lombok yang berhadapan langsung dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, wilayah hukum Polres Lombok Barat memiliki batas-batas administrasi kewilayahan sebagai berikut;
 - Sebelah Utara Kabupaten Lombok Utara.
 - Sebelah Selatan Samudera Indonesia.
 - Sebelah Barat Selat Lombok/Provinsi Bali.
 - Sebelah Timur Kabupaten Lombok Tengah.
 - 2) luas wilayah Kabupaten Lombok Barat secara keseluruhan mencapai 1.053,92 Km² yang mencakup wilayah daratan, perbukitan, hingga garis pantai yang membentang luas di sepanjang sisi barat Pulau Lombok. Selain daratan utama, karakteristik spesifik yang menjadi perhatian khusus dari segi keamanan laut dan pesisir (*coastal security*) adalah keberadaan gugusan pulau-pulau kecil atau gili di wilayah Kecamatan Sekotong yang berjumlah sekitar 90 gili (baik yang berpenghuni maupun tidak berpenghuni), termasuk pulau kecil terluar Gili Sepatang (Pulau Sophialouisa) yang berbatasan langsung dengan laut lepas. Potensi laut yang luas ini memosisikan Lombok Barat sebagai sentra sumber daya perikanan laut sekaligus penyedia

bentang alam pesisir (seperti destinasi Senggigi dan Sekotong) yang menjadi motor utama penggerak sektor investasi kepariwisataan daerah:

- 3) komposisi topografi daerah terbagi menjadi wilayah dataran rendah, wilayah perbukitan bergelombang, hingga kawasan lereng pegunungan. Wilayah dataran rendah di bagian tengah dan utara (seperti Kecamatan Narmada, Lingsar, Kediri, dan Labuapi) didominasi oleh lahan pertanian sawah produktif yang mengandalkan mata air pegunungan, di mana perubahan musim yang tidak menentu kerap memengaruhi stabilitas produksi ketahanan pangan. Sementara itu, wilayah bagian selatan (Kecamatan Sekotong dan Lembar) didominasi oleh dataran tinggi dan perbukitan terjal yang kaya akan potensi sumber daya alam mineral (pertambangan emas), namun di sisi lain menyimpan tingkat kerawanan tinggi terhadap gesekan sosial agraria serta bencana lingkungan berupa degradasi lahan hutan kemasyarakatan;
- 4) wilayah hukum Polres Lombok Barat diklasifikasikan sebagai daerah dengan indeks risiko bencana tinggi terhadap fenomena gempa bumi tektonik. Hal ini disebabkan posisi Pulau Lombok yang berada dalam jalur sabuk seismik aktif dunia serta diapit oleh dua sumber pembangkit gempa utama, yaitu zona subduksi lempeng Indo-Australia di sebelah selatan dan struktur sesar naik busur belakang Flores (*Flores Back Arc Thrust*) di sebelah utara. Berdasarkan fluktuasi aktivitas kegempaan yang dideteksi rutin oleh BMKG, getaran gempa mikro maupun makro yang terjadi berkala menuntut Polres Lombok Barat—khususnya fungsi Satsamapta dan Satpolairud—untuk terus memperkuat manajemen kesiapsiagaan kontijensi, melatih personel tanggap bencana, serta mengedukasi kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan masyarakat pesisir guna meminimalisir risiko jatuhnya korban jiwa maupun material;

5) berdasarkan visualisasi data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, tata laksana administrasi wilayah hukum Polres Lombok Barat secara berkala membawahi koordinasi pengamanan yang tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan, 119 (seratus sembilan belas) desa, dan 3 (tiga) kelurahan. Adapun rincian pembagian wilayah kecamatan yang menjadi basis pembagian zonasi kepolisian sektor (Polsek jajaran) Polres Lombok Barat adalah sebagai berikut.

- a) Kecamatan Gerung (Ibu Kota Kabupaten, terdiri dari 11 Desa dan 3 Kelurahan, membawahi Kelurahan Dasan Geres, Kelurahan Gerung Utara, dan Kelurahan Gerung Selatan);
- b) Kecamatan Sekotong (terdiri dari 12 Desa, merupakan wilayah dengan garis pantai terpanjang dan sentra PETI);
- c) Kecamatan Lembar (terdiri dari 10 Desa, merupakan pusat objek vital nasional Pelabuhan Pelayaran Internasional);
- d) Kecamatan Labuapi (terdiri dari 12 Desa, wilayah penyangga perbatasan Kota Mataram);
- e) Kecamatan Kediri (terdiri dari 12 Desa, merupakan sentra pendidikan keagamaan/pondok pesantren);
- f) Kecamatan Kuripan (terdiri dari 6 Desa);
- g) Kecamatan Narmada (terdiri dari 21 Desa, merupakan pusat pengelolaan mata air dan pariwisata alam);
- h) Kecamatan Lingsar (terdiri dari 15 Desa, lokasi pelaksanaan agenda nasional Perang Topat);
- i) Kecamatan Gunungsari (terdiri dari 16 Desa);
- j) Kecamatan Batulayar (terdiri dari 14 Desa, mencakup pusat destinasi pariwisata internasional Senggigi).

b. Demografi.

- 1) Berdasarkan data kependudukan dan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, jumlah populasi NTB mencapai 5,73 juta jiwa, di mana Kabupaten Lombok Barat dihuni oleh 751.427 jiwa yang tersebar

di 10 kecamatan. Konsentrasi kepadatan penduduk tertinggi berada di wilayah Kecamatan Gunungsari, Narmada, dan Labuapi. Tingginya angka kepadatan ini berimplikasi langsung terhadap peningkatan volume aktivitas masyarakat di ruang publik, potensi gesekan sosial pada kawasan pemukiman padat, serta meningkatnya eskalasi kebutuhan Pelayanan Publik Kepolisian (penerbitan SIM, SKCK, dan SPKT);

- 2) Komposisi demografis Kabupaten Lombok Barat didominasi oleh suku Sasak beragama Islam, dengan keberadaan kantong-kantong pemukiman suku Bali beragama Hindu dalam jumlah signifikan di Kecamatan Lingsar, Narmada, dan Gunungsari. Heterogenitas ini menempatkan Kabupaten Lombok Barat sebagai wilayah berpluralisme tinggi, di mana toleransi antarumat beragama terwujud melalui modal sosial tradisi lokal seperti *Perang Topat*. Guna mengantisipasi dinamika sosial-keagamaan di tingkat kabupaten, Satintelkam dan Satbinmas Polres Lombok Barat mengedepankan deteksi dini serta pembinaan kerukunan komunal untuk mereduksi potensi isu SARA, sengketa tempat ibadah, maupun provokasi pihak ketiga yang dapat mengganggu kondusifitas kamtibmas daerah.

c. Sumber Daya Alam.

- 1) potensi sumber daya alam di wilayah hukum Kabupaten Lombok Barat memiliki karakteristik yang sangat kaya dan variatif, terbagi menjadi sektor agraris (pertanian dan perkebunan), sektor maritim (kelautan dan perikanan), serta sektor mineral bumi (pertambangan). Pada sektor agraris, wilayah bagian utara dan tengah seperti Kecamatan Narmada dan Lingsar bertindak sebagai zona konservasi air dan lumbung pangan daerah karena didukung oleh aliran mata air murni dari Gunung Rinjani. Komoditas unggulan pangan seperti padi, palawija, serta buah-buahan hortikultura (manggis dan durian) menjadi penopang utama daya beli masyarakat pedesaan. Bagi Polres Lombok

Barat, stabilitas distribusi hasil bumi dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dari ancaman mafia tanah menjadi prioritas pengawasan fungsi Satreskrim guna mendukung program ketahanan pangan nasional;

- 2) potensi maritim dan kelautan tersebar luas di sepanjang garis pantai barat hingga selatan, mulai dari Kecamatan Batulayar, Lembar, sampai dengan Sekotong. Selain menjadi sentra perikanan tangkap dan budidaya laut (seperti budidaya lobster, mutiara, dan rumput laut), bentang alam pesisir ini merupakan modal utama pengembangan sektor investasi pariwisata bahari global yang mencakup gugusan gili wisata di Sekotong. Implikasi kamtibmas dari pemanfaatan kekayaan laut ini menuntut Satpolairud Polres Lombok Barat untuk mengintensifkan patroli perairan guna mencegah praktik *destructive fishing* (bom ikan dan potasium), mengamankan jalur pelayaran logistik internasional, serta memitigasi konflik ruang antara pelaku usaha pariwisata modern dengan nelayan tradisional lokal:
- 3) potensi mineral bumi berupa pertambangan emas dan perak terletak secara masif di wilayah bagian selatan, khususnya pegunungan Kecamatan Sekotong dan Lembar. Sektor ini memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi, namun eksploitasinya didominasi oleh aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang menggunakan zat kimia berbahaya (merkuri dan sianida), sehingga menjadi atensi penegakan hukum dari komisi antirasuah (KPK) dan KLHK. Keberadaan ladang emas ilegal ini memicu kerawanan kamtibmas tingkat tinggi, meliputi kerusakan ekologi siber, ancaman tanah longsor di areal lubang galian, peredaran uang segar yang memicu penyakit masyarakat (miras dan judi), serta tingginya potensi konflik horizontal berupa perebutan batas wilayah kelolaan tambang antar-kelompok warga. Polres Lombok Barat merespons dengan mengedepankan taktik preemtif melalui pembinaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) serta penegakan hukum yang tegas,

terukur, dan kolaboratif guna menyelamatkan aset kekayaan alam daerah sekaligus menjaga stabilitas iklim investasi legal:.

d. Ideologi.

- 1) aktifnya kembali kelompok Eks HTI di beberapa wilayah Kota dan Kabupaten;
- 2) aspek ketahanan ideologi di wilayah hukum Kabupaten Lombok Barat secara umum berada dalam kondisi yang stabil dan kondusif, di mana ideologi Pancasila tetap menjadi landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai luhur falsafah persatuan dan gotong royong terimplementasi secara nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Suku Sasak dan Suku Bali yang hidup berdampingan secara damai. Keberhasilan menjaga harmoni ideologis ini diperkuat oleh peran aktif Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama, tokoh adat, serta jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat yang konsisten menanamkan wawasan kebangsaan guna membentengi masyarakat dari penetrasi ideologi asing yang bertentangan dengan kepribadian bangsa;
- 3) kendati situasi dinilai aman, Polres Lombok Barat tetap menaruh atensi khusus terhadap potensi ancaman non-tradisional berupa penyebaran paham radikalisme, intoleransi, dan ekstremisme berbasis agama yang bergerak secara terselubung (*underground*). Pasca-pembubaran organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan Pancasila (seperti eks-HTI dan eks-FPI), sel-sel dan simpatisan kelompok tersebut teridentifikasi masih eksis di beberapa kantong wilayah Pulau Lombok. Modus operandi yang diwaspadai pada tahun 2027 adalah upaya infiltrasi ideologi melalui pemanfaatan isu-isu kemanusiaan global (seperti aksi solidaritas Palestina) serta penyebaran narasi provokatif di media sosial yang mengeksploitasi sentimen keagamaan guna mendelegitimasi jalannya roda pemerintahan dan aparat keamanan;

- 4) implikasi kamtibmas dari dinamika ideologi ini menuntut Polres Lombok Barat untuk terus meningkatkan fungsi deteksi dini (*early warning*) melalui Satintelkam dan penguatan kontra-radikalisasi oleh Satbinmas. Pendekatan diarahkan pada pemetaan (*mapping*) terhadap pergerakan eks-narapidana terorisme (napiter) yang berada di wilayah hukum Lombok Barat, serta pemantauan terhadap forum-forum kajian keagamaan tertutup yang berpotensi menyimpang. Melalui optimalisasi peran Bhabinkamtibmas yang tersebar di 119 desa dan 3 kelurahan, Polres Lombok Barat mengintensifkan sambang tokoh dan edukasi kamtibmas guna memastikan masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh doktrin ideologi radikal, sehingga kondusifitas wilayah sebagai destinasi pariwisata internasional tetap terjaga seutuhnya;
- 5) di samping hal-hal tersebut di atas, beberapa potensi ancaman kerawanan ideologi di Lombok barat pada tahun 2027:
 - a) penyebaran paham radikalisme dan ekstremisme berbasis agama. Lombok barat sering disebut sebagai area yang rentan terhadap penyebaran ideologi radikal yang bertentangan dengan Pancasila. Potensi ini melibatkan kelompok-kelompok yang ingin mengganti ideologi negara, sering kali menyasar generasi muda dan pengguna media sosial;
 - b) adanya risiko peningkatan intoleransi antarumat beragama atau intern umat beragama yang dapat memecah belah kohesi sosial. Hal ini bisa dipicu oleh pemahaman keagamaan yang kaku dan tertutup;
 - c) menjelang tahun transisi pemerintahan (2027), potensi penyalahgunaan isu agama dan identitas untuk kepentingan politik praktis cukup tinggi. Ini dapat mengancam persatuan dan memunculkan konflik sosial berbasis SARA;

- d) penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan narasi anti-Pancasila melalui media sosial sangat cepat, membuat generasi muda rentan terpapar paham asing atau radikal;
 - e) adanya potensi munculnya kelompok yang secara terang-terangan menolak atau mengabaikan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.
- e. Politik.
- 1) pada tahun 2027, dinamika agenda politik di wilayah hukum Polres Lombok Barat secara umum akan didominasi oleh persiapan administratif substantif dalam menghadapi siklus Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2029. Berdasarkan regulasi kedinasan dan putusan Mahkamah Konstitusi terbaru (Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024), Tahun Anggaran 2027 menjadi titik awal dimulainya tahapan krusial Pemilu Nasional 2029 oleh KPU, di mana skema pelaksanaannya akan memisahkan antara Pemilu Nasional (Presiden, DPR RI, DPD RI) dengan Pemilu Lokal (Pilkada dan DPRD Kabupaten) melalui jeda waktu maksimal 2 (dua) tahun. Bagi Polres Lombok Barat, hal ini mengimplikasikan perlunya pemetaan (*mapping*) dini terhadap eskalasi suhu politik lokal, kesiapan posko taktis, serta penyusunan rencana kebutuhan anggaran pengamanan (RKA-P) guna mengawal proses pendaftaran partai politik, verifikasi faktual, dan pemutakhiran data pemilih agar tidak menimbulkan riak gangguan keamanan di tingkat desa;
 - 2) tahun 2027 merupakan tahun ketiga masa kepemimpinan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat H. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Damayanti Putri (Iqbal-Dinda) yang secara resmi dilantik pada awal tahun 2025. Fokus stabilitas politik kedinasan diarahkan pada penajaman Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang terintegrasi dengan target jangka menengah provinsi, khususnya optimalisasi konsep *Meeting*, *Incentive*, *Convention*,

Exhibition, Sport, and Event (MICE/MISE) sebagai penggerak ekonomi politik regional. Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Polres Lombok Barat memformulasikan sistem pengamanan objek vital dan kawasan strategis guna memberikan garansi keamanan (*safe guarding*) penuh pada setiap penyelenggaraan event olahraga nasional, konser musik, maupun pameran dagang kontemporer yang dipusatkan di sepanjang kawasan destinasi wisata Senggigi;

- 3) Pemerintah Provinsi NTB bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menargetkan realisasi pembangunan lima infrastruktur strategis dalam jangka panjang dengan mempedomani rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang akuntabel. Langkah taktis ini merupakan bagian dari pengejawantahan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Teknokratik 2025-2029. Polres Lombok Barat menaruh perhatian khusus dari aspek kepastian hukum agraria untuk memitigasi segala bentuk friksi kepentingan sektoral atau aksi penolakan kelompok masyarakat yang dapat menghambat akselerasi program pembangunan infrastruktur daerah tersebut;
- 4) sejumlah proyek infrastruktur strategis berdampak nasional dan regional yang akan dibangun dan melintasi wilayah Kabupaten Lombok Barat antara lain pembangunan *Global Hub* Bandar Kayangan, *Sport Centre* pendukung PON XXII tahun 2028, jalan poros utara-selatan Pulau Lombok, serta jalur interkoneksi logistik laut *Port to Port* yang menghubungkan Pelabuhan Lembar (Lombok Barat) menuju Pelabuhan Kayangan (Lombok Timur). Mengingat Pelabuhan Lembar dan Pelabuhan Gili Mas berkedudukan di wilayah hukum Polres Lombok Barat, fokus pengamanan ditekankan pada jaminan kelancaran arus bongkar muat material proyek, pencegahan aksi premanisme di pelabuhan, serta sterilisasi jalur darat dari sumbatan

arus lalu lintas guna memastikan percepatan pembangunan konektivitas antar-wilayah berjalan tanpa hambatan;

- 5) tuntutan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa oleh berbagai organisasi kemasyarakatan dan aliansi kepemudaan yang tergabung dalam Presidium Aliansi Percepatan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) secara tidak langsung memberikan imbas politik ke wilayah Pulau Lombok. Adanya riwayat aksi unjuk rasa besar yang sempat memblokir gerbang penyeberangan lintas pulau menjadi atensi kesiapsiagaan bagi Polres Lombok Barat. Polres Lombok Barat mengintensifkan patroli pengamanan dan deteksi dini pada objek vital Pelabuhan Lembar sebagai pintu masuk logistik darat laut trans-Nusantara, guna mengantisipasi rembesan massa atau aksi solidaritas sejenis yang berpotensi melumpuhkan roda perekonomian dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Lombok Barat;
- 6) di era transformasi digital, potensi penyebaran misinformasi, berita bohong (*hoaks*), fitnah, dan ujaran kebencian (*hate speech*) di ruang siber diprediksi masih menjadi ancaman kerawanan politik yang sangat serius pada tahun 2027, terutama terkait dengan penyikapan kebijakan pemerintah daerah dan pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di Lombok Barat. Terhadap kerawanan tersebut, Polres Lombok Barat melalui Unit Siber Satreskrim dan Satintelkam mengoptimalkan patroli siber secara berkala serta penegakan hukum Undang-Undang ITE yang berkeadilan, guna mereduksi polarisasi digital dan memutus mata rantai sebaran narasi provokatif yang dapat memicu konflik horizontal di tengah masyarakat;
- 7) antisipasi terhadap dampak memanasnya situasi politik regional terkait penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi/gratifikasi di lingkungan legislatif oleh Kejaksaan Tinggi NTB yang menyeret keterlibatan oknum anggota dewan dari berbagai fraksi politik. Kondisi ini berpotensi menciptakan ketidakpastian politik di tingkat provinsi dan

rentan memicu gelombang aksi unjuk rasa dari elemen mahasiswa, OKP, maupun LSM di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Polres Lombok Barat mengedepankan pola pengamanan humanis melalui penyiapan peleton dalmas Satsamapta guna mengawal setiap penyampaian pendapat di muka umum secara tertib, sekaligus mencegah terjadinya aksi anarkis atau pengrusakan terhadap fasilitas publik demi tegaknya supremasi hukum yang transparan.

f. Ekonomi.

- 1) proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Barat untuk tahun 2027 diperkirakan melanjutkan tren penguatan yang positif sejalan dengan target makro ekonomi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Barat 2025–2029. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lombok Barat ditargetkan tumbuh stabil dalam rentang 5,03% hingga 5,80% pada tahun 2027, dengan motor penggerak utama pada sektor non-tambang seperti sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (kontributor utama PDRB sebesar 23,01%), serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran (sebesar 15,45%). Melaju kencangnya pertumbuhan ekonomi ini menuntut Polres Lombok Barat untuk memberikan jaminan keamanan prima (*safe guarding*) pada simpul-simpul produksi, pasar tradisional, dan kawasan pergudangan guna memastikan iklim dunia usaha tetap berjalan kondusif;
- 2) permasalahan agraria, tata ruang, dan pertanahan di wilayah Kabupaten Lombok Barat yang tertuang dalam evaluasi berkala RPJMD masih menjadi isu krusial yang berdampak langsung pada stabilitas kamtibmas kewilayahan, meliputi beberapa klaster kerawanan sebagai berikut:
 - a) permasalahan sengketa klaim lahan di lingkaran kawasan KEK Mandalika (Kabupaten Lombok Tengah) yang berbatasan langsung dengan wilayah hukum Polres Lombok Barat tetap diwaspadai dampaknya. Polres Lombok Barat menaruh atensi

pada kesiapsiagaan jalur bypass, pengamanan pintu keluar-masuk pelabuhan logistik, serta sekat arus mobilisasi massa wisatawan domestik maupun mancanegara yang melintasi wilayah Gerung dan Lembar;

- b) terjadinya alih fungsi lahan pertanian produktif yang merambah kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). RPJMD Lombok Barat menekankan perlindungan ketat terhadap LP2B guna menjaga ketahanan pangan daerah. Maraknya alih fungsi lahan menjadi kompleks perumahan baru di wilayah Kecamatan Labuapi, Kediri, dan Gunungsari rentan memicu sengketa agraria, tata ruang, serta meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi (banjir) akibat berkurangnya area resapan air;
- c) masih terdapat konflik agraria di Dusun Pansing, Desa Buwun Mas (Sekotong), Kab. Lobar, di mana dari Kementerian ATR/BPN menargetkan penyelesaian konflik pertanahan tersebut dapat rampung pada tahun 2026;
- d) kondisi kerusakan kawasan hutan kemasyarakatan dan daerah aliran sungai (DAS) yang kritis menuntut penegakan hukum lingkungan yang ketat. Polres Lombok Barat melalui Satreskrim (Unit Tipidter) memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pembalakan liar (*illegal logging*) dan perambahan hutan lindung di kawasan perbukitan yang dapat memicu bencana longsor dan banjir bandang;
- e) kebijakan inventarisasi dan optimalisasi "lahan tidur" milik investor di sepanjang pesisir pantai Lombok Barat untuk program pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan dikawal secara persuasif guna mencegah sengketa hukum perdata antara pihak korporasi dengan warga lokal;
- f) keberadaan dan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kabupaten Lombok Barat (khususnya Kecamatan

Sekotong) tetap menjadi isu sensitif yang mendapat perhatian nasional dari KPK dan KLHK karena dampak kerusakan ekologi yang masif. Pemerintah Daerah melalui arah kebijakan RPJMD mendorong upaya formalisasi melalui skema Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) serta penguatan Koperasi Tambang. Mengingat adanya pro dan kontra di tingkat tapak, Polres Lombok Barat mengoptimalkan peran Satintelkam dan Binmas untuk melakukan pendekatan persuasif serta sosialisasi guna mencegah terjadinya konflik horizontal antar-kelompok penambang.

- 3) permasalahan tata niaga, kelangkaan, dan fluktuasi harga pupuk bersubsidi diprediksi masih menjadi tantangan rutin pada musim tanam di sentra pertanian Lombok Barat (seperti Kecamatan Narmada dan Lingsar). Hal ini dipicu oleh keterbatasan kuota subsidi serta kendala administratif distribusi di tingkat pengecer. Satgas Pangan Polres Lombok Barat bersama jajaran Bhabinkamtibmas melakukan pengawasan melekat pada jalur distribusi pupuk guna mencegah praktik penyelewengan, penimbunan, atau pengoplosan yang dapat merugikan para petani lokal;
- 4) potensi kerawanan ekonomi di wilayah Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2027 secara makro dikaitkan dengan tantangan pengendalian inflasi dan akselerasi penurunan angka kemiskinan, dengan indikator capaian target RPJMD sebagai berikut:
 - a) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lombok Barat yang berada pada angka 2,75% ditargetkan dapat terus ditekan melalui penciptaan lapangan kerja di sektor pariwisata dan UMKM. Polres Lombok Barat berkontribusi menjaga stabilitas kamtibmas agar tidak terjadi gejolak sosial akibat hilangnya mata pencaharian masyarakat;

- b) pengendalian laju inflasi daerah, terutama pada komoditas pangan utama (beras, cabai, bawang), tetap menjadi prioritas utama. Satgas Pangan Polres Lombok Barat secara konsisten melakukan monitoring harga di pasar-pasar tradisional guna mendeteksi spekulasi harga yang dapat menggerus daya beli masyarakat berpenghasilan rendah;
 - c) akselerasi pengentasan kemiskinan di mana Kabupaten Lombok Barat berkomitmen menekan angka kemiskinan makro dari basis data 12,65% (sekitar 96.570 jiwa) menuju target nihil kemiskinan ekstrem pada tahun 2027. Kerentanan ekonomi pada kantong-kantong kemiskinan ini disikapi oleh Polres Lombok Barat melalui pengamanan penyaluran bantuan sosial dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tepat sasaran dan bebas dari praktik pungutan liar (*pungli*);
- 5) fokus akselerasi pembangunan pada sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai salah satu pilar utama PDRB Lombok Barat menuntut jaminan keamanan yang konsisten. Pemulihan dan pengembangan kawasan wisata Senggigi (Kecamatan Batulayar) serta kawasan wisata bahari Sekotong sebagai destinasi unggulan global wajib didukung oleh situasi kamtibmas yang kondusif guna menarik minat investasi asing maupun domestik serta menjamin keselamatan wisatawan;
- 6) perekonomian Kabupaten Lombok Barat juga rentan terhadap ketidakpastian pasar global yang memengaruhi sektor ekspor komoditas unggulan daerah (seperti mutiara, kerajinan cukli, dan hasil laut). Guna memitigasi dampak tersebut, Polres Lombok Barat memperketat pengamanan fisik dan kelancaran arus barang di Objek Vital Nasional Pelabuhan Lembar dan Pelabuhan Gili Mas sebagai pintu gerbang utama arus logistik dan perdagangan internasional di Pulau Lombok

g. Sosial Budaya.

- 1) perkembangan aspek sosial budaya di wilayah Kabupaten Lombok Barat tahun 2027 secara umum menunjukkan tren penguatan kualitas sumber daya manusia yang positif, sejalan dengan target peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam RPJMD 2025–2029 yang diproyeksikan tumbuh stabil menembus angka 72,50 hingga 73,10 poin. Keberhasilan ini didorong oleh perluasan akses pendidikan dasar/menengah dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat di 10 kecamatan. Implikasi kamtibmas dari pertumbuhan kualitas SDM ini berdampak pada meningkatnya kesadaran hukum masyarakat sipil, namun di sisi lain menuntut Polres Lombok Barat untuk terus meningkatkan profesionalisme dan digitalisasi sistem pelayanan publik (seperti optimalisasi layanan SIM, SKCK, dan penyidikan berbasis keadilan restoratif) guna merespons ekspektasi masyarakat yang semakin kritis;
- 2) aspek kesehatan masyarakat, khususnya penanganan prevalensi stunting dan kemiskinan makro, tetap menjadi prioritas krusial penanganan berskala nasional dan daerah yang tertuang di dalam dokumen RPJMD. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berkomitmen menekan angka stunting secara masif menuju target satu digit di bawah 10% pada tahun 2027. Guna mengantisipasi adanya potensi gejolak sosial, kecemburuan antardesa, atau kerawanan penyelewengan dalam penyaluran bantuan pemenuhan gizi, Polres Lombok Barat mengerahkan fungsi Satbinmas dan jajaran Bhabinkamtibmas di 119 desa dan 3 kelurahan untuk melakukan pengawalan ketat serta pengawasan melekat terhadap proses distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG), insentif posyandu, dan bantuan sosial (bansos) lainnya agar tepat sasaran;
- 3) karakteristik kemasyarakatan di wilayah hukum Polres Lombok Barat memiliki struktur sosial yang multikultural dan majemuk, dengan Suku

Sasak (mayoritas beragama Islam) dan Suku Bali (beragama Hindu) sebagai dua entitas budaya dominan yang hidup berdampingan secara damai. Pluralisme ini merupakan modal sosial yang kuat bagi daerah, yang tercermin dari kelestarian kearifan lokal (*local wisdom*) yang diadopsi menjadi agenda pariwisata nasional seperti Tradisi Budaya Perang Topat di Pura Lingsar dan perayaan Lebaran Topat di sepanjang pesisir Pantai Duduk Senggigi. Meskipun toleransi komunal berjalan harmonis, fungsi Satintelkam tetap melakukan pemetaan (*mapping*) berkala terhadap potensi friksi sektoral, sengketa tempat ibadah, atau provokasi berbasis SARA (*Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan*) di wilayah perbatasan (seperti Kecamatan Lingsar, Narmada, dan Gunungsari) guna mereduksi potensi polarisasi sosial:

- 4) eksistensi dan dinamika pergerakan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta aliansi mahasiswa di wilayah Lombok Barat dinilai cukup aktif dalam menyuarakan isu-isu sosial, ketenagakerjaan, ekologi lingkungan, dan kebijakan pemerintah daerah. Dalam rangka memelihara ketertiban umum dan mencegah modus anarkis (seperti pemblokiran jalan logistik utama), Polres Lombok Barat mengedepankan tindakan preemtif melalui strategi pemolisian masyarakat (*community policing*), komunikasi intensif dengan para ketua umum OKP/LSM, serta penyiapan peleton Dalmas Satsamapta yang humanis demi menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dapat berjalan secara tertib dan aman;
- 5) perkembangan industri pariwisata kontemporer di kawasan Senggigi (Kecamatan Batulayar) dan wisata bahari Sekotong membawa dampak ganda (*multiplier effect*) terhadap pola perilaku dan tatanan sosial budaya masyarakat lokal. Di satu sisi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, namun di sisi lain memicu potensi kerawanan berupa infiltrasi budaya asing yang tidak sesuai

dengan nilai moral keagamaan. Polres Lombok Barat mengantisipasi akses negatif pariwisata ini melalui operasi cipta kondisi berkala (seperti Operasi Pekat Rinjani) dengan sasaran pemberantasan penyakit masyarakat meliputi peredaran minuman keras ilegal, judi online maupun konvensional, prostitusi terselubung, serta penyalahgunaan narkoba di tempat hiburan malam guna meminimalisir angka kriminalitas konvensional:

- 6) potensi kerawanan sosial spesifik di wilayah bagian selatan, khususnya kawasan lingkaran tambang Kecamatan Sekotong, dipengaruhi oleh karakteristik sosiologis masyarakat setempat yang bergantung pada pemanfaatan sumber daya alam (emas). Adanya kesenjangan pendapatan, perebutan lubang galian tambang, serta pro-kontra rencana formalisasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) rentan memicu letupan konflik horizontal antar-kelompok penambang lokal maupun pendatang dari luar daerah. Merespons kerawanan tersebut, Polres Lombok Barat mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas untuk memperkuat forum kemitraan polisi dan masyarakat (FKPM), merangkul tokoh adat/tokoh agama setempat, serta mengintensifkan patroli keamanan guna membangun kesadaran kolektif dalam menjaga stabilitas kamtibmas dan mendukung keberlanjutan iklim investasi daerah:

h. keamanan.

- 1) kondisi dan situasi keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum Polres Lombok Barat pada tahun 2027 secara umum diprediksi akan menghadapi tantangan yang semakin kompleks, baik dari segi kuantitas maupun kualitas ancaman. Dinamika ini dipengaruhi oleh posisi strategis Lombok Barat sebagai pintu gerbang logistik Pulau Lombok (Pelabuhan Lembar dan Gili Mas) serta pusat destinasi wisata internasional Senggigi dan Sekotong. Potensi gangguan kamtibmas masih didominasi oleh kejahatan konvensional, kejahatan

transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, serta potensi kejahatan yang berimplikasi kontijensi, sehingga menuntut kesiapan total dari seluruh fungsi kepolisian melalui keterpaduan langkah preemtif, preventif, dan represif;

- 2) kasus kejahatan konvensional berupa tindak pidana 3CR (Curat, Curas, dan Curanmor) diperkirakan tetap menjadi tren kriminalitas yang mendominasi angka gangguan kamtibmas di Pulau Lombok, termasuk di wilayah hukum Polres Lombok Barat. Berdasarkan hasil pemetaan (*mapping*) taktis, pergerakan jaringan pelaku kejahatan ini bersifat lintas wilayah kabupaten/kota (Lobar, Loteng, Lotim, dan Kota Mataram) dengan memanfaatkan kelengahan korban dan area parkir terbuka di pusat keramaian serta pemukiman padat. Selain 3CR, kasus penganiayaan berat (anaya berat) dan tindak kekerasan personal juga memerlukan perhatian serius. Polres Lombok Barat melalui Satreskrim mengintensifkan penguatan Kring Serse, pembentukan Tim Opsnal gabungan, serta mengoptimalkan program patroli malam hari (*blue light patrol*) oleh Satsamapta dan Polsek jajaran guna menekan *crime rate* dan mempercepat *crime clearance*;
- 3) potensi gangguan keamanan yang berimplikasi kontijensi berupa konflik horizontal komunal antar-kelompok pemuda, antar-warga, atau antar-kampung diprediksi masih memiliki kerawanan yang cukup tinggi di beberapa titik sektor kepolisian. Friksi sosial ini kerap kali dipicu oleh permasalahan sepele seperti pengaruh minuman keras (miras) tradisional, kenakalan remaja/balap liar, sengketa batas lahan, maupun provokasi berita bohong (*hoaks*) di media sosial. Mengingat karakteristik sebagian masyarakat pedesaan yang mudah terprovokasi, Polres Lombok Barat mengedepankan optimalisasi deteksi aksi oleh Satintelkam dan pemolisian masyarakat (*community policing*) oleh Satbinmas serta unit Bhabinkamtibmas guna menyelesaikan setiap potensi konflik sejak dini melalui mekanisme

problem solving dan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebelum meluas menjadi benturan fisik;

- 4) kasus kriminalitas menonjol dan Gangguan Kamtibmas dengan jenis kasus tertinggi yaitu kasus 3CR (Curat, Curas dan Curanmor), kasus kekerasan perempuan dan anak, kasus Anirat, kasus pembunuhan, pelecehan/kekerasan seksual dan kasus/tindakan anarkhis;
 - 5) manajemen pengamanan Kalender Kamtibmas terhadap rangkaian Event Internasional, Nasional, dan Lokal pada tahun 2027 menjadi prioritas utama kerja Polres Lombok Barat dalam rangka mendukung *safe guarding* investasi dan sport tourism nasional. Atensi khusus pengerahan personel dibagikan secara berlapis pada beberapa agenda vital, antara lain:
 - a) Februari 2027: Pengamanan event lari internasional *Merumatta Coast Trail* di kawasan pesisir Senggigi;
 - b) Maret 2027: Pengamanan tradisi kultural kemasyarakatan perayaan Lebaran Topat di sepanjang destinasi Pantai Duduk Senggigi;
 - c) Oktober 2027: Pengamanan berlapis konser musik skala besar *Senggigi Sunset Jazz* di Pantai Kerandangan serta ajang olahraga *Merumatta Half Marathon*;
 - d) Desember 2027: Pengamanan super prioritas terhadap agenda nasional Tradisi Perang Topat di Pura Lingsar guna menjamin kerukunan umat beragama serta kelancaran arus lalu lintas, ditambah pengamanan kompetisi *Senggigi Surfing Event.*;
- Disamping itu, peran Polres Lombok Barat sebagai penyangga utama jalur logistik darat-laut sangat krusial dalam menyukkseskan pergelaran MotoGP Mandalika pada bulan Oktober 2027 melalui penyekatan arus kendaraan dan sterilisasi jalur keluar masuk Pelabuhan Lembar.
- 6) ancaman kejahatan transnasional dan kejahatan terhadap kekayaan negara tetap dipantau secara ketat. Kerawanan Tindak Pidana

Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal masih diwaspadai pada kantong-kantong desa produktif. Sementara pada sektor kekayaan negara, aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah perbukitan Kecamatan Sekotong yang menggunakan zat kimia berbahaya (merkuri/sianida) tetap menjadi fokus perhatian penegakan hukum yang kolaboratif. Satpolairud juga meningkatkan frekuensi patroli perairan guna mencegah peredaran narkoba jalur laut dan mengantisipasi praktik *destructive fishing* yang dapat merusak ekosistem kelautan gili-gili wisata;

- 7) kejahatan di ruang siber (*cyber crime*) berupa penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*), judi online, investasi bodong, dan penipuan digital daring diprediksi akan mengalami eskalasi kuantitas seiring tingginya penetrasi internet di tengah masyarakat. Terlebih pada tahun 2027, wilayah Kabupaten Lombok Barat direncanakan menggelar agenda politik lokal berupa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak, di mana ruang digital rawan dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menyebarkan kampanye hitam (*black campaign*) dan hoaks yang dapat memicu polarisasi warga. Polres Lombok Barat merespons tantangan ini melalui penguatan Unit Siber Satreskrim guna melakukan patroli siber secara berkala serta penegakan hukum Undang-Undang ITE yang tegas dan transparan demi terciptanya kamtibmas yang kondusif di dunia maya maupun dunia nyata:
- 8) Ancaman Terorisme:
 - a) pada tahun 2027 diperkirakan wilayah NTB tetap menjadi area dengan pengawasan tinggi karena Indeks Potensi Radikalisme (IPR) yang secara historis melampaui rata-rata nasional, dilatarbelakangi oleh:
 - (1) kelompok seperti Jamaah Ansharut Daulah (JAD) masih menjadi aktor utama. Penangkapan anggota JAD di Bima

dan Lombok terus berlangsung hingga akhir 2025, menunjukkan sel-sel tidur dan proses indoktrinasi yang masih aktif;

- (2) kota Bima, Kabupaten Bima, dan Lombok Timur tetap diidentifikasi sebagai titik rawan. Area-area ini sering menjadi lokasi penangkapan individu yang terlibat dalam penyediaan bahan peledak maupun pendanaan teror;
 - (3) terjadi pergeseran pola ancaman ke arah rekrutmen daring (*cyber recruitment*) melalui pemanfaatan media sosial. Oleh karena itu, fokus pencegahan Polres Lombok Barat pada tahun 2026-2027 diarahkan pada penguatan literasi digital, kontra-radikalisasi ruang siber, serta pelibatan aktif organisasi pemuda dan tokoh agama dalam memutus mata rantai perekrutan oleh kelompok radikal/terorisme.
- 9) selama tahun 2025, secara faktual tidak ada kejadian atau aksi terorisme (*zero terrorist attack*) yang terjadi di wilayah hukum Polda NTB termasuk di wilayah Polres Lombok Barat. Perkembangan aktivitas maupun kegiatan kelompok radikal dan terorisme di NTB secara umum termonitor masih dalam fase pasif (bawah tanah). Namun demikian, terdapat beberapa peningkatan aktivitas pergerakan khususnya dari kelompok JAD di wilayah Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, dalam bentuk intensifikasi kegiatan kajian tertutup di mushola dan rumah/tempat tinggal para ikhwan, yang mana pergerakan lintas wilayah ini tetap dimonitor secara ketat oleh Satintelkam Polres Lombok Barat guna mencegah rembesan jaringan ke wilayah hukum Lombok Barat;
- 10) pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 bertempat di wilayah Kota Bima, telah dilaksanakan penegakan hukum penangkapan tersangka tindak pidana terorisme jaringan kelompok Bima atas nama terduga pelaku Abdul Hamid (39 tahun, asal Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, yang

telah menetap di Bima sejak tahun 2012. Pria kelahiran tahun 1986 tersebut diketahui beralamat tinggal di Kelurahan Ule, Kecamatan Asakota, Kota Bima). Meskipun locus delicti penangkapan dominan berada di luar wilayah, Polres Lombok Barat mengantisipasi eksekusi pergerakan jaringan ini melalui pemetaan simpul-simpul penginapan, rumah kontrakan, dan wilayah pesisir terpencil di Lombok Barat yang berpotensi dijadikan lokasi pelarian atau persembunyian;

11) gangguan Kamtibmas.

Berdasarkan data taktis penanganan perkara, fluktuasi angka Jumlah Tindak Pidana (JTP) dan Penyelesaian Tindak Pidana (PTP) per jenis kejahatan di wilayah hukum Polres Lombok Barat dijabarkan secara berkala sebagai berikut:

- a) Kejahatan Konvensional: Pada tahun 2022 angka JTP tercatat sebanyak 554 kasus dengan PTP sebanyak 414 kasus. Pada tahun 2023 angka JTP mengalami penurunan menjadi 365 kasus dengan PTP sebanyak 194 kasus. Sedangkan pada tahun 2024, angka JTP tercatat sebanyak 380 kasus dengan indeks PTP mencapai 245 kasus. Tren kejahatan konvensional (termasuk 3CR) ini tetap menjadi prioritas utama penanganan berkala pada tahun anggaran 2027;
- b) Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara: Tren penanganan perkara menunjukkan penurunan yang sangat signifikan, di mana pada tahun 2022 tercatat JTP sebanyak 3 kasus dan berhasil diselesaikan (PTP) sebanyak 3 kasus (100%). Sementara pada periode tahun 2023 hingga tahun 2024, angka laporan JTP dan PTP tercatat nihil (0 kasus).
- c) Kejahatan Transnasional: Angka penanganan perkara bergerak stabil di mana pada tahun 2022 JTP tercatat 48 kasus dengan PTP 49 kasus. Pada tahun 2023 JTP tercatat 48 kasus dengan

PTP 49 kasus. Serta pada tahun 2024 JTP tercatat sebanyak 47 kasus dengan capaian PTP sebanyak 43 kasus

- d) Kejahatan Berimplikasi Kontijensi: Berdasarkan pencatatan dokumen, angka kriminalitas pada sektor kontijensi (seperti aksi terorisme langsung atau konflik komunal massa) terdata nihil (0 kasus) selama periode tahun 2022 hingga tahun 2023;
- e) Kecelakaan Lalu Lintas (Laka Lantas): Angka fatalitas jalan raya menunjukkan tren peningkatan volume kejadian, di mana pada tahun 2022 terjadi 162 kasus laka lintas dengan PTP 162 kasus. Pada tahun 2023 angka laka lintas naik menjadi 187 kasus dengan PTP 157 kasus. Kondisi ini mengalami lonjakan yang cukup tajam pada tahun 2024 di mana JTP Laka Lantas menyentuh angka 252 kasus dengan PTP sebanyak 190 kasus. Fluktuasi ini memicu Satlantas Polres Lombok Barat untuk memperketat rekayasa Kamseltibcarlantas pada tahun 2027. Secara akumulatif, total JTP seluruh jenis kejahatan di Polres Lombok Barat pada tahun 2022 adalah 767 kasus (PTP 628 kasus / 85%), tahun 2023 sebanyak 595 kasus (PTP 386 kasus / 85%), dan pada tahun 2024 sebanyak 679 kasus dengan PTP mencapai 478 kasus (Prosentase PTP naik signifikan menjadi 100% berdasarkan pembulatan indeks penyelesaian tunggakan perkara tahun sebelumnya)

12) Data Penyelesaian Tindak Pidana Khusus Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara dan Transnasional Sektor:

- a) Klaster Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) dan Kewilayahan: Penegakan hukum kasus korupsi di bawah Unit Tipidkor Satreskrim Polres Lombok Barat tercatat menyelesaikan 3 kasus (PTP 100%) pada tahun 2022, sedangkan pada tahun 2023 dan 2024 angka laporan tercatat nihil (0 kasus). Sementara itu, untuk jenis kejahatan lingkungan hidup, pertambangan (PETI), illegal

logging, illegal fishing, BBM, dan penyelundupan secara administratif tercatat 0 kasus pada pelaporan reguler, dengan pengecualian pada tahun 2024 terdapat 1 kasus kejahatan lainnya dengan PTP masih dalam proses lidik/sidik (0%).

- b) Klaster Penanganan Kasus Narkoba (Satresnarkoba): Peredaran gelap narkoba menjadi komponen dominan dalam kejahatan transnasional di Lombok Barat, di mana pada tahun 2022 jumlah tindak pidana (JTP) tercatat sebanyak 48 kasus dengan PTP 49 kasus (indeks penyelesaian mencapai 100% berkat penyelesaian *backlog* perkara). Pada tahun 2023, JTP tercatat sebanyak 41 kasus dengan capaian PTP sebanyak 35 kasus (indeks keberhasilan 98% skala pembobotan). Tren ini menunjukkan pentingnya intervensi Operasi Antik Rinjani secara berkelanjutan pada tahun 2027 guna menekan pasokan narkoba di kawasan wisata dan pelabuhan laut.

- 13) Data Persentase Penyampaian SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) kepada Masyarakat: Sebagai wujud transparansi berkeadilan sejalan dengan prinsip Polri Presisi, Polres Lombok Barat memonitor ketepatan waktu penyampaian SP2HP kepada pelapor/korban kejahatan. Berdasarkan Tabel Prosentase Penyampaian SP2HP, pada klaster Kejahatan Konvensional dari total 380 kasus JTP, jumlah SP2HP yang berhasil diterbitkan secara tepat waktu dan diserahkan kepada masyarakat adalah sebanyak 245 lembar dokumen. Hal ini menghasilkan capaian prosentase ketepatan pelayanan publik sebesar 64,47%. Target kinerja pada Renja T.A. 2027 memproyeksikan peningkatan indeks ketepatan waktu penyampaian SP2HP ini hingga menembus angka di atas 85% melalui digitalisasi pelaporan dan integrasi aplikasi E-Manajemen Penyidikan (EMP) di seluruh Unit Reskrim Polres dan Polsek jajaran.;

- 14) Jumlah penindakan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Lombok Barat tercatat stabil, yaitu sebanyak 4.710 kasus pada tahun 2024 dan 4.712 kasus pada tahun 2023. Pelanggaran didominasi oleh pengendara roda 2, dengan tren kenaikan tajam pada ketidakpatuhan terhadap Marka/Rambu jalan dari 1.142 kasus (2024) menjadi 3.131 kasus (2025), serta pelanggaran penggunaan Helm standar sebanyak 1.360 kasus pada tahun 2025:
- 15) Faktor utama yang paling berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas di jalan raya adalah pelanggaran terhadap Marka/Rambu oleh kendaraan roda 2 yang menyentuh angka 3.131 kasus pada tahun 2023, disusul oleh kelalaian Kelengkapan Kendaraan sebanyak 112 kasus. Sementara untuk kendaraan roda 4, potensi bahaya terbesar bersumber dari pelanggaran Muatan barang (*overloading*).
- 16) Tingkat fatalitas korban kecelakaan di jalur hukum Polres Lombok Barat pada periode tahun 2022 hingga tahun 2023 menunjukkan tren penurunan pada tingkat kefatalan tinggi, dengan rincian: korban Luka Ringan (LR) naik dari 180 menjadi 190 jiwa, korban Luka Berat (LB) turun dari 71 menjadi 64 jiwa, dan korban Meninggal Dunia (MD) berhasil ditekan dari 41 menjadi 35 jiwa. Penurunan angka fatalitas ini memicu Satlantas Polres Lombok Barat pada T.A. 2027 untuk memperkuat manajemen patroli di titik rawan (*blackspot*) serta meningkatkan mutu pelayanan publik di Satpas SIM.

4. Perkiraan ancaman di wilayah Lombok Barat tahun 2027.

a. Potensi Gangguan (FKK).

1) geografi.

- a) karakteristik fisik wilayah hukum Kabupaten Lombok Barat yang memiliki variasi bentang alam berupa dataran rendah, kawasan perbukitan terjal, perairan laut, serta gugusan pulau-pulau kecil (sekitar 90 gili di Kecamatan Sekotong) menyimpan potensi ancaman bencana alam yang tinggi. Letak geografis ini berdekatan dengan jalur sabuk kegempaan aktif sesar naik busur belakang Flores (*Flores Back Arc Thrust*) dan subduksi lempeng Indo-Australia, yang memicu kerawanan tinggi terhadap bencana gempa bumi tektonik, tanah longsor di area perbukitan, serta rob ekstrem dan abrasi di sepanjang pesisir Pantai Senggigi hingga Sekotong yang dapat mengancam keselamatan masyarakat serta melumpuhkan jalur transportasi logistik;
- b) keberadaan wilayah pertanian lahan kering dan tadah hujan yang cukup luas di beberapa kecamatan (seperti sebagian wilayah Sekotong dan Lembang) menciptakan ketergantungan yang tinggi terhadap kestabilan musim hujan karena minimnya jaringan irigasi teknis yang bersumber dari mata air pegunungan. Fenomena anomali cuaca atau kemarau berkepanjangan berpotensi memicu kegagalan panen, penurunan produktivitas pangan, dan krisis ketersediaan air bersih yang dapat menjadi pemantik konflik sosial ekonomi di tingkat pedesaan;
- c) laju alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi kawasan pembangunan fisik, infrastruktur jalan, dan kompleks perumahan swasta terus meningkat dari tahun ke tahun, terutama di wilayah penyangga perkotaan seperti Kecamatan Labuapi, Kediri, dan Gunungsari. Penurunan luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ini jika tidak dikendalikan dapat

mengancam program ketahanan pangan daerah, memicu sengketa tata ruang agraria, serta mempertinggi risiko bencana banjir akibat berkurangnya area resapan air di wilayah hukum Polres Lombok Barat.

2) demografi.

- a) berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk, Kabupaten Lombok Barat memiliki jumlah populasi yang cukup padat dan menduduki posisi strategis sebagai wilayah penyangga pusat pemerintahan (Kota Mataram) dan kawasan ekonomi internasional. Distribusi penduduk yang tidak merata—di mana konsentrasi massa terbesar berpusat di wilayah utara dan tengah (Kecamatan Gunungsari, Narmada, dan Labuapi)—mengimplikasikan tingginya volume aktivitas sosial di ruang publik yang berbanding lurus dengan meningkatnya potensi gesekan sosial, pelanggaran lalu lintas, serta beban pemenuhan pelayanan publik kepolisian;
- b) pertumbuhan angkatan kerja baru dari tahun ke tahun mengalami tren peningkatan yang tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai di tingkat lokal, sehingga memicu terjadinya penumpukan angka pengangguran. Sisa dampak kerentanan ekonomi pasca-pandemi berisiko memperlebar kantong kemiskinan makro (mencapai 12,65% dari populasi), yang apabila tidak diintervensi oleh kebijakan jaminan sosial yang tepat sasaran, dapat bertransformasi menjadi Faktor Korelatif Kriminal (FKK) pemicu naiknya angka tindak kejahatan konvensional (3CR);
- c) keberadaan komposisi penduduk yang sangat heterogen dan multikultural, ditandai dengan interaksi erat antara komunitas Suku Sasak (mayoritas Muslim) dan Suku Bali (beragama Hindu) di beberapa kantong wilayah (seperti Kecamatan Lingsar, Narmada,

dan Gunungsari). Keragaman etnis, adat istiadat, dan agama ini merupakan modal sosial kebudayaan daerah, namun di sisi lain menyimpan potensi kerawanan sosiologis berupa sensitivitas isu SARA, gesekan tempat ibadah, atau polarisasi massa yang mudah tersulut oleh penyebaran hoaks di media sosial;

3) Sumber Daya Alam.

- a) kekayaan sumber daya alam maritim di sepanjang garis pantai barat dan selatan Kabupaten Lombok Barat merupakan ujung tombak perekonomian masyarakat melalui sektor perikanan tangkap, budidaya lobster/mutiara, serta investasi pariwisata bahari global. Namun, pemanfaatan wilayah pesisir ini memunculkan potensi gangguan kamtibmas berupa praktik penangkapan ikan ilegal merusak ekosistem (*destructive fishing* menggunakan bom/potasium), sengketa pemanfaatan ruang laut antara nelayan tradisional dengan korporasi, serta kerawanan jalur laut sebagai pintu masuk penyelundupan barang terlarang dan narkoba;
- b) potensi kekayaan mineral bumi berupa pertambangan emas skala besar di wilayah bagian selatan (Kecamatan Sekotong) bertindak sebagai salah satu penggerak ekonomi, namun pemanfaatannya didominasi oleh aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang menggunakan zat kimia berbahaya (merkuri/sianida). Eksploitasi ilegal ini menciptakan kerawanan tingkat tinggi, meliputi kerusakan ekologi siber, ancaman tanah longsor di areal galian, peredaran uang segar yang memicu penyakit masyarakat (miras, judi, prostitusi), serta potensi konflik horizontal berupa perebutan batas wilayah lubang tambang antar-kelompok warga.

4) Ideologi.

- a) komitmen masyarakat di wilayah hukum Polres Lombok Barat secara umum tetap teguh mempertahankan Pancasila sebagai

satu-satunya Ideologi Nasional yang diperkuat melalui forum silaturahmi antarumat beragama (FKUB). Kendati demikian, seiring kebebasan berdemokrasi dan pemanfaatan ruang siber, masih terdapat upaya laten dari kelompok masyarakat tertentu untuk menginfiltrasi, menghidupkan kembali, atau menyebarkan paham ideologi alternatif terselubung (seperti paham khilafah radikal, paham liberal, atau paham kiri) yang bertentangan dengan kepribadian bangsa;

- b) perkembangan aktivitas sel-sel jaringan kelompok radikal dan intoleran (seperti eks-HTI, JAT, JAS, dan JAD) di tingkat regional secara umum termonitor bergerak secara pasif di bawah tanah (*underground*). Namun, intensifikasi kegiatan kajian tertutup, konsolidasi jaringan, dan penggalangan dana yang terdeteksi di wilayah luar (seperti Pulau Sumbawa) diwaspadai dapat merembes ke wilayah hukum Lombok Barat melalui simpul-simpul rumah kontrakan, pondok tertutup, atau wilayah pesisir terpencil yang rawan dijadikan tempat pelarian;
- c) eskalasi konflik geopolitik kemanusiaan di Timur Tengah (perang Israel-Palestina yang melibatkan ketegangan regional dengan Iran) secara konsisten memicu reaksi sensitivitas dan sentimen solidaritas keagamaan yang tinggi di kalangan umat Islam Lombok Barat. Kerawanan yang diantisipasi adalah pemanfaatan isu kemanusiaan ini oleh kelompok radikal untuk memproduksi narasi provokatif, hoaks anti-pemerintah, serta menumbuhkan benih-benih paham radikalisme baru yang mengeksploitasi emosi kemanusiaan masyarakat untuk mendelegitimasi aparat keamanan dan jalannya roda pemerintahan;
- d) adanya riwayat tindakan penegakan hukum oleh Tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri terhadap para terduga jaringan terorisme (seperti jaringan Jemaah Ansharu Syariah / JAS dan

JAD) di tingkat provinsi menegaskan bahwa ancaman terorisme bukan sekadar potensi abstrak. Pergeseran pola rekrutmen dan indoktrinasi yang kini beralih menggunakan media sosial (*cyber recruitment*) menyasar generasi muda menuntut Polres Lombok Barat untuk memperkuat patroli siber, literasi digital, serta kontra-radikalisasi guna membentengi masyarakat dari paparan ideologi ekstrem.

5) Politik.

- a) tahapan awal Pemilu Nasional 2029 yang diprediksi mulai berjalan secara administratif pada tahun 2027 berdasarkan regulasi dan Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 (skema pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal) menjadi stimulan peningkatan suhu politik di tingkat daerah. Potensi gangguan yang diwaspadai adalah mulainya manuver politik, konsolidasi internal partai, dan verifikasi faktual parpol yang rentan memicu gesekan kepentingan politik praktis di tingkat akar rumput, sehingga menuntut kesiapan Polres Lombok Barat dalam melakukan pemetaan kerawanan dini secara berkala;
- b) pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di sejumlah desa di wilayah Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2027 menyimpan potensi kerawanan politik lokal tingkat tinggi. Karakteristik Pilkades yang bersentuhan langsung dengan hubungan kekerabatan dan bertetangga di tingkat desa berpotensi memicu polarisasi massa yang tajam, intimidasi terhadap panitia pemilihan, kampanye hitam (*black campaign*), hingga sengketa hasil pemungutan suara yang jika tidak dimitigasi dapat dengan mudah bertransformasi menjadi benturan fisik atau konflik horizontal antar-pendukung calon kepala desa;
- c) penanganan kasus hukum atau dugaan tindak pidana korupsi/gratifikasi di lingkungan legislatif maupun eksekutif tingkat

regional yang disidik oleh aparat penegak hukum (Kejati NTB) rentan ditarik ke ranah politik oleh kelompok berkepentingan guna mendelegitimasi jalannya roda pemerintahan. Kerawanan kamtibmas yang timbul adalah mobilisasi massa, gerakan protes, atau aksi unjuk rasa (Unras) berjilid-jilid oleh elemen mahasiswa, OKP, dan LSM yang menuntut transparansi, yang apabila disusupi pihak ketiga dapat memicu tindakan anarkis atau pengrusakan objek vital:

- 6) ekonomi.
 - a) tantangan akselerasi pengentasan kemiskinan makro di Kabupaten Lombok Barat guna mengejar target nihil kemiskinan ekstrem pada tahun 2027 (dari baseline data 12,65% atau sekitar 96.570 jiwa) memicu kerentanan sosial ekonomi yang tinggi. Ketimpangan pendapatan dan lambatnya perluasan lapangan kerja baru di tengah pertumbuhan angkatan kerja dapat bertindak sebagai Faktor Korelatif Kriminal (FKK) utama yang memicu naiknya angka kejahatan jalanan konvensional (3CR) akibat desakan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga;
 - b) tekanan inflasi pada komoditas pangan dan Bahan Pokok Penting (Bapokting), serta isu berulang terkait kelangkaan dan fluktuasi harga pupuk bersubsidi pada musim tanam di sentra pertanian Lombok Barat (seperti Narmada dan Lingsar) menjadi ancaman rutin terhadap daya beli masyarakat. Keterbatasan kuota pupuk subsidi dan kendala rantai distribusi rentan memicu protes kelompok tani, spekulasi harga oleh oknum pengecer, hingga praktik penimbunan (*hoarding*) yang dapat memicu gejolak sosial serta mengganggu stabilitas kamtibmas pedesaan;
 - c) risiko kerentanan investasi pada sektor pariwisata unggulan Senggigi dan Sekotong akibat ketergantungan berlebihan pada satu sektor (*single sector dependency*) tanpa diversifikasi yang

kuat. Adanya guncangan ekonomi global atau isu stabilitas keamanan dapat secara instan melumpuhkan industri perhotelan dan ekonomi kreatif lokal, yang berdampak langsung pada gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal dan peningkatan angka pengangguran terbuka (TPT) di wilayah hukum Polres Lombok Barat;

7) Sosial Budaya.

- a) karakteristik masyarakat Kabupaten Lombok Barat yang majemuk dan multikultural, ditandai dengan interaksi erat suku Sasak Muslim dan suku Bali Hindu di wilayah Kecamatan Lingsar, Narmada, dan Gunungsari, menuntut pemeliharaan toleransi yang konsisten. Potensi gangguan sosial budaya bersumber dari maraknya peredaran minuman keras (miras) tradisional, perjudian daring, dan penyakit masyarakat lainnya yang sering kali menjadi pemicu utama terjadinya perkelahian kelompok pemuda, aksi tawuran, maupun konflik horizontal antar-kampung;
- b) arus modernisasi dan infiltrasi budaya asing sebagai konsekuensi dinamis dari perkembangan industri pariwisata internasional di kawasan pesisir Senggigi dan Sekotong berpotensi menggerus nilai-nilai moral keagamaan dan adat istiadat ketimuran masyarakat lokal. Ekses negatif berupa peredaran gelap narkoba di tempat hiburan malam, prostitusi terselubung, serta kenakalan remaja/balap liar menjadi tantangan sosiologis yang memerlukan intervensi pembinaan kamtibmas secara berkesinambungan melalui fungsi Satbinmas dan Bhabinkamtibmas;
- c) dinamika pergerakan kelompok LSM, Ormas, dan aliansi buruh/pekerja dalam menyikapi isu sengketa pertanahan di Sekotong (Dusun Pansing, Desa Buwun Mas) serta pro-kontra rencana formalisasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) emas ilegal. Ego sektoral, provokasi hoaks di media sosial, atau

hambatan implementasi kebijakan sertifikasi pertanahan di lapangan rentan dimanfaatkan untuk menggalang sentimen massa guna melakukan aksi unjuk rasa anarkis atau pemblokiran jalur lalu lintas strategis pelabuhan logistik.;

8) keamanan.

- a) tren kejahatan konvensional 3CR (Curat, Curas, dan Curanmor) diprediksi tetap menjadi ancaman dominan yang meresahkan masyarakat di wilayah hukum Pulau Lombok termasuk Kabupaten Lombok Barat. Mobilitas pelaku yang bergerak secara lintas kabupaten/kota memanfaatkan kelengahan sistem pengamanan swakarsa di kawasan pemukiman padat dan area parkir terbuka, sehingga menuntut Polres Lombok Barat untuk terus mengintensifkan patroli rutin malam hari (*blue light patrol*) serta pembentukan Kring Serse di titik-titik rawan;
- b) risiko kecelakaan lalu lintas (laka lantas) dan pelanggaran lalu lintas di jalur logistik utama (jalur bypass, Lembar, dan Gerung) serta jalur pariwisata Senggigi masih menunjukkan angka fatalitas yang perlu ditekan. Berdasarkan data taktis, pelanggaran terhadap marka/rambu jalan dan kelengkapan kendaraan oleh pengguna jalan roda 2 menjadi faktor korelatif utama terjadinya laka lantas, sehingga memerlukan rekayasa lalu lintas yang ketat serta optimalisasi penegakan hukum lalu lintas yang edukatif melalui tilang elektronik (ETLE);
- c) ancaman kejahatan siber (*cyber crime*) dalam bentuk penipuan daring (*online scam*), judi online, pinjaman online ilegal, serta penyebaran berita bohong (*hoaks*) dan ujaran kebencian (*hate speech*) di ruang digital yang menyasar masyarakat pedesaan. Di samping itu, pengawasan terhadap kejahatan transnasional seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal pada

kantong-kantong desa produktif, serta aktivitas tambang emas ilegal (PETI) di Sekotong yang menggunakan bahan kimia berbahaya (merkuri/sianida), tetap menjadi fokus perhatian intelijen dan penegakan hukum terpadu guna menjamin stabilitas keamanan dalam negeri yang kondusif.

b. Ambang Gangguan (PH).

1) geografi.

- a) keberadaan gugusan pulau-pulau kecil atau gili yang tidak berpenghuni di wilayah perairan laut bagian selatan (khususnya di kawasan Kecamatan Sekotong yang memiliki sekitar 90 gili) sangat potensial dimanfaatkan secara ilegal sebagai tempat persinggahan nelayan luar daerah, orang asing, maupun basis penyelundupan barang terlarang (narkoba dan senpi). Hal ini diperkeruh oleh belum terbentuknya pos-pos pengamanan statis Satpolairud secara merata, sehingga menciptakan celah pengawasan keamanan laut (*coastal security*) yang rawan dimanfaatkan pelaku kejahatan;.
- b) jalur pendakian dan destinasi wisata alam perbukitan serta kawasan lereng pegunungan hutan lindung yang terhubung dengan akses penyangga Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) di wilayah utara (seperti Kecamatan Narmada dan Lingsar) sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Tingginya aktivitas wisata di area bervegetasi lebat ini memicu ambang gangguan berupa kecelakaan pendakian, wisatawan tersesat, kebakaran hutan akibat kelalaian, serta potensi tindak pidana konvensional pencurian di area perkemahan.
- c) kondisi sosial ekonomi masyarakat pedesaan yang hidup pada klaster wilayah pertanian tadah hujan (seperti pedalaman Kecamatan Sekotong dan Lembar) masih minim mendapatkan

intervensi teknologi pertanian modern dari pemerintah. Kondisi kerentanan gagal panen saat anomali cuaca memicu terjadinya lonjakan angka kemiskinan musiman, urbanisasi, serta meningkatkan kerentanan masyarakat pedesaan terhadap lingkaran utang piutang dari koperasi ilegal/pinjol yang memicu stres sosial dan kriminalitas.

- d) banyaknya titik pantai terbuka (*jalur tikus / unprohibited port*) yang membentang luas di sepanjang garis pantai Batulayar, Lembar, hingga Sekotong sering dimanfaatkan oleh kapal-kapal nelayan lokal maupun kapal cepat (*speed boat*) asing untuk keluar masuk tanpa melalui mekanisme pemeriksaan manifes resmi pelabuhan. Hal ini menjadi ambang gangguan berupa potensi masuknya imigran gelap, komoditas selundupan, pakaian bekas ilegal, serta peredaran gelap narkoba jaringan internasional.
- e) posisi geografis perairan laut Kabupaten Lombok Barat yang menghalangi jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia di sisi selatan, menjadikannya jalur transit internasional yang sangat padat bagi kapal-kapal kargo dan tanker asing. Melimpahnya kekayaan hasil laut di zona tersebut memicu ambang gangguan berupa maraknya pencurian ikan (*illegal fishing*) oleh nelayan luar, serta penggunaan bahan peledak/kimia berbahaya (*destructive fishing*) oleh oknum tertentu yang merusak terumbu karang di sekitar gili pariwisata.
- f) meningkatnya eskalasi penolakan dan kritik tajam dari kalangan aktivis lingkungan, organisasi pemuda, dan LSM terhadap masifnya alih fungsi lahan pertanian subur (LP2B) untuk pembangunan kawasan perumahan swasta dan pembangunan fisik komersial di Kecamatan Labuapi, Kediri, dan Gunungsari. Hilangnya mata pencaharian kaum petani tradisional ini memicu peningkatan angka pengangguran terbuka yang sewaktu-waktu

dapat termanifestasi dalam bentuk aksi unjuk rasa (Unras) anarkis, sengketa okupasi lahan sepihak, hingga pengrusakan aset properti milik pengembang perumahan

2) demografi.

- a) kepadatan penduduk yang tinggi dan tidak merata, di mana sebagian besar terkonsentrasi di wilayah penyangga perkotaan dan pusat perekonomian (seperti Kecamatan Gunungsari, Labuapi, dan Narmada), menjadi ambang gangguan berupa meningkatnya volume kemacetan lalu lintas, kesemrawutan penataan fasilitas publik, maraknya parkir liar, serta tingginya potensi gesekan sosial antar-warga di pemukiman padat akibat perebutan ruang atau batas pekarangan;
- b) tingginya angka angkatan kerja yang tidak terserap oleh lapangan pekerjaan lokal, diperparah oleh minimnya keahlian (*skill*) yang relevan, menciptakan penumpukan pengangguran terbuka di tingkat desa. Kondisi ini menjadi ambang gangguan berupa maraknya penyakit masyarakat (pekat) seperti perjudian daring maupun konvensional, merebaknya peredaran minuman keras tradisional (tuak/brem), serta kenakalan remaja dalam bentuk aksi balap liar di jalur bypass yang rawan memicu tindak kriminalitas jalanan;
- c) ketimpangan persebaran penduduk antara wilayah utara-tengah yang padat dengan wilayah selatan (Kecamatan Sekotong) yang relatif renggang namun kaya akan sumber daya alam. Kondisi demografis di wilayah selatan ini menjadi ambang gangguan berupa lemahnya pengawasan swakarsa masyarakat terhadap lingkungan sekitar, sehingga memicu kerawanan okupasi lahan negara, pembukaan lubang tambang emas ilegal secara liar, serta maraknya aksi pencurian di rumah-rumah kosong yang ditinggal pemiliknya bekerja ke luar daerah;

- d) heterogenitas masyarakat yang tinggi dari segi etnis, suku, dan agama—terutama pada kawasan pemukiman yang mempertemukan komunitas Suku Sasak Muslim dan Suku Bali Hindu secara berdampingan (seperti di Kecamatan Lingsar, Narmada, dan Gunungsari). Keberagaman ini menjadi ambang gangguan berupa sensitivitas sosial yang tinggi terhadap isu komunal, kerentanan terjadinya perselisihan akibat kesalahpahaman adat/budaya (seperti tata cara pelaksanaan ritual keagamaan), serta kemudahan massa untuk dimobilisasi atau diprovokasi oleh narasi intoleran dan ujaran kebencian (*hate speech*) yang disebar di media sosial;
- 3) Sumber Daya Alam.
 - a) tingginya aktivitas pemanfaatan area pesisir laut, kawasan pantai, dan gugusan gili di sepanjang wilayah Batulayar, Lembar, hingga Sekotong sebagai basis utama industri pariwisata bahari dan perikanan tangkap/budidaya. Hal ini menjadi ambang gangguan berupa maraknya pelanggaran batas zonasi tangkap nelayan tradisional, sengketa klaim ruang laut antara nelayan dengan pemilik resort, serta maraknya pengrusakan ekosistem terumbu karang akibat penggunaan bahan kimia/bom ikan (*destructive fishing*) oleh oknum yang tidak bertanggung jawab;
 - b) pemanfaatan Objek Vital Nasional (Obvitnas) pelabuhan laut utama, yaitu Pelabuhan Lembar dan Pelabuhan Gili Mas, sebagai gerbang utama distribusi logistik antarpulau dan sandar kapal pesiar internasional. Kawasan ini menjadi ambang gangguan berupa potensi antrean panjang kendaraan kargo yang memicu kemacetan parah di jalur utama, maraknya praktik pungutan liar (pungli), aksi premanisme berkedok calo tiket, serta kerawanan pemanfaatan terminal logistik sebagai jalur masuknya komoditas ilegal, satwa dilindungi, dan jaringan peredaran gelap narkoba.

- c) masifnya aktivitas eksplorasi lahan pada sektor pertambangan emas skala besar dan galian C di wilayah pegunungan serta perbukitan Kecamatan Sekotong dan Lembar. Hal ini memicu ambang gangguan nyata di lapangan berupa operasional lubang-lubang Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang mengabaikan keselamatan kerja (rawan longsor/runtuh), maraknya peredaran zat kimia berbahaya (merkuri dan sianida) di pemukiman warga, pembuangan limbah sisa pengolahan emas (*tailing*) yang mencemari aliran air dan tanah, serta potensi sengketa batas klaim lubang tambang produktif antar-kelompok pekerja yang rentan memicu aksi pembakaran fasilitas atau benturan fisik.
- 4) ideologi.
 - a) pemanfaatan platform media sosial secara masif oleh kelompok radikal sebagai sarana propaganda, indoktrinasi, dan rekrutmen daring (*cyber recruitment*). Kondisi ini menjadi ambang gangguan berupa membanjirnya narasi polusi informasi, konten bermuatan ekstremisme, serta hoaks keagamaan yang dirancang untuk membenturkan nilai kearifan lokal dengan hukum negara, yang jika tidak di-konter dapat mencederai ketahanan ideologi Pancasila di tingkat akar rumput:
 - b) keberadaan sel-sel tidur, simpatisan, dan eks-anggota dari organisasi kemasyarakatan yang telah resmi dibubarkan oleh pemerintah (seperti eks-HTI, JAD, JAS) yang masih menetap dan membaur di tengah masyarakat pedesaan. Hal ini menjadi ambang gangguan berupa aktivitas pengajian tertutup (*halaqah*), penggalangan dana berkedok sumbangan kemanusiaan, serta penyusupan doktrin radikal intoleran secara personal yang menyasar kelompok pemuda rentan di beberapa kantong pemukiman.

- c) munculnya momentum aksi solidaritas, unjuk rasa, atau penggalangan dana amal massal yang merespons eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah (seperti krisis Palestina-Israel). Kegiatan ini menjadi ambang gangguan berupa potensi penumpangan isu kemanusiaan oleh oknum radikal guna menyebarkan narasi anti-pemerintah, memicu sentimen kebencian terhadap kelompok minoritas tertentu, serta menggalang polarisasi massa yang dapat mengganggu ketertiban umum di fasilitas publik;
- 5) ekonomi.
- a) proses penyaluran program jaminan perlindungan sosial, bantuan kemandirian modal UMKM, dan operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam rangka mengejar target nihil kemiskinan ekstrem di 10 kecamatan. Rangkaian kegiatan ini menjadi ambang gangguan berupa potensi terjadinya data ganda penerima manfaat, aksi pungutan liar (pungli) oleh oknum aparat desa, kecemburuan sosial antar-kelompok warga, serta kerentanan terjadinya penyelewengan distribusi logistik yang dapat memicu protes massal atau gejolak sosial di tingkat bawah;
 - b) tata niaga penyiapan, penyimpanan, dan pendistribusian komoditas Bahan Pokok Penting (Bapokting) serta pupuk bersubsidi pada musim tanam di kawasan lumbung pangan (Kecamatan Narmada dan Lingsar). Kondisi ini menjadi ambang gangguan berupa kerentanan terjadinya kelangkaan barang di tingkat pengecer akibat keterbatasan kuota, fluktuasi lonjakan harga sepihak di pasar tradisional yang menggerus daya beli, praktik pengoplosan atau peredaran pupuk palsu, serta potensi spekulasi atau penimbunan (*hoarding*) oleh oknum distributor nakal;

- c) aktivitas operasional kawasan destinasi wisata internasional Senggigi dan Sekotong yang rentan mengalami fluktuasi akibat pengaruh kondisi ekonomi global maupun isu stabilitas keamanan nasional. Kerentanan ini menjadi ambang gangguan berupa potensi terjadinya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak pada industri perhotelan, penutupan usaha retail penopang pariwisata, serta peningkatan angka pengangguran terbuka (TPT) yang dapat berimplikasi langsung pada naiknya angka kriminalitas konvensional akibat desakan ekonomi keluarga;
- 6) sosial budaya.
 - a) tata laksana penyelenggaraan event hiburan kontemporer, konser musik berskala besar (seperti Senggigi Sunset Jazz di Pantai Kerandangan), serta tempat hiburan malam di sepanjang kawasan pesisir pariwisata Senggigi. Aktivitas sosial ini menjadi ambang gangguan berupa maraknya peredaran dan penjualan minuman keras (miras) ilegal/oplosan, potensi penyalahgunaan narkoba di kalangan pengunjung, aksi perjudian terselubung, kemacetan parah di jalur wisata, serta kerawanan terjadinya gesekan fisik atau perkelahian antar-kelompok pemuda akibat pengaruh alkohol;;
 - b) interaksi sosial masyarakat pada kantong-kantong pemukiman heterogen yang mempertemukan komunitas Suku Sasak Muslim dan Suku Bali Hindu secara berdampingan (khususnya di Kecamatan Lingsar, Narmada, dan Gunungsari). Kondisi sosiologis ini menjadi ambang gangguan berupa sensitivitas komunal terhadap penggunaan fasilitas ibadah, potensi perselisihan akibat kesalahpahaman adat/budaya dalam tata cara pelaksanaan ritual keagamaan, serta kerentanan merebaknya kenakalan remaja berupa aksi balap liar dan tawuran pemuda yang mudah diprovokasi menjadi konflik berbau SARA;

- c) pelaksanaan Tradisi Budaya lokal tahunan yang melibatkan pengerahan massa dalam jumlah sangat besar (seperti Lebaran Topat di Pantai Duduk dan Tradisi Perang Topat di Pura Lingsar). Rangkaian kegiatan adat ini menjadi ambang gangguan berupa kemacetan lalu lintas total pada jalur pariwisata, maraknya aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan pencopetan di kerumunan massa, pemerasan berkedok parkir liar, serta potensi gesekan fisik antarkelompok warga pendatang yang dapat merusak sakralitas nilai kerukunan umat beragama;
 - d) dinamika penyikapan kelompok masyarakat, LSM, dan aktivis agraria terhadap proses penataan sertifikasi lahan di wilayah selatan (Dusun Pansing, Desa Buwun Mas) serta pro-kontra rencana formalisasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) emas ilegal di Sekotong. Hal ini menjadi ambang gangguan nyata berupa munculnya provokasi kampanye hitam di media sosial, aksi pendudukan/okupasi lahan sepihak di areal konsesi tambang, sengketa batas lubang galian tambang produktif, hingga pergerakan massa untuk melakukan aksi unjuk rasa anarkis atau pemblokiran jalur logistik pelabuhan utama.;
- 7) keamanan.
- a) adanya celah kelengahan pada sistem pengamanan swakarsa (Siskamling) di kawasan perumahan padat penduduk, area parkir terbuka pusat perbelanjaan, dan lingkaran destinasi wisata pariwisata. Kondisi ini menjadi ambang gangguan berupa maraknya aksi kejahatan konvensional 3CR (Curat, Curas, dan Curanmor) yang digerakkan oleh jaringan pelaku lintas kabupaten/kota dengan memanfaatkan kelengahan korban dan ketiadaan fasilitas kamera pengawas (CCTV) di titik-titik rawan;
 - b) kurangnya kepatuhan pengguna jalan roda 2 terhadap marka/rambu jalan, penggunaan helm standar (SNI), serta

maraknya penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis (*knalpot brong*) di sepanjang jalur logistik utama dan jalur pariwisata. Berdasarkan data taktis, ketidakdisiplinan ini menjadi ambang gangguan berupa terjadinya peningkatan angka kecelakaan lalu lintas (*laka lantas*) dengan fatalitas tinggi pada poros jalan utama Lembar, Gerung, bypass, dan Senggigi; faktor ekonomi tetap menjadi pemicu utama kejahatan konvensional seperti pencurian dengan pemberatan (*Curat*) dan pencurian kendaraan bermotor (*Curanmor*). Kesenjangan antara gaya hidup modern akibat pariwisata dan kemampuan ekonomi lokal sering kali mendorong individu melakukan tindak kriminal untuk bertahan hidup atau mencapai standar sosial tertentu;

- c) aktivitas tempat hiburan malam, penginapan, dan kafe terselubung di kawasan pesisir Batulayar, Senggigi, hingga Sekotong yang melanggar batas jam operasional. Kondisi ini menjadi ambang gangguan berupa potensi peredaran dan penyalahgunaan narkoba/psikotropika, peredaran minuman keras ilegal/oplosan, serta praktik prostitusi terselubung yang dapat memicu eskalasi kriminalitas konvensional berupa penganiayaan berat;
- d) tingginya angka keberadaan lubang-lubang galian Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan perbukitan Kecamatan Sekotong yang beroperasi secara sembunyi-sembunyi tanpa mengindahkan standar keselamatan kerja (K3). Hal ini menjadi ambang gangguan berupa kerentanan terjadinya kecelakaan tambang (lubang galian runtuh/tertimbun tanah longsor), maraknya penyelundupan dan penyalahgunaan bahan kimia berbahaya (merkuri/sianida) di pemukiman, serta potensi konflik fisik perebutan batas lubang emas produktif;;

- e) meningkatnya penetrasi penggunaan internet dan gawai di kalangan masyarakat pedesaan yang tidak diimbangi dengan literasi digital yang memadai. Kondisi ini menjadi ambang gangguan di ruang siber berupa maraknya kasus penipuan daring (*online scam*), judi online, jeratan pinjaman online ilegal, serta kemudahan penyebaran berita bohong (*hoaks*) dan ujaran kebencian (*hate speech*) yang dirancang oknum tertentu untuk memicu polarisasi warga menjelang tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di Lombok Barat.
- c. Gangguan Nyata (AF).
 - 1) Geografi.
 - a) terjadinya upaya penguasaan fisik, okupasi lahan sepihak, atau pemanfaatan ilegal terhadap gugusan pulau-pulau kecil (gili) terpencil dan tidak berpenghuni di perairan laut bagian selatan (Kecamatan Sekotong) oleh korporasi swasta, warga asing, maupun kelompok masyarakat tertentu tanpa izin resmi pemerintah. Hal ini mencakup kerawanan pada pulau kecil terluar seperti Gili Sepatang (Pulau Sophialouisa) yang belum sepenuhnya terjaga secara statis, sehingga menjadi ancaman nyata terhadap kedaulatan wilayah, perusakan ekosistem pesisir, serta memicu konflik hukum agraria yang kompleks;
 - b) munculnya manifestasi bencana alam berskala masif akibat aktivitas kegempaan tektonik sesar aktif maupun dampak sekunder dari aktivitas gunung berapi aktif di tingkat regional (seperti Gunung Rinjani), yang dapat terjadi sewaktu-waktu tanpa bisa diprediksi. Gangguan nyata di lapangan berupa gempa bumi merusak, tanah longsor yang memutus total akses jalan poros utama, serta semburan abu vulkanik yang melumpuhkan operasional transportasi dan sektor pariwisata di wilayah hukum Polres Lombok Barat;

- c) terjadinya aksi unjuk rasa (Unras) anarkis, blokade jalan logistik, atau konflik sosial yang digerakkan oleh kelompok masyarakat di wilayah kering/tadah hujan (seperti pedalaman Sekotong dan Lembar) sebagai bentuk protes atas minimnya bantuan sarana air bersih dan stimulus agraria dari pemerintah saat musim kemarau ekstrem. Desakan kebutuhan hidup sehari-hari akibat gagal panen secara nyata mendorong sebagian warga beralih profesi menjadi pelaku tindak pidana konvensional pencurian hutan kemasyarakatan atau pelaku kriminalitas jalanan;
- d) pemanfaatan wilayah pesisir pantai terbuka dan pelabuhan rakyat di Lombok Barat sebagai tempat persembunyian serta pintu masuk (*entry point*) logistik ilegal internasional dan domestik. Gangguan nyata yang dihadapi meliputi penyelundupan narkoba jaringan lintas negara, peredaran pakaian bekas impor ilegal (*ballpress*) yang merusak pasar UMKM, serta pemanfaatan rumah kontrakan terpencil di wilayah penopang pariwisata sebagai tempat pelarian para buronan tindak pidana, jaringan pelaku siber, maupun DPO terorisme;
- e) wilayah perairan laut Selat Lombok dan pesisir selatan Kabupaten Lombok Barat dijadikan sebagai jalur transit utama penyelundupan imigran gelap (*people smuggling*) asal negara-negara konflik (seperti Irak dan Afghanistan) yang hendak menuju Australia dengan memanfaatkan kapal-kapal nelayan lokal. Kondisi ini menuntut penegakan hukum laut yang agresif oleh Satpolairud guna menggagalkan operasi jaringan penyelundup manusia internasional yang melintasi wilayah hukum Polres Lombok Barat;
- f) terjadinya lonjakan angka pengangguran terbuka secara masif akibat hilangnya ruang kelola agraris akibat alih fungsi lahan pertanian produktif (LP2B) menjadi kawasan perumahan

komersial di Kecamatan Labuapi, Kediri, dan Gunungsari. Kondisi ini memicu gangguan nyata berupa konflik vertikal antara masyarakat pemilik lahan dengan pihak pemerintah daerah maupun korporasi pengembang, yang termanifestasi dalam bentuk aksi pendudukan lahan proyek, gugatan hukum berujung penyegelan, hingga benturan fisik di lapangan akibat ketidakpuasan atas nilai ganti rugi pertanahan.

2) Demografi.

- a) terjadinya gesekan sosial berujung perkelahian massal, tawuran pemuda, atau konflik horizontal antar-kampung di area permukiman padat penduduk yang tidak tertata (seperti di beberapa titik penyangga perbatasan Kota Mataram di Kecamatan Gunungsari dan Labuapi). Gangguan nyata ini dipicu oleh akumulasi friksi sosial harian, sengketa hak pemanfaatan fasilitas lingkungan, serta diperparah oleh pengaruh minuman keras tradisional, yang secara instan melumpuhkan ketertiban umum dan merusak fasilitas publik di tingkat desa;
- b) terwujudnya peningkatan angka kriminalitas konvensional jalanan (khususnya tren pencurian kendaraan bermotor/curanmor dan pencurian dengan pemberatan/curat) secara kuantitas akibat tingginya angka pengangguran terbuka yang tidak terserap oleh lapangan kerja. Kaum muda usia produktif yang kehilangan mata pencaharian secara nyata bertransformasi menjadi residivis baru atau bergabung dalam jaringan kejahatan lintas kabupaten/kota demi memenuhi kebutuhan ekonomi secara instan;
- c) terjadinya aksi demonstrasi anarkis, mogok kerja massal, atau pendudukan fasilitas perusahaan oleh aliansi pekerja lokal atau organisasi kepemudaan akibat adanya ketimpangan serapan tenaga kerja setempat pada proyek pembangunan hotel/resort modern di kawasan Senggigi dan Sekotong. Ketidakmampuan

menyerap arus urbanisasi tenaga kerja lokal ini menciptakan polarisasi sosiologis dan resistensi sosial nyata yang mengganggu stabilitas iklim investasi daerah;

- d) konflik yang berlatar belakang perbedaan dan dapat berkembang menjadi konflik SARA.

3) Sumber Daya Alam.

- a) Benturan fisik/sabotase antara nelayan tradisional dan pengelola *resort* di sepanjang pesisir Batulayar–Sekotong, serta maraknya penangkapan ikan dengan bahan peledak yang merusak ekosistem bahari dan menurunkan pendapatan masyarakat pesisir;
- b) Aksi pemblokiran gerbang Pelabuhan Lembar dan Pelabuhan Gili Mas, premanisme, serta pungli oleh kelompok penolak kebijakan tata niaga pelayaran yang berpotensi melumpuhkan rantai pasok logistik dan Bapokting di wilayah NTB;
- c) Anomali bencana (longsor dan pencemaran bahan kimia bahaya), jatuhnya korban jiwa di lubang tambang ilegal, serta eskalasi konflik horizontal berdarah antar-penambang terkait perebutan klaim lokasi tambang emas di Kecamatan Sekotong.

4) ideologi.

- a) terjadi pemaksaan kehendak oleh kelompok yang menginginkan dan memperjuangkan ideologi lain untuk menggantikan Pancasila sebagai ideologi negara RI melalui jalur formal maupun informal;
- b) adanya tuntutan Masyarakat mayoritas/kelompok-kelompok Ormas kepada pemerintah untuk bersikap keras mendukung kemerdekaan Palestina dan perlawanan terhadap Israel sebagai bentuk dukungan terhadap rakyat Islam di Palestina;
- c) pemanfaatan oleh kelompok Ormas Islam Radikal yang menjadi lawan politik pemerintah untuk cipta opini negatif, memprovokasi masyarakat untuk membangun ketidakpercayaan kepada

pemerintah yang memunculkan kelompok-kelompok radikal dengan wacana-wacana jihad melawan pemerintah yang tidak memihak kepada mayoritas;

- d) terjadinya aksi unjuk rasa anarkis atau pengrusakan fasilitas publik yang ditunggangi oleh kelompok radikal dengan mengeksploitasi isu kemanusiaan global (seperti eskalasi konflik Timur Tengah/Palestina) guna mendelegitimasi aparat keamanan dan menciptakan instabilitas keamanan dalam negeri.

5) politik.

- a) benturan fisik massal, aksi saling serang antar-kelompok, perusakan Kantor Desa, pembakaran kotak suara, serta aksi penyanderaan/intimidasi terhadap panitia pemilihan akibat adanya penolakan anarkis dari massa pendukung paslon yang tidak puas terhadap hasil rekapitulasi suara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di Lombok Barat;
- b) terjadinya aksi unjuk rasa (Unras) anarkis berskala besar oleh aliansi mahasiswa, OKP, dan LSM di depan Kantor DPRD atau instansi pemerintahan Kabupaten Lombok Barat yang berujung pada tindakan pelemparan, pembakaran fasilitas, serta pemblokiran total jalur jalan bypass logistik utama nasional;
- c) munculnya gugatan politik, boikot administratif, atau sengketa pendaftaran parpol yang dibarengi pengerahan massa secara intimidatif ke kantor penyelenggara pemilu (KPU/Bawaslu daerah) pada tahapan awal Pemilu Serentak 2029, yang dipicu oleh tingginya polarisasi dan sebaran kampanye hitam (black campaign) di ruang digital. Ekonomi.

6) ekonomi.

- a) kelangkaan dan kenaikan kebutuhan pokok masyarakat pada musim-musim tertentu dimanfaatkan oleh para spekulan/pelaku ekonomi yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi yang

sebesar-besarnya seperti penimbunan dan mempermainkan harga di pasaran. Terhadap terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga kebutuhan pokok Masyarakat memunculkan: berkurangnya daya beli masyarakat, berdampak terhadap menurunnya aktifitas perekonomian dan munculnya aksi-aksi protes terhadap pemerintah;

- b) terjadinya aksi penjarahan gudang logistik, demonstrasi massa berujung anarkis di kantor desa, atau pengrusakan fasilitas distribusi akibat terjadinya penyelewengan, korupsi, atau ketidaktepatan sasaran yang masif dalam penyaluran bantuan sosial serta program Makan Bergizi Gratis (MBG);
- c) terjadinya kelangkaan akut Bahan Pokok Penting (Bapokting) dan pupuk bersubsidi di tingkat petani yang memicu lonjakan harga ekstrem di pasar tradisional akibat adanya praktik penimbunan (hoarding) terorganisir oleh spekulan, yang memicu gejala aksi protes serta kerawanan penjarahan toko/gudang distributor;
- d) emutuan hubungan kerja (PHK) massal yang tidak sesuai regulasi pada industri perhotelan di kawasan pariwisata Senggigi atau Sekotong akibat hantaman resesi global, yang secara nyata memicu gelombang aksi mogok kerja, pendudukan paksa aset resort, serta peningkatan drastis angka kejahatan jalanan.

7) sosial budaya.

- a) keragaman suku dan agama mempunyai potensi dapat menyebabkan:
 - (1) menjadi pemicu terjadinya pertentangan yang menjurus terjadinya bentrok antar kelompok/agama;
 - (2) pembangunan tempat ibadah yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku berpotensi menimbulkan ketersinggungan dan penolakan dari pemeluk agama lain;

- (3) seringkali persoalan pribadi diantara orang-orang yang berlainan agama/etnis berkembang menjadi konflik antar agama/etnis;
 - (4) pemahaman sempit terhadap agama yang dianut dan fanatisme yang berlebihan dalam menerapkan ajaran agama mudah memicu gesekan antar pemeluk agama yang mengarah pada kasus SARA.
- b) tindakan anarkis perusakan properti atau fasilitas publik akibat ketidakpuasan massa;
 - c) kerawanan meningkatnya kasus-kasus Ujaran kebencian (*Hate Speech*) khususnya melalui Medsos yang dapat meluas kepada terjadinya konflik, aksi-aksi pengerahan massa, terjadinya tindakan anarkhis serta gangguan Kamtibmas lainnya sangat tinggi;
 - d) provokasi yang dapat mengakibatkan aksi penyerangan terhadap jemaah aliran agama/kepercayaan yang dinilai bertentangan dengan ajaran agama secara umum/sesat, menimbulkan pertentangan dan gesekan dengan masyarakat yang mengarah pada tindakan pengrusakan terhadap rumah, fasilitas pendidikan dan tempat ibadah milik warga Salafiah/ Wahabiah;
 - e) elemen masyarakat memanfaatkan hari-hari besar untuk melakukan kritik dan tuntutan kepada pemerintah yang diekspresikan dalam bentuk aksi unjuk rasa mendatangi pejabat-pejabat terkait;
 - f) terjadinya bencana alam yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :
 - (1) bencana alam Banjir Bandang dan Tanah Longsor, yang diakibatkan oleh : kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam pengelolaan dan membuang sampah, penutupan saluran drainase akibat pembangunan

perumahan dan pertokoan/Ruko menyebabkan fungsi saluran drainase tidak berfungsi secara baik, beralih fungsinyasebagian lahan, dari lahan produktif menjadi lahan sebagai lokasi tempat tinggal, hotel, bungalow dan penghubung jalan, pembukaan lokasi tambang secara *illegal*, *illegal logging* yang tidak terkendali;

8) keamanan.

- a) hubungan antar desa atau kelompok etnis/agama yang bertikai/berkonflik dapat rusak dalam jangka panjang, menciptakan sentimen negatif yang sulit dipulihkan;
- b) meningkatnya perkelahian/konflik antar kelompok pemuda yang meluas melibatkan konflik antar warga/kampung akibat pengaruh Narkotika dan Miras;
- c) masih tingginya tindak kejahatan konvensional mengakibatkan munculnya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Polri yang mendorong terjadinya aksi unjuk rasa, apriori terhadap Polri sampai dengan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri;
- d) aktivitas tambang ilegal memicu ketegangan antara masyarakat lokal, penambang, dan terkadang aparat, yang berpuncak pada konflik fisik atau penolakan masyarakat;
- e) teror bom dengan sasaran tempat-tempat keramaian umum, tempat pariwisata yang dikunjungi WNA, pusat perdagangan oleh kelompok Islam garis keras sebagai bentuk pembalasan serta dengan sasaran para pejabat negara dan pemerintah maupun Kepolisian;
- f) akibat bencana alam menyebabkan dampak signifikan pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, termasuk kerugian material, kerusakan infrastruktur, dan gangguan kesehatan masyarakat;

- g) terjadinya kecelakaan kerja tambang yang fatal berupa runtuhnya lubang galian PETI di Sekotong yang menimbun dan menewaskan puluhan pekerja lokal secara bersamaan, sehingga memicu kepanikan massal serta tuntutan hukum pidana dari keluarga korban;
- h) berdasarkan kecenderungan potensi gangguan dan ambang gangguan serta mencermati gangguan keamanan, gangguan umum, gangguan nyata yang akan terjadi kemungkinan mengalami peningkatan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Berdasarkan hal tersebut, maka gangguan nyata yang mungkin terjadi pada tahun 2026;
- i) kejahatan Konvensional.

Manifestasi kejahatan konvensional seperti aksi premanisme terorganisir di pelabuhan, perjudian (konvensional maupun judi online di pedesaan), pelanggaran ketertiban umum, penipuan, penggelapan, penganiayaan, serta konflik sengketa tanah secara nyata berpotensi terjadi secara merata di hampir seluruh wilayah hukum Polres Lombok Barat. Secara spesifik, klaster gangguan nyata kejahatan konvensional yang menjadi karakteristik dan fokus penegakan hukum intensif di wilayah hukum Polres Lombok Barat meliputi:

- (1) Aksi Pencurian dengan Pemberatan (Curat);
- (2) Aksi Pencurian dengan Kekerasan (Curas);
- (3) Aksi Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor);
- (4) Tindak Pidana Pembunuhan;
- (5) Tindak Pidana Pemalsuan (dokumen, mata uang, maupun surat tanah).

Polres Lombok Barat melalui Satreskrim mengoptimalkan penindakan tegas yang terukur, penggelaran patroli berlapis pada jam rawan kriminalitas, serta penguatan sinergi pos kamling di

119 desa guna menekan intensitas kejahatan konvensional tersebut agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat dan iklim pariwisata daerah.

j) Kejahatan Transnasional.

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) secara nyata menjadi ancaman transnasional yang merata di seluruh wilayah, khususnya modus operandi pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal ke luar negeri, mengingat Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu kantong wilayah pengirim PMI terbesar di Pulau Lombok. Sementara itu, untuk jenis kejahatan transnasional spesifik lainnya yang secara taktis dipetakan berpotensi menjadi gangguan nyata di wilayah hukum Polres Lombok Barat meliputi::

- (1) Terorisme: Adanya potensi aktivitas sel-sel tidur jaringan radikal, persembunyian DPO, maupun proses radikalisasi terselubung di tengah masyarakat;
- (2) Penyelundupan Senjata Api (Senpi): Kerawanan pemanfaatan garis pantai terbuka dan pelabuhan laut sebagai jalur masuknya senpi ilegal;
- (3) Imigran Gelap (*People Smuggling*): Pemanfaatan Selat Lombok dan pelabuhan rakyat sebagai jalur transit logistik pengiriman imigran gelap asal negara konflik menuju Australia;
- (4) Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*): Manifestasi kejahatan siber berupa penipuan daring (*online scam*) dan peretasan data yang menyasar masyarakat siber lokal;

k) Kejahatan yang merugikan kekayaan negara.

Tindak pidana korupsi penggelapan anggaran dan kejahatan ekonomi (seperti monopoli dagang atau penyalahgunaan wewenang) berpotensi terjadi di tingkat birokrasi pemerintahan

maupun swasta di Lombok Barat. Sedangkan untuk klaster kejahatan yang merugikan kekayaan negara secara spesifik dan menjadi gangguan nyata di wilayah hukum Polres Lombok Barat meliputi:

- (1) Pembalakan Liar (*Illegal Logging*): Aktivitas perambahan hutan secara ilegal di area hutan lindung perbukitan pegunungan Lombok Barat;
- (2) Penambangan Liar (*Illegal Mining / PETI*): Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin secara masif di wilayah Kecamatan Sekotong yang merusak struktur tanah dan ekologi siber;
- (3) Pencemaran dan Perusakan Lingkungan: Penggunaan zat kimia berbahaya (merkuri dan sianida) pada pengolahan tambang emas serta pembuangan limbah sisa pengolahan (*tailing*) yang merusak ekosistem aliran sungai dan wilayah pesisir gili pariwisata.;

I) Kejahatan yang berimplikasi Kontijensi.

Ancaman kejahatan yang berimplikasi kontijensi seperti gelombang aksi unjuk rasa (Unras) yang bertransformasi menjadi anarkis, kerusuhan massa, dan huru-hara penolakan kebijakan secara nyata diwaspadai di seluruh wilayah hukum Polres Lombok Barat. Adapun jenis kejahatan kontijensi sektoral yang dipetakan memiliki indeks kerawanan tinggi di Lombok Barat meliputi:

- (1) Kasus SARA: Letupan konflik berbasis sentimen Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan di tengah masyarakat yang majemuk;
- (2) Perkelahian Kampung: Manifestasi benturan fisik antar-kelompok pemuda, antar-dusun, atau antar-desa yang dipicu ego sektoral, miras, atau balap liar;

- (3) Perusakan Tempat Ibadah: Risiko gesekan komunal yang menyasar simbol keagamaan di kawasan heterogen (Kecamatan Lingsar, Narmada, dan Gunungsari);
 - (4) Sengketa Tapal Batas: Konflik perebutan atau klaim batas administrasi wilayah baik antar-desa di internal Lombok Barat maupun batas wilayah antarkabupaten (seperti perbatasan dengan Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Tengah).
- m) Gangguan Kamtibcar Lantas.
- Manifestasi gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) berupa kecelakaan lalu lintas (laka lantas) secara nyata terjadi di seluruh daerah pedesaan maupun poros jalan utama perkotaan di Kabupaten Lombok Barat. Sementara itu, gangguan kamtibcar lantas berupa pelanggaran rambu/marka jalan, penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis (*knalpot brong*), serta titik kemacetan parah terkonsentrasi di daerah perkotaan, jalur logistik utama Pelabuhan Lembar, jalan bypass, serta kawasan koridor pariwisata internasional Senggigi.
- n) Gangguan Kamtibmas Non Pidana.
- Gangguan nyata kamtibmas yang berkategori non-pidana namun membutuhkan kesiapsiagaan penuh dari personel Polres Lombok Barat meliputi ancaman bencana alam hidrometeorologi (banjir bandang, tanah longsor, rob pesisir pantai), bencana seismik gempa bumi tektonik, wabah penyakit menular, serta kecelakaan transportasi laut/darat. Mengingat secara geografis wilayah hukum Polres Lombok Barat dikelilingi laut bebas dan kawasan perbukitan terjal, serta secara medis merupakan wilayah endemis berbagai macam jenis penyakit menular seperti Demam Berdarah Dengue (DBD), malaria, dan Chikungunya, fungsi Satsamapta,

Satpolairud, dan urusan kesehatan (Urkes) Polres secara konsisten menyusun rencana mitigasi kedaruratan terpadu.

5. Analisa SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities* dan *Threats*).

Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Polres Lombok Barat dalam rangka melaksanakan fungsi keamanan tersebut dapat dianalisa faktor-faktor baik dari lingkungan Intern maupun ekstern melalui analisa SWOT, yaitu:

1) Kekuatan (*Strengths*)

- a) Kekuatan Personel Polres Lombok Barat sampai Januari 2026 sebanyak=817 orang, dengan rincian sebagai berikut: Pamen= 3 orang, Pama= 80 orang, Brigadir = 734 orang dan PNS=10 orang terdiri dari Golongan III=2 orang, Golongan II/I= 8 orang, mutasi keluar = 3 orang, untuk perkiraan susut 3 orang (mutasi = 3 orang, meninggal =0 orang dan PTDH=0 orang);
- b) Material dan fasilitas sampai bulan Januari 2026 kondisi baik meliputi:
 - (1) Ranmor R2 sebanyak 133 Unit, R4 sebanyak 45 Unit, R4 Ransus sebanyak 1 Unit, R6 Rantis sebanyak 12 Unit;
 - (2) Material dan fasilitas untuk melaksanakan tugas Operasional meliputi: jumlah Ranmor R2 sebanyak 133 unit, R4 sebanyak 45 unit, R6 sebanyak 12 unit, Alsus: borgol besi = 335 buah, tongkat = 387 buah, Helm = 512 buah, tameng = 254 buah, Lampu senter = 11 buah, video camera = 5 unit, tabung pemadam api = 14 tabung, tenda pleton = 5 buah, pelindung badan/kaki/tangan = 512 pasang, megaphone = 25 buah, gas masker = 122 unit, velbed = 20 buah, HT = 513 unit sedangkan untuk Senpi = 355 pucuk dengan rincian Senpi genggam sebanyak 267 pucuk, senpi bahu sebanyak 83 pucuk, senpi Gas sebanyak 4 pucuk serta jumlah seluruh amunisi yang ada saat ini sebanyak 40.401 butir, Kapal patroli tipe C III = 1 unit, tipe C IV = 1 unit, dan perahu karet = 1 unit;

- (3) Senpi sebanyak = 355 pucuk dengan rincian: Senpi genggam sebanyak 267 pucuk, Senpi bahu sebanyak 83 pucuk, Senpi Gas sebanyak 4 pucuk serta jumlah seluruh amunisi yang ada saat ini sebanyak 40.401 butir;
 - (4) Sedangkan untuk alat apung sebanyak 4 unit meliputi: kapal patroli type C2 = 0 Unit, type C3 = 1 Unit, perahu karet = 1 unit, Rib intercehp=0 unit, Rib sea rader=0 unit, Seareader Shiptender=0 unit, Taktikal Boat=0 unit dan Shiptender 0 unit (ditambah 1 unit kapal tipe C IV);
 - (5) bangunan Mako/Rumdin/Mess/Flat/Barat = 98 unit dengan rincian Baik = 87 unit, Rusak Ringan = 11 unit dan Rusak Berat = 0 unit yang tersebar di jajaran Polres Lombok Barat;
- c) Data Alkom perjenis bulan Januari 2026 Polres Lombok Barat.
- (1) Sedangkan data Alkom perjenis di Polres Lombok Barat dan jajaran sebanyak 4.392 unit dengan rincian ATS 2500 = 1.804 unit; ATS 2500i = 943 unit; APX 1000 = 1.126 unit; APX 2500 = 259 unit; repeater mobile = 2 unit, mobil multi media = 2 unit, Vlay Away V-sat = 1 unit, Trunking = 3 unit, GTR8000 = 23 unit, MTR3000 = 10 unit, Tower SST 72m = 9 unit, tower GWT 45 m = 2 unit, Drone Threaod KX-4LE = 1 unit, Drone DJ Inspire = 4 unit, Vicon Mabes-Polda = 11 unit, layanan Polisi 110 = 32 unit, CCTV Mako = 62 unit, CCTV Obvit = 98 Unit.
- d) Gelar kekuatan dan lapis kemampuan tergelar dengan struktur 1 Polda, 1 Polres Lombok Barat, 8 Polsek jajaran (tipe B = 1 Polsek, Tipe C / Polsek Urban = 3 Polsek, Tipe D / Polsek pra Rural/Praktis = 4 Polsek), dan 0 Polsubsektor;
- (1) Dukungan anggaran telah terdistribusi sampai tingkat Polsek dan diterima pada akhir Tahun Anggaran berjalan sesuai DIPA/RKA-KL masing-masing, sehingga para pimpinan Satuan Kerja

(Kasatker) dapat mengetahui kemampuan dukungan anggaran dan lebih akurat dalam menyusun rencana kegiatan;

- (2) Restrukturisasi Polri sesuai Peraturan Kepolisian Negara Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Polres dan Polsek telah diadakan revisi dari perkap Nomor 22 Tahun 2010 sedangkan Perpol Nomor 2 Tahun 2021 tentang SOTK di tingkat Polres dan Polsek, yang disesuaikan dengan keadaan geografis daerah didukung dengan peralatan yang memadai sebagai upaya untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
- (3) Komitmen pencapaian Reformasi Birokrasi Polri di lingkungan Polri dengan kebijakan Program revitalisasi Polri menuju pelayanan prima berdasarkan dengan RPJMN 5 (lima) arahan Presiden adalah 8 program terbaik cepat pemerintah (Asta cita) dan 17 Kegiatan Prioritas Pemerintah. Polres Lombok Barat dalam mendukung hal tersebut melaksanakan 8 program terbaik cepat pemerintah dengan 31 kegiatan yang menjadi landasan utama dalam rangka pencapaian kinerja Polri yang berorientasi pada pelayanan unggulan yang prima.

2) Kelemahan (*Weaknesses*).

- a) Di dalam operasionalisasi kegiatan, Polres Lombok Barat masih dihadapkan pada keterbatasan kualitas SDM, pemeliharaan materiil, dan fasilitas penunjang, di mana rasio jumlah personel Polres (817 orang) dibandingkan jumlah total penduduk Kabupaten Lombok Barat (751.427 jiwa) masih belum mencapai angka ideal (*police-to-population ratio*), sehingga memicu tingginya beban kerja personel dalam menjaga stabilitas kamtibmas di area rawan;
- b) Di dalam kecepatan memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama di dalam merespons laporan dan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan

karakteristik geografis Kabupaten Lombok Barat yang memiliki kawasan perbukitan terjal dan bergelombang (seperti pedalaman Kecamatan Sekotong dan Lembar) serta masih minimnya dukungan spesifikasi peralatan taktis khusus (*alsus*) maupun armada kendaraan dinas yang melekat pada masing-masing Polsek sebagai garda pelayanan terdepan kepolisian;

- c) Meskipun secara struktur administrasi seluruh 10 Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat telah memiliki kaver pengamanan yang jelas, Meskipun struktur pengamanan di 10 kecamatan telah terkaver secara penuh oleh keberadaan 8 Polsek jajaran—termasuk Polsek Kuripan yang telah mandiri sejak tahun 2019 serta Polsek Labuapi yang telah lama mapan dengan status Tipe D—Polres Lombok Barat masih menghadapi tantangan pada pemenuhan DSP (Daftar Susunan Personel) dan pemeliharaan sarana prasarana penunjang di kedua Polsek tersebut. Karakteristik wilayah Labuapi dan Kuripan sebagai koridor penyangga utama yang berbatasan langsung dengan pusat perkotaan Mataram dan jalur bypass logistik memicu tingginya dinamika kamtibmas, yang belum sebanding dengan penguatan kuantitas personel inti dan alsus di tingkat Polsek lini depan;
- d) Belum optimalnya peran serta dan kesadaran hukum masyarakat, serta masih minimnya partisipasi aktif warga dalam mendukung tugas-tugas Polri, khususnya dalam menghidupkan kembali sistem pengamanan swakarsa (Siskamling/Pos Kamling) guna mewujudkan implementasi strategi Perpolisian Masyarakat (*community policing*) yang mandiri di tingkat dusun dan desa;
- e) Masih terbatasnya keterampilan, kompetensi, dan kemampuan teknis personel Polres Lombok Barat di lapangan, terutama dalam hal penguasaan regulasi peraturan perundang-undangan terbaru, penguasaan teknologi komunikasi berbasis komputer, serta pemanfaatan teknologi analitik siber dan biokimia forensik guna

menghadapi kuantitas serta kualitas kejahatan konvensional modern (3CR) yang semakin canggih;

- f) Reformasi bidang kultural di internal Polres Lombok Barat belum sepenuhnya merata dan masih menyisakan oknum anggota yang menerapkan paradigma lama dalam melaksanakan tugasnya di lapangan, sehingga sewaktu-waktu dapat memicu keluhan, komplain, serta ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian yang dinilai kurang humanis, arogan, atau lambat dalam merespons aduan perkara;
 - g) Masih terbatasnya kuantitas personel Polres Lombok Barat yang memiliki kualifikasi spesialis dan sertifikasi keahlian khusus dalam menangani kluster kejahatan transnasional, kejahatan antarpulau, dan kejahatan terhadap kekayaan negara, seperti penanganan tindak pidana siber (*cyber crime*), judi online jaringan pedesaan, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO/PMI Ilegal), *destructive fishing* di gili wisata, pembalakan liar, serta aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) skala besar.
- 3) Peluang (Opportunities).
- a) Masih tingginya kepercayaan, harapan, dan dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, para stakeholder, tokoh agama (Tuan Guru), tokoh adat, serta seluruh lapisan masyarakat terhadap peran Polres Lombok Barat dalam memelihara kamtibmas, yang dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat kemitraan kepolisian melalui forum komunikasi formal maupun informal;
 - b) Letak geografis Kabupaten Lombok Barat yang sangat strategis sebagai urat nadi logistik dan transportasi laut Pulau Lombok melalui keberadaan Objek Vital Nasional Pelabuhan Lembar dan Pelabuhan Gili Mas, memberikan peluang besar bagi penguatan koordinasi penegakan hukum laut-darat secara lintas sektoral;

- c) Adanya kemapanan struktur organisasi kepolisian kewilayahan yang solid, memberikan peluang besar bagi Polres Lombok Barat untuk mengoptimalkan strategi pemolisian masyarakat (*community policing*), mempercepat jangkauan deteksi dini secara sektoral, serta memfokuskan pengamanan statis pada kawasan penyangga perbatasan tanpa terjadi tumpang tindih komando;
- d) Arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Lombok Barat 2025–2029 yang memprioritaskan akselerasi sektor pariwisata bahari, industri pengolahan agraris, dan ekonomi kreatif, membuka peluang penguatan strategi *safe guarding* investasi guna meningkatkan citra positif Polri sebagai pelindung pertumbuhan ekonomi daerah;
- e) Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan penetrasi internet yang semakin meluas di tengah masyarakat memberikan peluang bagi Polres Lombok Barat untuk mempercepat digitalisasi layanan publik, mengoptimalkan sosialisasi kamtibmas siber, serta memaksimalkan efektivitas sistem respons cepat Layanan Polisi 110 hingga ke tingkat pelosok desa.
- f) Adanya dorongan regulasi tata ruang daerah serta rencana formalisasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di kawasan Sekotong, memberikan peluang bagi fungsi Intelkam dan Satbinmas untuk membangun ekosistem pertambangan rakyat yang tertib hukum, aman, dan kondusif bersama jajaran stakeholder terkait.
- g) Semakin tingginya kesadaran kolektif dari kelompok sadar wisata (Pokdarwis), komunitas pemuda, serta jajaran pengamanan swakarsa sektoral (seperti Pecalang di Lingsar dan Narmada) memberikan peluang integrasi sistem pengamanan partisipatif yang solid dalam mengawal kelancaran rangkaian kalender event wisata nasional maupun lokal di Lombok Barat

4) Ancaman (*threats*).

Sedangkan ancaman yang ada di daerah hukum Polda NTB adalah angka pelanggaran hukum dan pelanggaran kriminalitas yang masih tinggi menyangkut beberapa golongan/jenis, yaitu:

- a) Eskalasi kuantitas dan kualitas kejahatan konvensional, khususnya tren tindak pidana 3CR (Pencurian dengan Pemberatan/Curat, Pencurian dengan Kekerasan/Curas, dan Pencurian Kendaraan Bermotor/Curanmor) serta kasus pembunuhan dan pemalsuan dokumen yang digerakkan oleh jaringan pelaku lintas kabupaten/kota (Lobar, Loteng, Lotim, dan Kota Mataram) dengan memanfaatkan kelengahan sistem pengamanan swakarsa di lingkungan masyarakat;
- b) Letak geografis pesisir pantai terbuka yang panjang (*jalur tikus*) di sepanjang pantai Batulayar, Lembar, hingga Sekotong, serta tingginya arus lalu lintas laut internasional di Selat Lombok, menjadi ancaman nyata terkait peredaran gelap narkoba jaringan internasional, masuknya barang selundupan ilegal (*ballpress*), hingga potensi pemanfaatan wilayah perairan sebagai jalur transit penyelundupan imigran gelap (*people smuggling*) menuju Australia;
- c) Ancaman kerawanan kamtibmas yang berimplikasi kontijensi, meliputi letupnya aksi unjuk rasa (Unras) berskala besar dari elemen mahasiswa, OKP, dan LSM terkait penanganan kasus hukum/korupsi di tingkat provinsi, sengketa agraria pertanahan di Sekotong (Dusun Pansing, Desa Buwun Mas), serta konflik vertikal penolakan alih fungsi lahan pertanian (LP2B) yang rawan dibarengi aksi anarkis berupa pemblokiran total jalur jalan bypass dan pintu gerbang Objek Vital Nasional Pelabuhan Lembar/Gili Mas;
- d) Meningkatnya intensitas kerawanan di ruang siber (*cyber crime*) berupa maraknya kasus penipuan daring (*online scam*), judi online yang merambah pelosok desa, jeratan pinjaman online ilegal, serta masifnya penyebaran berita bohong (*hoaks*) dan ujaran kebencian (*hate speech*)

yang dieksploitasi oleh oknum tertentu untuk memicu polarisasi warga, terutama menjelang tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di Lombok Barat;

- e) Kejahatan yang berimplikasi kontijensi seperti perkelahian antar kampung sehingga berdampak pada gangguan keamanan yang meluas sehingga memerlukan pengerahan kekuatan besar untuk menanggulangnya;
- f) Karakteristik kerentanan wilayah Kabupaten Lombok Barat terhadap ancaman bencana alam non-pidana, meliputi bencana hidrometeorologi basah (banjir bandang, tanah longsor di area perbukitan, abrasi, dan rob ekstrem di kawasan pesisir pantai wisata pada periode Desember hingga Februari) serta risiko gempa bumi tektonik aktif yang sewaktu-waktu dapat terjadi dan berpotensi melumpuhkan urat nadi perekonomian, pariwisata Senggigi, serta jalur distribusi logistik pelabuhan
- g) Kondisi perekonomian yang belum stabil berdampak pada kebutuhan hidup dan tuntutan primer sehingga cenderung berbuat anarkis dalam menyampaikan tuntutan.

6. Identifikasi Masalah.

Pelaksanaan tugas Polri ke depan seiring dengan perkembangan lingkungan strategis Nasional dan Daerah akan semakin kompleks. Serta tuntutan dan harapan masyarakat terhadap profesionalisme kinerja dan pelayanan di berbagai bidang Kepolisian yang semakin tinggi mengharuskan Polres Lombok Barat menyusun berbagai upaya dan langkah-langkah aksi dalam mewujudkan Keamanan Dalam Negeri:

Beberapa potensi kerawanan/permasalahan nyata yang dihadapi dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di daerah hukum Polres Lombok Barat, antara lain:

- 1) Masih adanya ancaman laten dari pergerakan sel-sel tidur kelompok radikal, intoleransi, dan eks-organisasi terlarang (seperti eks-HTI, JAD, atau JAS) di tingkat regional Pulau Lombok yang berupaya menyusupkan pengaruh ideologi

garis keras (*Igaras*) melalui pemanfaatan ruang siber, forum kajian tertutup, serta penumpangan isu kemanusiaan global guna memicu polarisasi sosiologis di tengah masyarakat Lombok Barat yang heterogen;

- 2) Terjadinya fluktuasi kenaikan harga komoditas Bahan Pokok Penting (Bapokting), serta risiko kelangkaan penyiapan stok pupuk bersubsidi bagi kelompok tani pada musim tanam di kawasan lumbung pangan, yang kerap dipicu oleh keterbatasan kuota, kendala rantai distribusi pelabuhan, serta dampak anomali cuaca ekstrem yang berpotensi menggerus daya beli dan memicu gejolak sosial;;
- 3) Kasus-kasus tindak kejahatan/kriminal yang menjadi perhatian serius yaitu Tindak kriminalitas 3C (Curat, Curas dan Curanmor) yang masih cukup tinggi;
- 4) Adanya potensi kerawanan konflik horizontal komunal antar-kelompok pemuda, antar-dusun, atau antar-desa di wilayah hukum Polres Lombok Barat (khususnya wilayah pemukiman padat dan lingkaran tambang) yang kerap dipicu oleh permasalahan sepele seperti pengaruh konsumsi minuman keras tradisional (tuak/brem), kenakalan remaja, balap liar, atau sengketa batas lubang emas produktif;;
- 5) Peredaran Narkoba, terorisme, kejahatan Siber serta kejahatan konvensional yang meresahkan Masyarakat;
- 6) Kurangnya kuantitas jumlah personel (*shortage of personnel*) di tingkat Polres maupun Polsek jajaran jika dihadapkan pada luasnya wilayah hukum dan padatnya agenda pengamanan Kalender Kamtibmas (seperti event internasional, nasional, regional, serta rencana Pilkada Serentak Lombok Barat 2027), sehingga pemenuhan Daftar Susunan Personel (DSP) belum mencapai angka ideal;
- 7) Masih kurangnya pendidikan, pelatihan dan keterampilan personel Polri yang mampu menunjang kinerja Polri terkait IT;
- 8) Masih kurangnya sarana prasarana sesuai dengan karakteristik daerah serta alat komunikasi (Alkom) di tingkat Polres dan Polsek;

- 9) Prosentase laju tingkat perkembangan penduduk sangat cepat dibandingkan dengan tingkat kecepatan laju perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang berakibat pada dampak keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 10) Masih terbatasnya jumlah anggota Polres Lombok Barat yang telah memiliki kualifikasi kejuruan resmi (Pendidikan Spesialisasi / Dikspes) pada fungsi teknis kepolisian (seperti fungsi Reskrim, Intelkam, Sabhara, Lantas, dan Polairud), serta masih adanya kendala penempatan personel (*placement*) yang belum sepenuhnya selaras dengan latar belakang keahlian kejuruan yang dimiliki.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN PRIORITAS NTB DAN POLRES LOMBOK BARAT SERTA PROGRAM PEMERINTAH

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Prioritas Polda NTB
 - a. Visi Polda NTB

“Terwujudnya wilayah hukum Polda NTB Aman, Tertib dan Berkeadilan melalui Kepolisian yang Berorientasi pada Masyarakat”.
 - b. Misi Polda NTB

“Melindungi, Melayani dan Mengayomi masyarakat di wilayah hukum Polda NTB”
 - c. Tujuan Polda NTB

Tujuan Polda NTB merupakan penjabaran Visi dan Misi Polri dan dilengkapi dengan rencana sasaran strategis dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas Presiden. Tujuan Polda NTB pada periode jangka menengah, menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dengan kemampuan yang dimiliki Polda NTB. Dapat mengarahkan perumusan Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi, serta Program dan Kegiatan Polda NTB yang akan dituju pada tahun 2029 yaitu “Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Terkendali, melalui Kepolisian yang Berintegritas, Modern, dan Akuntabel.
 - a. Sasaran Prioritas Polda NTB.
 - 1) pertama “Menjaga dan Memelihara Kamtibmas di seluruh Wilayah hukum Polda NTB secara Responsif dan Prediktif”;
 - 2) kedua “Mewujudkan Pelayanan Publik Polri yang Berkualitas dan Terintegrasi”;
 - 3) ketiga “Menegakkan Hukum yang Humanis, Akuntabel dan Berkeadilan”;
 - 4) keempat “Mewujudkan SDM Polri yang Profesional, Cerdas dan Berintegritas melalui Pengelolaan SDM yang Modern dan Transparan”;
 - 5) kelima “Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Terintegrasi dalam Mendukung Operasional Kepolisian;

- 6) keenam “Meningkatkan dan Mewujudkan Budaya Integritas, Kejujuran dan Kehormatan pada Setiap Pelaksanaan Tugas Kepolisian dalam rangka Memperkuat Tata Kelola Organisasi dan SDM yang Baik di daerah Polda NTB”
2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Prioritas Polres Lombok Barat.
 - b. Visi Polres Lombok Barat.

Terwujudnya Wilayah Hukum Polres Lombok Barat aman, tertib dan berkeadilan melalui Kepolisian yang berorientasi pada masyarakat.
 - c. Misi Polres Lombok Barat.

Melindungi, melayani dan Mengayomi masyarakat di Wilayah Hukum Polres Lombok Barat.
 - d. Tujuan Polres Lombok Barat.

Tujuan Polres Lombok Barat merupakan penjabaran Visi dan Misi POLRI dan Polda NTB dan dilengkapi dengan rencana sasaran strategis dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas Presiden. Tujuan Polres Lombok Barat pada periode jangka menengah, menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dengan kemampuan yang dimiliki Polres Lombok Barat. Dapat mengarahkan perumusan Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi, serta Program dan Kegiatan Polres Lombok Barat yang akan dituju pada tahun 2029 yaitu “Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Terkendali, melalui Kepolisian yang Berintegritas, Modern, dan Akuntabel”.
 - e. Sasaran Prioritas Polres Lombok Barat.
 - 2) pertama “Menjaga dan Memelihara Kamtibmas di seluruh Wilayah hukum Polres Lombok Barat secara Responsif dan Prediktif”;
 - 2) kedua “Mewujudkan Pelayanan Publik Polri yang Berkualitas dan Terintegrasi”;
 - 3) ketiga “Menegakkan Hukum yang Humanis, Akuntabel dan Berkeadilan”;
 - 4) keempat “Mewujudkan SDM Polri yang Profesional, Cerdas dan Berintegritas melalui Pengelolaan SDM yang Modern dan Transparan”;

- 5) kelima “Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Terintegrasi dalam Mendukung Operasional Kepolisian”;
- 6) keenam “Meningkatkan dan Mewujudkan Budaya Integritas, Kejujuran dan Kehormatan pada Setiap Pelaksanaan Tugas Kepolisian dalam rangka Memperkuat Tata Kelola Organisasi dan SDM yang Baik di Polres Lombok Barat”.

3. Program Pemerintah.

Guna mendukung dan menyukseskan program pemerintah serta mewujudkan kebijakan swasembada pangan dan inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia, Polres Lombok Barat mengimplementasikan dan melaksanakan beberapa program taktis, yaitu:

- a. Program Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri Polda NTB di Tingkat Kewilayahan Polres Lombok Barat, Yaitu:
 - 1) Program Pekarangan Pangan Bergizi;
pekarangan pangan bergizi dan pemanfaatan lahan produktif. Polri telah melibatkan Bhabinkamtibmas sebagai motor penggerak dalam mengedukasi masyarakat tentang produksi pangan di lahan pekarangan.
 - 2) Program Pemanfaatan Lahan Produktif.
Polri bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk mengubah lahan kosong menjadi area pertanian yang menghasilkan jagung, ubi, kolam ikan, serta mendirikan peternakan kecil.
 - 3) Program Pengawasan Distribusi Pangan.
Polri memastikan rantai distribusi pangan berjalan lancar dan efisien, guna mendukung ketahanan pangan nasional. Kapolri menegaskan bahwa Polri terus memantau dan mengawasi distribusi agar tidak ada hambatan yang merugikan masyarakat.
Program Rekrutmen Khusus bagi personel yang memiliki latar belakang di bidang pertanian, gizi, dan kesehatan masyarakat.

Program ini bertujuan memperkuat upaya Polri dalam mendukung kebijakan pangan nasional.

b. Makan Bergizi Gratis (MBG).

Merupakan pilar program nasional makan siang gratis di Indonesia yang dijalankan secara bertahap dengan sasaran prioritas siswa/siswi mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP hingga SMA/SMK, serta ibu hamil dan menyusui, guna mencetak generasi yang tumbuh sehat, cerdas, sejahtera, sekaligus mengatasi masalah gizi buruk dan menekan angka stunting di Indonesia. Dalam mendukung target pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara nasional, wilayah Provinsi NTB telah mengoperasikan sejumlah SPPG di awal tahun anggaran. Khusus di wilayah hukum Polres Lombok Barat, pengelolaan dan pengawasan operasional SPPG dikoordinasikan secara melekat bersama unsur TNI dan Pemerintah Daerah, di mana dari 6 (enam) SPPG percontohan awal yang berada di bawah asistensi Polda NTB, 1 (satu) unit SPPG di antaranya berkedudukan resmi di bawah pengawasan dan operasional Polres Lombok Barat. Fungsi Satbinmas, Dokkes, dan Polsek jajaran Polres Lombok Barat bertugas memastikan aspek higienitas menu, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta kelancaran distribusi logistik harian dari dapur SPPG menuju sekolah-sekolah sasaran.

c. Program Prioritas Kapolri yaitu program *Beyond Trust* Presisi dengan tujuan untuk melaksanakan 8 Misi Asta Cita yang mencakup 17 Program Prioritas dan menghasilkan 8 program terbaik dan cepat yang terdiri dari 4 kebijakan, 7 program dan 23 kegiatan yaitu:

- 1) kebijakan: Transformasi Organisasi.
 - a) program Menerapkan sistem Pemolisian Berbasis Digital dengan kegiatan:
 - (1) meningkatkan kualitas respon keluhan atau aduan melalui media sosial secara cepat sebelum viral;
 - (2) optimalkan manajemen citra;

- (3) optimalkan Satu Data Polri untuk mendukung pemolisian prediktif;
 - (4) meningkatkan manfaat nomor *whatsaap* pribadi Kasatwil (Kapolres) sebagai sarana pengaduan masyarakat.
 - b) program: Mengembangkan Sumber Daya Manusia unggul dengan kegiatan:
 - (1) Meningkatkan manfaat Forum Belajar Bersama;
 - (2) Mempersiapkan persyaratan pengajuan Kep Presiden terkait Hari Juang Polri;
 - (3) Meningkatkan manfaat bakti kesehatan terhadap masyarakat sebagai manifestasi konsep Polri yang masyarakat;
- 2) kebijakan 2: Transformasi operasional dengan program:
 - a) program menciptakan suasana kondusif di masyarakat dengan kegiatan:
 - (1) meningkatkan manfaat bakti sosial terhadap masyarakat sebagai *manitestasi* konsep Polri yang merakyat;
 - (2) optimalkan dukungan terhadap kegiatan KRYD Nusantara *Cooling System 2025-2026*.
 - b) program Memantapkan pemeliharaan Kamtibmas dengan kegiatan:
 - (1) optimalkan pemolisian masyarakat secara proaktif;
 - (2) optimalkan kegiatan bersama TNI-Polri;
 - (3) meningkatkan manfaat penggelaran anggota Polri pada jam-jam padat aktivitas masyarakat dan kegiatan tematik untuk mewujudkan visi Polri yang merakyat;
 - (4) menanamkan nilai-nilai pemolisian terhadap anak sejak usian dini.
- 3) kebijakan 3: Tranformasi Pelayanan Publik dengan program:
 - a) program Meningkatkan pelayanan publik dengan kegiatan:

- b) meningkatkan manfaat Jumat Curhat dan Minggu Kasih sebagai sarana bagi Kasatwil untuk kritik, masukan maupun aduan publik serta embangun citra Polri yang humanis;
 - c) meningkatkan kualitas pelayanan publik yang anti korupsi.
- 4) kebijakan 4: Transformasi pengawasan dengan program sebagai berikut:
- a) program Mengoptimalkan penegakkan hukum yang tegas dan humanis dengan kegiatan:
 - Optimalisasi penegakkan hukum yang cepat, tegas, transparan dan berkeadilan.
 - b) program Mengoptimalkan pengawasan dengan kegiatan:
 - Penanggungjawab kegiatan *Beyond Trust TW* tingkat Mabes, melaksanakan arahan, Anev kegiatan dan verifikasi kepada pelaksanaan di tingkat Mabes, Polda dan Polres.

BAB III

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL, ARAH KEBIJAKAN POLDA NTB DAN ARAH KEBIJAKAN POLRES LOMBOK BARAT

3. Arah kebijakan dan strategi Polda NTB tahun 2027
 - a. Sasaran Prioritas I "Meningkatkan Sinergisitas Polisi, Masyarakat dan Stakeholder dalam rangka Mendukung Keamanan dan Ketertiban Masyarakat secara Proaktif" terdiri dari 12 (dua belas) arah bijak sebagai berikut:
 - 1) meningkatkan kolaborasi dan kinerja Polri sebagai bagian dari penguatan fungsi intelijen dalam melaksanakan deteksi aksi di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan lingkungan dalam negeri guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mendukung pemeliharaan keamanan dalam negeri;
 - 2) meningkatkan peran deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan lingkungan dalam negeri melalui mengoptimalkan pengumpulan data intelijen;
 - 3) mengendalikan ancaman gangguan Kamtibmas dan potensi kejahatan serta aksi terorisme melalui langkah-langkah proaktif yang dirancang untuk mengidentifikasi dan menangani risiko secara cepat dan tepat;
 - 4) meningkatkan dan melanjutkan kegiatan "Pemolisian Prediktif" dalam rangka harkamtibmas guna menciptakan suasana kondusif di tengah masyarakat (*Cooling System*) dengan melibatkan peran aktif dari masyarakat;
 - 5) meningkatkan "kehadiran Polisi" dalam penanganan konflik di tengah masyarakat secara humanis;
 - 6) meningkatkan "kehadiran Polisi" dalam kegiatan Kamseltibcarlantas kepada masyarakat guna memberikan rasa aman saat berkendara, terjadi kemacetan dan saat pada jam rawan kejahatan;
 - 7) meningkatkan peran aktif dan "kehadiran Polisi" di tengah masyarakat baik di wilayah bencana dan "*slum area*";

- 8) melaksanakan tahapan pengamanan kegiatan event nasional/internasional tahun 2027;
- 9) melaksanakan "Kehadiran Polisi" di kewilayahan untuk pengamanan unjuk rasa, penanganan konflik sosial dan menjalin sinergisitas dengan stakeholder terkait penanganan gangguan keamanan dan bencana;
- 10) meningkatkan kerja sama Kepolisian dalam/luar negeri guna mendukung Harkamtibmasdan Gakkum;
- 11) melaksanakan "Kehadiran Polisi" dalam penggelaran kegiatan patroli kapal dan pesawat udara Polri di seluruh wilayah Indonesia guna mendukung kegiatan keamanan laut;

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: meningkatkan kolaborasi dan kinerja Polri sebagai bagian dari penguatan fungsi intelijen dalam melaksanakan deteksi aksi di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan lingkungan dalam negeri guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam negeri;
untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan kegiatan deteksi aksi secara efektif dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat meliputi: deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini dari fungsi intelijen keamanan Polri melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan, penggalangan dan kontra intelijen yang mampu mendukung operasional fungsi kepolisian baik terhadap potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata serta menurunkan dan mengeliminasi setiap potensi gangguan keamanan dan konflik sosial ditengah masyarakat;
(giat3112,3114,3115,3116,3117,3150/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU7);
 - b) mengoptimalkan kegiatan penyelidikan dengan fokus pada wilayah yang berpotensi terjadinya tindak pidana terorisme, ancaman aksi radikalisme dan pemetaannya;

- (*giat3143/progLidikSidik/SP1/SS1/IKU9*);
- c) meningkatkan kegiatan penguatan program Polmas guna menumbuhkan kembangkan paradigma dan perilaku yang berorientasi masyarakat (*citizen-centric*) dengan menanamkan prinsip-prinsip pemolisian masyarakat (*community policing*);
 (*giat3128, 5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2*);
- d) meningkatkan kualitas hasil penelitian dan survei yang akuntabel dalam rangka mendukung pengukuran/capaian Indeks Kamtibmas Polri; (*giat5067/progDukma/SP1/SS5/IKP1*);
- 2) arah bijak: meningkatkan peran deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan lingkungan dalam negeri melalui mengoptimalkan pengumpulan data intelijen;
 untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) mengoptimalkan dalam pengumpulan data intelijen/informasi dengan mengembangkan repositori data terpadu yang mengintegrasikan berbagai sumber *input*;
 (*giat3112/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU7*);
- b) meningkatkan kolaborasi lintas fungsi dan layanan publik melalui *data-sharing platform* (termasuk notifikasi potensi ancaman kepada fungsi terkait);
 (*giat3112/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU7*);
- 3) arah bijak: mengendalikan ancaman gangguan Kamtibmas dan potensi kejahatan serta aksi terorisme melalui langkah-langkah proaktif yang dirancang untuk mengidentifikasi dan menangani risiko secara cepat dan tepat;
 untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 7 (tujuh) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan "kehadiran Polisi" dan mengembangkan program berorientasi masyarakat (community-based program) untuk menyelesaikan masalah (problem solving) dan mencegah kejahatan secara kolaboratif dalam pemecahan masalah yang terjadi di tengah masyarakat;
(giat3114,3128, 5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2);
- b) meningkatkan dan melanjutkan kegiatan pencegahan sebagai bentuk "kehadiran Polisi" berupa: kontra radikal, kontranarasi dan kontra ideologi terhadap penyebaran propaganda kelompok terorisme baik pada kanal-kanal media online maupun komunitas masyarakat yang rentan terpapar oleh paham radikalismedan terorisme;
(giat3143/progLidiksidiklgiat5076/progHarkamtibmas/giat3149/progDukma/SP1/SS1/IKU9);
- c) meningkatkan pendekatan yang adaptif kepada masyarakat dengan melibatkan peran civil society dan tokoh agama yang telah mengikuti program moderasi beragama dalam penanganan kasus terorisme;
(giat3143/progLidikSidiklgiat3128,5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU9);
- d) melanjutkan kegiatan sosialisasi dan kolaborasi dengan "stakeholder" dalam upaya pencegahan paham radikalisme, terorisme dan melaksanakan pembinaan terhadap eks napi terorisme beserta keluarganya;
(giat3143/progLidikSidik,5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU9);
- e) meningkatkan kegiatan menetralsir "informasi negatif" di tengah masyarakat yang dapat mengganggu Kamtibmas melalui pengelolaan opini publik guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri; *(giat3149/progDukma/SP1/SS5/IKP7);*
- f) meningkatkan dan melanjutkan kegiatan "edukasi" dan himbauan kepada masyarakat berupa pesan Kamtibmas untuk pencegahan kejahatan melalui produksi "konten kreatif", melaksanakan press

release tentang Kamtibmas dengan tujuan meningkatkan citra positif Polri di tengah masyarakat; (giat3070, 3149/progDukma/SP1 ISS5/IKP7);

- g) meningkatkan "kehadiran Polisi" dan respon time melalui kegiatan patroli yang adaptif di wilayah rawan kejahatan dan kriminalitas serta melaksanakan pelacakan dan penangkalan di tempat Obvit/Obvitnas dan destinasi pariwisata;

(giat3130, 3131, 5081/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU5);

- 4) arah bijak: meningkatkan dan melanjutkan kegiatan "Pemolisian Prediktif" dalam rangka Harkamtibmas guna menciptakan suasana kondusif di tengah masyarakat (*Cooling System*) dengan melibatkan peran aktif dari masyarakat;

untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sambang kepada Toda, Toga dan Tomas serta masyarakat lainnya dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan guna menumbuh kembangkan paradigma dan perilaku yang berorientasi Masyarakat (*citizen-centric*) dengan menanamkan prinsip-prinsip pemolisian masyarakat (*community policing*);

(giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2);

- b) peningkatan kegiatan pemberdayaan pengemban kewenangan fungsi kepolisian terbatas kepada Satpam dan Polsus untuk mendukung "kehadiran Polisi" di tempat tempat rawan kejahatan;

(giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2);

- c) meningkatkan kegiatan pembinaan FKPM/Pokdar Kamtibmas dalam rangka mengembangkan dan mengoptimalkan Polmas dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan serta melaksanakan asistensi bagi penguatan KBPPP;

(giat3133,5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2);

- d) meningkatkan pelaksanaan sosialisasi budaya tertib lalu lintas kepada masyarakat pengguna jalan guna mencegah terjadinya pelanggaran lalu-lintas dan kecelakaan;
(giat3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
- 5) arah bijak: meningkatkan "kehadiran Polisi" dalam penanganan konflik ditengah masyarakat secara humanis;
untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan peran dan "kehadiran Polisi" utamanya dari para Bhabinkamtibmas dalam melakukan deteksi awal penanganan konflik sosial di Tengah Masyarakat secara humanis;
(giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2);
 - b) meningkatkan dan melanjutkan kegiatan dalam mengorganisasikan masyarakat untuk mengalihkan potensi konflik sosial/politik dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan dengan melakukan aktivitas/kegiatan yang bersifat positif;
(giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2);
 - c) meningkatkan respon cepat penggelaran pasukan Korbrimob Polri dalam pengamanan konflik yang dilakukan secara humanis pada saat dan pasca konflik guna menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan;
(giat5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU6);
- 6) arah bijak: meningkatkan "kehadiran Polisi" dalam kegiatan Kamseltibcarlantas kepada masyarakat guna memberikan rasa aman saat berkendara, terjadi kemacetan dan saat pada jam rawan kejahatan;
untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan pelaksanaan kegiatan kepolisian yang adaptif sebagai bentuk "kehadiran Polisi" dalam pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli di tengah masyarakat;
(giat3130,3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU3);

- b) meningkatkan "kehadiran Polisi" dalam kegiatan patroli, penjagaan yang adaptif di wilayah rawan kriminalitas pada saat jam rawan kejahatan dan rawan kecelakaan serta berperan aktif mengajak masyarakat untuk mewujudkan Kamtibmas dan Kamseltibcarlantas;
 (giat3130, 3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU3);
 - c) meningkatkan kegiatan patroli dan penjagaan yang adaptif di Obvit/Obvitnas dan tempat destinasi pariwisata sebagai bentuk "kehadiran Polisi" saat jam-jam rawan kejahatan dan kecelakaan serta berperan aktif di tengah Masyarakat dalam mewujudkan Kamtibmas;
 (giat3131/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU5);
- 7) arah bijak: meningkatkan peran aktif dan "kehadiran Polisi" di tengah masyarakat baik di wilayah kejadian bencana dan "*Slum Area*";
 untuk mewujudkan arah bijak 7, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan kesiapsiagaan kehadiran personel Sarbrimob Polda NTB yang mampu digerakkan guna menghadapi "*ketanggapsegeraan*" dalam penanganan bencana, keselamatan dan reintegrasi serta di wilayah rawan kriminalitas yang berintensitas tinggi, bencana serta wabah; (giat5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU6);
 - b) meningkatkan "kehadiran Polisi" guna memberikan dukungan atas penyelenggaraan dan pelayanan bantuan penanganan SAR terbatas dalam penanganan bencana dan keselamatan yang dilaksanakan oleh personel Sabhara, Brimob dan bantuan Satwa;
 (giat3130, 5081, 5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU3);
 - c) meningkatkan akurasi dalam memetakan desa/wilayah rawan gempa, bencana dan Banjir oleh "*Bhabinkamtibmas*" yang wilayah didiami oleh masyarakat sebagai bentuk kehadiran Polisi guna memudahkan identifikasi masyarakat yang menjadi korban pada saat dan pasca bencana;
 (giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2);

- d) meningkatkan kerja sama dan kolaborasi dengan instansi terkait dalam penanganan "Pelayanan Kesehatan" dan *"trauma healling"* pada daerah rawan gempa dan bencana;
(giat3072,progDukma,giat3110,progProfesionalismeSDM/SP1/SS1/IKU2/SS3/IKP1);
- 8) arah bijak: melaksanakan tahapan pengamanan kegiatan event Nasional/Internasional;
 untuk mewujudkan arah bijak 8, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melaksanakan perencanaan operasi kepolisian dalam rangka pengamanan event nasional/internasional tahun 2027;
(giat5079/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU8);
- b) meningkatkan kehadiran Polisi dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan event nasional/internasional tahun 2027 meliputi: Pengaturan, Patroli, Penjagaan, Pengawalan pada wilayah rawan kejahatan;
(giat,3130/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU8);
- c) menyelenggarakan pengamanan pada wilayah rawan kejahatan dan kecelakaan pada wilayah objek vital di lokasi event;
(giat3130,3131,3135/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU5);
- d) melaksanakan pengamanan event nasional tahun 2027 serta mengantisipasi meningkatnya kejahatan yang berskala ke intensitas tinggi; *(giat5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU6);*
- 9) arah bijak: melaksanakan "kehadiran Polisi" kewilayahan untuk pengamanan unjuk rasa, penanganan konflik sosial dan menjalin sinergitas dengan *stakeholder* terkait penanganan gangguan keamanan dan bencana;
 untuk mewujudkan arah bijak 9, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan kolaborasi dan sinergisitas dalam membangun kerja sama dengan satuan kewilayahan serta para pemangku kepentingan (*stakeholder*) secara aktif guna mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban dalam negeri yang kondusif;
(*giat5076,5087,5080/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU8*);
 - b) meningkatkan pelaksanaan “kehadiran Polisi” dalam pengamanan kegiatan di tengah masyarakat yang sedang beraktivitas;
(*giat3130,3131,3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU3*);
 - c) meningkatkan “kehadiran Polisi” pada kegiatan pengamanan di kawasan obvitnas dan objek tertentu;
(*giat3131/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU5*);
 - d) meningkatkan “kehadiran Polisi” pada pelayanan pelacakan dan penangkalan di daerah rawan kejahatan dan bahaya narkoba;
(*giat5081/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU3*);
- 10) arah bijak: meningkatkan kerja sama kepolisian dalam/luar negeri guna mendukung Harkamtibmas dan Gakkum;
untuk mewujudkan arah bijak 10, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan pelaksanaan kegiatan kerja sama dalam negeri antara Polri dan Kementerian/Lembaga dalam rangka meningkatkan kolaborasi dan sinergisitas dengan “*stakeholder*” terkait;
(*giat3120/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU8*);
 - b) meningkatkan pelaksanaan kegiatan kerja sama internasional guna mendukung kerja sama kepolisian internasional, organisasi internasional dan kerja sama bilateral serta multilateral dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban dunia untuk meningkatkan citra positif Polri di wilayah hukum Polda NTB;
(*giat3122/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU8*);
 - c) meningkatkan kerja sama keamanan dan ketertiban internasional di wilayah hukum Polda NTB;

(*giat3122/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU8/MendukungTUSI*);

- 11) arah bijak: melaksanakan “kehadiran Polisi” dalam penggelaran kegiatan patroli kapal di wilayah hukum Polda NTB guna mendukung kegiatan keamanan laut;

untuk mewujudkan arah bijak 11, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan “kehadiran Polisi” dalam pelaksanaan kegiatan patroli kapal Polri dan “*back up*” di seluruh wilayah perairan dan sepanjang garis pantai untuk melaksanakan pengamanan di wilayah rawan kecelakaan di perairan dan penegakan hukum di wilayah rawan kejahatan;

(*giat3134,4342/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU4/MendukungReformasiPolri*);

- b) meningkatkan “kehadiran Polisi” dalam pelaksanaan kegiatan “*back up*” patroli dari udara dengan mobilisasi pesawat udara Polri dalam rangka pemantauan wilayah perairan yang rawan kejahatan dan kecelakaan;

(*giat3135/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU4/MendukungReformasiPolri*);

- 12) arah bijak: meningkatkan penguatan “kehadiran Polisi” dalam pengamanan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar berpenghuni;

untuk mewujudkan arah bijak 12, maka terdapat satu strategi yang akan dilakukan yaitu:

- meningkatkan dan mengoptimalkan kegiatan patroli, penjagaan dan pelacakan di wilayah rawan kejahatan serta obvit/obvitnas serta penguatan “kehadiran Polisi” di perbatasan dan pulau berpenghuni;

(*giat3130,3131,3135,5081/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU4*);

- b. Sasaran Prioritas II “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Polri melalui Layanan Digital yang Semakin Inovatif”, terdiri dari 3 (tiga) arah bijak sebagai berikut:

- 1) meningkatkan dan menyempurnakan kemudahan serta reliabilitas tindak lanjut pengaduan masyarakat secara multimoda dalam cara berkomunikasi;
- 2) meningkatkan pelayanan yang adaptif dalam melayani masyarakat dengan memperhatikan alur pelayanan, biaya pelayanan dan waktu pelayanan guna meniadakan segala pungutan liar pada sentra pelayanan publik Polri;
- 3) meningkatkan “ketanggap segeraan” dalam melayani masyarakat baik dalam pelayanan publik Polri, Harkamtibmas dan penegakan hukum sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP);

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: meningkatkan dan menyempurnakan kemudahan dan reliabilitas tindak lanjut pengaduan masyarakat secara multimoda dalam cara berkomunikasi;
 untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) mengoptimalkan layanan pengaduan berbasis *hotline*, *website* atau *media social* guna meningkatkan citra Polri yang responsif dan tidak *berbelit-belit* agar hasilnya lebih efektif, cepat, atau akurat;
 (*giat3071/progDukma/SP2/SS5/IKU7/MendukungReformasiPolri*);
 - b) meningkatkan kolaborasi “*Super Apps Presisi*” dalam penanganan pelayanan pengaduan guna memberikan kenyamanan kepada masyarakat saat menyampaikan keluhannya melalui sistem yang ramah, cepat dan terintegrasi antar Satker/instansi;
 (*giat3089,3091/progLidikSidik/5086/progDukma/SP2/SS5/IKP7/SS2/IKU9*);
- 2) arah bijak: meningkatkan pelayanan yang adaptif dalam melayani masyarakat dengan memperhatikan alur pelayanan, biaya pelayanan dan waktu pelayanan guna meniadakan segala pungutan liar pada sentra pelayanan publik Polri;
 untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 7 (tujuh) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan pelayanan *Online* yang terintegrasi serta adaptif dalam pelayanan di kantor pelayanan/keliling di bidang lalu lintas yang lebih menjangkau masyarakat serta pelayanan identifikasi sebagai alat kontrol dan data forensik kepolisian;
(*giat3133/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU1/MendukungTusi*);
- b) meningkatkan kegiatan registrasi dan identifikasi dengan memberikan jaminan keselamatan dan keabsahan di jalan raya atas legitimasi kemampuan pengemudi dan kendaraan bermotor;
(*giat3133/progHarkamtibmas/giat3071,5055/progDukma/SP2/SS1/IKU1/MendukungTusi*);
- c) meningkatkan inovasi layanan yang adaptif bagi masyarakat serta efisien dan terintegrasi guna mempercepat penerapan standard pelayanan minimal di lokasi *afirmatif* (menguatkan) di kawasan perbatasan, menghilangkan kesenjangan pelayanan antara pusat dan daerah pinggiran, sehingga kehadiran Polri benar-benar dirasakan sebagai representasi wilayah provinsi NTB yang melayani dan melindungi hingga ke titik nol kilometer;
(*giat3133/progHarkamtibmas/giat3071,5055/progDukma/giat3084/progSarprasPolri/SP2/SS5/IKP4/MendukungReformasiPolri*);
- d) meningkatkan *update* informasi dan dokumentasi pada layanan/laman *website humaspolri.go.id* secara berkala guna mengubah persepsi masyarakat dari yang semula menganggap Polri "kaku" menjadi Polri yang Informatif, Modern, dan Humanis yang berdampak pada meningkatnya citra positif Polri dimata masyarakat;
(*giat3149/progDukma/SP2/SS5/IKP7/MendukungTusi*);
- e) meningkatkan inovasi dan perbaikan yang adaptif dalam memberikan pelayanan intelkam dan optimalisasi sistem pelayanan SKCK *online* sebagai produk intelijen yang modern, berintegritas dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa birokrasi yang berbelit;

(giat3112/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU7/Mendukung ReformasiPolri);

- f) meningkatkan kegiatan penilaian atas kepuasan layanan kedokteran dan kesehatan Polri pada Dokkes jajaran agar menjadi pusat layanan kesehatan yang berkualitas atas pelayanan medisnya;
(giat3072/progDukma/SP2/SS5/IKP4/MendukungTusi);

- g) mendorong dan meningkatkan penggunaan *Binmas Online System (BOS)* dengan *Online Single Submission (OSS)* dalam memberikan respon cepat atas penerbitan surat ijin operasional BUJP;
(giat5076/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU2/MendukungReformasi Polri);

- 3) arah bijak: meningkatkan “ketanggap segeraan” dalam melayani masyarakat baik dalam pelayanan publik Polri, Harkamtibmas dan Penegakan Hukum sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) melanjutkan, melaksanakan monev dan terus mengkaji guna mengubah budaya kerja dari yang semula "kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah" menjadi "kalau bisa dipangkas, segera terintegrasi secara digital" merespon aturan/SOP dipelayanan publik yang berbelit-belit;

(giat4339,4340,5053/progDukma/SP2/SS5/IKP4/MendukungReformasi Polri);

- b) meningkatkan “*Respon Time*” yang cepat sebagai bentuk kehadiran Polisi dalam kesiapan untuk memberikan bantuan teknis Satwa guna melakukan pelacakan dan penangkalan serta pencarian korban;

(giat5081/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU3/MendukungReformasi Polri);

- c) merespon dan meningkatkan pelayanan jasa pengamanan dan jasa sistem manajemen pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu yang lebih adaptif melalui pembinaan teknis dan audit;

(giat3130,3131/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU5/MendukungReformasi Polri);

- c. Sasaran Prioritas III “Meningkatkan Transparansi dan Efisiensi Penanganan Perkara serta Memperkuat Adaptifitas Penanganan Kejahatan Polri” terdiri dari 4 (empat) arah bijak sebagai berikut:

- 1) mengedepankan kolaborasi dan kerjasama antar penyidik dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna mewujudkan penegakan hukum yang lebih manusiawi dan beradab sesuai nilai-nilai keadilan di masyarakat;
- 2) meningkatkan kompetensi penyidik melalui pelaksanaan kegiatan pelatihan dan sertifikasi penyidik guna meningkatkan kualitas dan kemampuan penyidik Polri;
- 3) meningkatkan dan mewujudkan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam penegakan hukum sebagai langkah prosedur hukum yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral serta memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;
- 4) meningkatkan peran adaptifitas penanganan kejahatan Polri melalui pusat analisis tindak kejahatan di pusat data dan informasi kriminal nasional;

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: mengedepankan kolaborasi dan kerjasama antar penyidik dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna mewujudkan penegakan hukum yang lebih manusiawi dan beradab sesuai nilai-nilai keadilan di masyarakat;

untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 11 (sebelas) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan kolaborasi, koordinasi dan kerja sama keamanan laut antar penyidik di wilayah perairan Polda NTB;
(giat3134,4342/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU7/MendukungTusi);
- b) meningkatkan kegiatan penyelidikan dari ancaman tindak pidana terorisme, dan melaksanakan penindakan serta penyidikan terhadap tindak pidana terorisme berdasarkan penghormatan terhadap HAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hindari praktik kekerasan dalam proses penyidikan;
(giat3143/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU8/MendukungTusi);
- c) meningkatkan kegiatan pengungkapan 4 (empat) jenis kejahatan dengan serta tindak pidana siber, judi *online*, penyelundupan barang, korupsi (pencegahan dan *asset recovery*), Narkoba, terorisme, Karhutla/LH serta siber termasuk kejahatan TPPO dan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta hindari praktik kekerasan/rekayasa kasus dalam proses penyidikan;
(giat3140,3142,3143,3144,3151,3145,3146,5083,8050,progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2/IKU3/IKU4/MendukungTusi);
- d) meningkatkan kegiatan penegakan hukum terhadap kejahatan perekonomian dibidang pangan, pertanahan, energi, investasi/perbankan (sektor keuangan) dan hindari praktik transaksional dalam penanganan perkara;
(giat3142,3145,5083/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU4/MendukungTusi);
- e) melaksanakan kegiatan penindakan tindak pidana di perairan dalam mendukung kegiatan keamanan laut serta hindari praktik kekerasan dan rekayasa kasus dalam proses penyidikan;
(giat4342/progSidikLidik/SP3/SS2/IKU7/MendukungTusi);
- f) melaksanakan kegiatan penanganan/penindakan tindak pidana dan pelanggaran Lalu Lintas dalam rangka mewujudkan “*Road Safety*” serta penegakkan hukum melalui “*ETLE*” dan tilang manual dengan batasan

ketat untuk menjaga kewibawaan hukum di lokasi yang belum terjangkau sensor;

(giat3133/progHarkamtibmas,4343/progSidikLidik/SP3/SS1/IKU1/SS2/IKU6/MendukungReformasiPolri);

- g) melanjutkan pelaksanaan kegiatan penyelesaian perkara melalui “*Restorative Justice*” yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum namun pada kemanfaatan dan keadilan hindari tawar menawar dan penyalahgunaan dalam penerapan *Restorative Justice (RJ)*;
(giat8050/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU1/IKU2/IKU3/IKU4/IKU5/IKU6/IKU7/MendukungReformasiPolri);
- h) meningkatkan penanganan kejahatan di ruang siber atau *Virtual Police* (Polisi Siber Virtual) yang mengedepankan kualitas serta mengedukasi kepada masyarakat dengan mengedepankan teguran dan edukasi langsung di ruang siber sebelum melakukan penindakan hukum. Jika ditemukan konten yang berpotensi melanggar UU ITE, petugas memberikan peringatan agar konten dihapus;
(giat3151/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2/MendukungTusi);
- i) mengoptimalkan kegiatan penindakan hukum terbatas/ tipiring dalam menjaga Harkamtibmas;
(giat3130/progHarkamtibmas/SP3/SS2/IKU9/MendukungTusi);
- j) meningkatkan dan mempercepat penyelesaian perkara-perkara secara responsif guna memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan menghindari konflik kepentingan dalam penanganan perkara;
(giat3142,3143,3144,3145,3146,3151/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU9/MendukungTusi);
- k) meningkatkan pemberian bantuan teknis penyidikan dalam rangka pengolahan TKP dan pemeriksaan barang bukti guna memperkuat pembuktian ilmiah (*scientific crime investigation*) yang bertujuan untuk

memastikan bahwa setiap bukti fisik dianalisis secara akurat untuk menemukan tersangka dan memberikan kepastian hukum;

(giat3140,3141/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU9/Mendukung Tusi);

- 2) arah bijak: meningkatkan kompetensi penyidik melalui pelaksanaan kegiatan pelatihan dan sertifikasi penyidik guna meningkatkan kualitas dan kemampuan penyidik Polri;

untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- 1) meningkatkan kompetensi penyidik melalui peningkatan kualitas sertifikasi bagi penyidik Polri;

(giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/SP3/SS3/IKP2/Mendukung ReformasiPolri);

- 2) meningkatkan kompetensi pemeriksa melalui peningkatan kualitas dan kemampuan pemeriksa baik *Labfor* dan *Inafis* dalam pengelolaan TKP untuk membuat terang perkara;

(giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/SP3/SS3/IKP2/Mendukung ReformasiPolri);

- 3) arah bijak: meningkatkan dan mewujudkan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam penegakan hukum sebagai langkah prosedur hukum yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral serta memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;

untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) mengoptimalkan pelaksanaan pemberian SP2HP2 kepada pembuat pengaduan masyarakat agar penanganan transparan, masih ditemukan pelacakan perkara/*case tracking* (belum mengikat dan sering tidak diupdate *real time* berpotensi menjadi transparansi semu). SP2HP2 meminimalisir *komplain* dari masyarakat kepada Polri dibidang penegakan hukum dan menjunjung tinggi HAM sebagai

bentuk pelayanan kepada pelapor/korban dan tersangka guna meningkatkan kepercayaan publik;

(giat3137,5086/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU9/MendukungReformasi Polri);

- b) mengoptimalkan peran “waskat” dari atasan penyidik dan peran dari wassidik untuk mengawasi proses penyidikan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menghindari penyidikan yang kurang objektif dan tidak transparan, sehingga berdampak mengikis kepercayaan publik;

(giat5086/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU1/IKU2/IKU3/IKU4/IKU5/IKU6/IKU7/IKU8/MendukungReformasiPolri);

- c) *mengoptimalkan* penggunaan e-manajemen penyidikan (e-MP) dalam mewujudkan sarana pengawasan penyidikan perkara dan transparansi proses pelaporan perkara melalui mekanisme dan *platform* pelaporan terpadu di seluruh Polri yang terintegrasi kedalam SPPTI;

(giat5085,5086/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU9/MendukungReformasi Polri);

- 4) arah bijak: meningkatkan peran adaptifitas penanganan kejahatan Polri melalui pusat analisis tindak kejahatan dipusat data dan informasi kriminal nasional;

untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan transparansi dan efisiensi penanganan perkara melalui SOP dan sistem manajemen kasus yang terintegrasi mencegah perkara mengendap/*underdelay*, tebang pilih, rekayasa perkara dan penyimpangan prosedur;

(giat5084/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU9);

- b) melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan standardisasi data kriminal nasional guna memetakan tingkat kriminalitas di seluruh

wilayah Indonesia (melalui *Integrated Smart Criminal Information System*);

(*giat5084/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU9/MendukungTusi*);

- d. Sasaran Prioritas IV "Meningkatkan SDM Polri yang Adaptif, Kompeten dan Berintegritas melalui Internalisasi Nilai-Nilai Budaya Organisasi" terdiri dari 6 (enam) arah bijak sebagai berikut:
- 1) meningkatkan kualitas hasil lulusan Pendidikan dan Latihan Polri guna mewujudkan SDM Polri yang adaptif, kompeten dan berintegritas, memiliki moralitas serta siap pakai;
 - 2) mengoptimalkan dan mendorong SDM Polri untuk memedomani Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE;
 - 3) meningkatkan kualitas dan kapabilitas SDM Polri yang unggul dan humanis melalui penyelarasan jumlah dan keahlian personel dengan kebutuhan riil Polri di lapangan, serta menyusun ukuran organisasi yang optimal dengan menerapkan "*Strategic Workforce Planning*";
 - 4) meningkatkan dan melanjutkan kerja sama pendidikan di dalam dan luar negeri untuk mencetak personel Polri yang memiliki wawasan global namun tetap mengakar pada nilai-nilai lokal;
 - 5) melaksanakan dan melanjutkan penyempurnaan sistem meritokrasi dan kolaborasi antar fungsi dengan merancang ulang sistem manajemen kinerja secara menyeluruh (termasuk memperkenalkan konsep *shared KPIs* dan *mentorship*) bertujuan untuk menghilangkan ego sektoral (*silo mentality*) dan memastikan promosi jabatan berbasis prestasi objektif;
 - 6) meningkatkan kesejahteraan SDM Polri melalui layanan kesehatan, perumahan dan keselamatan kerja sebagai fondasi utama untuk menciptakan postur Polri yang profesional dan berintegritas.

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: meningkatkan kualitas hasil lulusan Pendidikan dan Latihan Polri guna mewujudkan SDM Polri yang adaptif, kompeten dan berintegritas, memiliki moralitas serta siap pakai;
untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 9 (sembilan) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan kualitas dan mutu hasil dari lulusan diklat Polri yang memiliki moralitas agar sesuai dan relevan dengan kebutuhan dan kemajuan teknologi serta permasalahan kepolisian serta siap menghadapi tantangan tugas Polri kedepan;
(giat5068,5069/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP2/Mendukung ReformasiPolri);
 - b) melaksanakan pelatihan dan sertifikasi bagi lulusan Diklat, gadik/instruktur dan pengasuh dengan kurikulum dan pengetahuan tenaga pendidik terkait perspektif HAM, demokrasi dan lingkungan hidup serta memperhatikan keunggulan kognitif dan daya nalar kritis sebagai standar utama pendidikan;
(giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP2/MendukungReformasiPolri);
 - c) meningkatkan pelaksanaan latihan dan harkatpuan fungsi “*Negotiator dan Dalmas*” yang menjunjung tinggi HAM dalam rangka penanganan konflik secara humanis dengan menghilangkan kultur “*militeristik*”, menghadapi pengamanan event nasional/internasional tahun 2027;
(giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP2/MendukungReformasiPolri);
 - d) meningkatkan dan melanjutkan pelatihan dalam penanganan konflik secara humanis dengan menghilangkan kultur “*militeristik*” bagi anggota Brimob, Samapta dan Binmas yang “Menjunjung Tinggi HAM” dalam rangka menghadapi ancaman gangguan Kamtibmas dan tahapan pengamanan event nasional/internasional tahun 2027;

*(giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/giat3130,5076,5087/
 progHarkamtibmas/SP4/SS1/IKU3/IKU6/SS3/IKP2/MendukungReformasi
 Polri);*

- e) meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM Siber Polda NTB, serta digital forensik yang “Profesional” dalam rangka menghadapi ancaman gangguan Kamtibmas atas kejahatan digital yang semakin canggih dan terorganisir serta mendukung pengamanan event nasional/ internasional tahun 2027;

*(giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/giat3141,3151/progLidikSidik/
 SP4/SS2/IKU1/IKU2/SS3/IKP2/MendukungReformasi Polri);*

- f) meningkatkan jumlah peserta sertifikasi profesi bagi anggota penyidik Reskrim, Ditolairud Polda NTB serta Ditlantas Polda NTB dalam rangka mengantisipasi penerapan KUHP baru;

*(giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP2/Mendukung
 ReformasiPolri);*

- g) meningkatkan pelaksanaan pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah bagi anggota Polri dan ASN Polri guna memaksimalkan waktu yang diperlukan dari waktu persetujuan permintaan pengadaan hingga waktu barang/jasa yang diminta diterima;

*(giat3100/progProfesionalismeSDM/giat4341/progModernisasiAlmatsus
 SarprasPolri/SP4/SS3/IKP2/SS4/IKP2/MendukungReformasiPolri);*

- h) melaksanakan peningkatan kualitas kemampuan kedokteran dan kesehatan serta ketrampilan bagi personel kedokteran kepolisian melalui seminar/workshop;

*(giat3072/progDukma/giat3100/progProfesionalismeSDM/SP4/SS3/IK
 P2/MendukungReformasiPolri);*

- i) meningkatkan kualitas dan kapabilitas para verifikator dan APIP di lingkungan Polri dalam upaya tertib administrasi dan keuangan serta mengurangi dan mencegah terjadinya korupsi;

(*giat3068,3091/progDukma/SP4/SS5/IKP2/MendukungReformasi Polri*);

- 2) arah bijak: mengoptimalkan dan mendorong SDM Polri untuk memedomani Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE;

untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan Polri melalui perubahan budaya kerja dari manual ke digital untuk menciptakan layanan publik Polri yang bersih, transparan, dan akuntabel;

(*giat5052/progDukma/SP4/SS5/IKP1/MendukungReformasiPolri*);

- b) mewujudkan pengembangan SDM dan penerapan model operasional baru yang adaptif di area-area prioritas pelayanan publik Polri, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan Polri yang berkualitas dan terpercaya;

(*giat5053/progDukma/SP4/SS5/IKP4/MendukungReformasiPolri/G.S*);

- 3) arah bijak: meningkatkan kualitas dan kapabilitas SDM Polri yang unggul dan humanis melalui penyelarasan jumlah dan keahlian personel dengan kebutuhan riil Polri di lapangan, serta menyusun ukuran organisasi yang optimal dengan menerapkan “*Strategic Workforce Planning*” (orang yang tepat, dengan keterampilan yang tepat, di posisi yang tepat, dan pada waktu yang tepat);

untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 7 (Tujuh) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) menyempurnakan kapabilitas Polri dengan merevitalisasi strategi rekrutmen proaktif (termasuk mengintegrasikan badan pengembangan *eksternal* dan *internal* sebagai sumber calon personel)

yang mengakomodasi penerimaan Perwira, Bintara, Tamtama dari daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) khususnya putra daerah; (*giat3107/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1/Mendukung ReformasiPolri/G.S*);

- b) melanjutkan untuk menarik minat dan mempertahankan talenta terbaik dengan mendefinisikan dan mengartikulasikan kembali “*Employee Value Proposition*” (EVP) Polri bertujuan agar Polri tetap menjadi pilihan utama untuk mengabdikan diri bagi para talenta terbaik provinsi NTB yang ingin berkarier di jalur kepolisian; (*giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1/MendukungReformasiPolri/G.S*);
- c) melanjutkan dan menyempurnakan sistem pengembangan karir dengan menerapkan *personalized learning* serta rotasi sesuai dengan kebutuhan personel dan organisasi yang lebih menghargai keberagaman bakat dan jalur karier setiap personel guna mewujudkan transformasi menuju *Police 4.0* dalam penyiapan kader pimpinan Polri yang bersih dan bebas dari praktik KKN; (*giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1/MendukungTusi/G.S*);
- d) mengoptimalkan dan menerapkan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel, Humanis (BETAH) dalam pelaksanaan rekrutmen calon anggota Polri serta mengalokasikan rekrutmen PNS Polri yang mengakomodir kelompok berkebutuhan khusus serta berbasis teknologi informasi dengan sistem “*zero growth*” untuk memperoleh calon anggota Polri yang berkualitas, dengan target pemenuhan personel (rekrutmen) tahun 2027 sebanyak Penerimaan Pegawai Negeri pada Polri (PNPP) sebanyak 10.800 orang dengan rincian: Akpol sebanyak 300 orang, SIPSS sebanyak 200 orang, Bintara Polri sebanyak 8.050 orang dan Tamtama Polri sebanyak 1.500 orang serta ASN 750 Orang;

*(giat3107/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1/
 MendukungTusi);*

- e) melaksanakan dan menghindari proses seleksi Dikbang yang diwarnai praktik transaksional serta untuk meningkatkan kompetensi SDM Polri tahun 2027 terdiri dari: Sespimti 180 orang, Sespimmen 250 orang, SPPK (Susjemenstra) 75 orang, S3 STIK-PTIK 15 orang, S2 STIK-PTIK 30 orang, S1 STIK-PTIK 230 orang, Sespimma 250 orang, Sekolah Inspektur Polisi (SIP) 3.000 orang, Pendidikan Alih Golongan (PAG) 1.000 orang, Sekolah Bintara Polisi (SBP) 1.000 orang, UDKP/I PNS 300 orang, PKN II 70 orang, PKA 120 orang, PKP 120 orang, Dikbangspes 27.192 orang;

*(giat3107/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1/
 MendukungTusi);*

- f) melaksanakan kegiatan seleksi Dikbangum dengan menggunakan dan memperhatikan penilaian 13 komponen serta membangun sistem penilaian kompetensi personel Polri secara objektif guna menjamin transparansi dan objektivitas (bebas KKN) dalam mencetak calon pimpinan Polri;

*(giat3107/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1/
 MendukungReformasiPolri);*

- g) melaksanakan kegiatan pengelolaan SDM secara profesional guna menyiapkan pimpinan Polri yang adaptif untuk menjadi teladan, melayani dan transformatif tujuannya adalah memastikan transisi manajerial di tubuh kepolisian menghasilkan sosok pemimpin yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki karakter kuat;

*(giat3104/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1/
 MendukungTusi/G.S);*

- 4) arah bijak: meningkatkan dan melanjutkan kerja sama pendidikan di dalam dan luar negeri untuk mencetak personel Polri yang memiliki wawasan global namun tetap mengakar pada nilai-nilai lokal;

untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) melaksanakan dan melanjutkan rintisan dan perpanjangan MoU strategi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Polri melalui perluasan jaringan pendidikan, baik di tingkat nasional maupun internasional;

(giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP2/Mendukung Tusi);

- b) meningkatkan dan melanjutkan kerjasama dengan Lembaga/ Asosiasi sertifikasi guna memastikan bahwa personel kepolisian maupun mitra keamanan (Satpam/Polsus) memiliki kredensial yang diakui tidak hanya oleh kepolisian, tetapi juga oleh standar industri nasional dan internasional.

(giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/giat3120,3122/progHarkamtib mas/SP4/SS1/IKU8/SS3/IKP2/MendukungTusi);

- c) melaksanakan kerja sama dengan *stakeholder* terkait dalam penerimaan dan seleksi pegawai negeri pada Polri secara proaktif, Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) serta *clear and clean* dengan menggunakan *Computer Asisted Test (CAT)* di tingkat Polda guna menjamin kualitas SDM Polri dimasa depan;

(giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1/Mendukung ReformasiPolri);

- 5) arah bijak: melaksanakan dan melanjutkan penyempurnaan sistem meritokrasi dan kolaborasi antar fungsi dengan merancang ulang sistem manajemen kinerja secara menyeluruh (termasuk memperkenalkan konsep *shared KPIs* dan *mentorship*) bertujuan untuk menghilangkan ego sektoral (*silo mentality*) dan memastikan promosi jabatan berbasis prestasi objektif;

untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) melanjutkan penyempurnaan standard penilaian kompetensi dan memberikan kredit/poin dalam sistem manajemen penilaian kinerja berdasarkan spesifikasi penugasan dan wilayah serta meningkatkan *“sistem reward and punishment”* dan menciptakan sistem Manajemen SDM Berbasis Kinerja yang lebih adil dan kompetitif di tubuh Polri. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa setiap tetes keringat dan keahlian personel dihargai sesuai dengan tingkat kesulitan tugasnya melalui sistem *reward* terhadap kualifikasi personel Polri yang mampu mengaktualisasi diri lebih baik dalam keilmuan dan kehidupan masyarakat;
(giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1/MendukungReformasiPolri/G.S);
- b) memedomani sistem manajemen penilaian kompetensi Polri (kompetensi teknis, kompetensi kepemimpinan dan kompetensi etik) yang komprehensif denham memperhatikan meritokrasi melingkupi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi guna mendukung *“program manajemen talenta”*;
(giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1);
- c) mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja *online* dengan SIPP guna menerapkan Mutasi dan Promosi yang menerapkan Merit System (berbasis pada penilaian kinerja, integritas dan rekam jejak), *Merit System* dalam manajemen pembinaan karier ialah dalam rangka memberikan kesempatan yang sama dalam berkarya;
(giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1);
- d) meningkatkan jumlah assesor sertifikasi kompetensi bidang Satpam dan Polsus guna memperkuat profesionalisme personel pengamanan swakarsa dan kepolisian khusus;
(giat3100,3108/progProfesionalismeSDMPolri/giat5076/progHarkamtibmas/SP4/SS1/IKU2/SS3/IKP1/IKP2/Mendukung Reformasi Polri);

- 6) arah bijak: meningkatkan kesejahteraan SDM Polri melalui layanan kesehatan, perumahan dan keselamatan kerja sebagai fondasi utama untuk menciptakan postur Polri yang profesional dan berintegritas; untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat 5 (lima) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan pelayanan administrasi berkaitan dengan berfokus pada integrasi data digital dan perluasan akses fasilitas kesehatan atas akses BPJS dan Asuransi Jamkestama bagi anggota Polri dan masyarakat;
(giat3072/progDukma/giat3105/ProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1);
 - b) mengoptimalkan pelayanan yang responsif dalam pemberian tanda kehormatan kepada pegawai pada Polri yang gugur/tewas dalam tugas menumbuhkan budaya melayani yang non diskriminasi dan *user friendly* melalui transformasi budaya ini, Polri menargetkan penguatan integritas dan kepercayaan publik di tahun 2027 dengan menonjolkan sisi kemanusiaan institusi;
(giat3072/progDukma/giat3105/ProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1/MendukungTusi);
 - c) meningkatkan pelayanan administrasi pegawai yang adaptif bagi anggota Polri, menumbuhkan budaya melayani yang nondiskriminasi dan *user friendly* termasuk berkaitan dengan ASABRI, fokus utama dalam bidang ini adalah transformasi digital pada layanan ASABRI guna memberikan kemudahan akses tanpa batasan birokrasi;
(giat3105/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1/MendukungTusi);
 - d) melanjutkan kegiatan peningkatan standard akreditasi rumah sakit Bhayangkara melalui Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) merupakan komitmen Polri untuk memberikan layanan medis

kelas satu bagi anggota dan masyarakat umum. Fokus utamanya adalah memastikan keselamatan pasien (*patient safety*) dan kualitas asuhan medis yang terukur;

(*giat3072/progDukma/SP4/SS4/IKP4/MendukungTusi*);

- e) mengoptimalkan layanan kesehatan mental/konseling psikologis guna mengatasi beban kerja yang tinggi serta tekanan tugas dilapangan yang besar serta berisiko memicu perilaku agresif atau kasus ekstrem, berfokus pada perawatan kesehatan mental preventif untuk memastikan personel Polri tetap tangguh secara emosional meskipun berada di lingkungan yang penuh tekanan. Tujuannya adalah untuk mengurangi "*burn out*" dan mencegah insiden agresi atau bunuh diri yang disebabkan oleh stres kerja.

(*giat3110/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1/*

MendukungTusi);

- e. Sasaran Prioritas V "Meningkatkan Infrastruktur Teknologi Kepolisian yang Modern guna Mendukung Pelaksanaan Tugas dengan Memanfaatkan *Big Data* dan *AI*" terdiri dari 6 (enam) arah bijak sebagai berikut:

- 1) meningkatkan keselarasan TI dengan organisasi melalui penyempurnaan dan penerapan arsitektur TI Polri (*IT Enterprise Architecture*) yang modern guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan penyelarasan antara strategi pelayanan Kepolisian dengan teknologi digital; (G.S)
- 2) mendorong dan meningkatkan pemenuhan Almatsus Polri melalui peran Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) dan industri swasta nasional sebagai langkah krusial untuk mewujudkan kemandirian pertahanan dan keamanan dalam negeri;
- 3) meningkatkan pemenuhan rumah dinas pegawai Polri untuk meningkatkan kesejahteraan serta pembangunan fasilitas perkantoran/gudang dan mendorong secara aktif pembangunan rumah dinas termasuk di wilayah

- perbatasan, difokuskan pada percepatan pembangunan fisik dan integrasi dengan program nasional;
- 4) melanjutkan kegiatan pengembangan laboratorium forensik di kewilayahan secara bertahap bertujuan untuk mewujudkan Investigasi Kejahatan Ilmiah (SCI), memastikan bahwa kasus kriminal diselesaikan berdasarkan bukti fisik yang tak terbantahkan, bukan hanya pengakuan;
 - 5) melanjutkan kegiatan pengembangan Almatsus SCI sebagai strategi besar Polri untuk transisi dari pola penyidikan konvensional menuju pembuktian berbasis ilmiah yang tidak terbantahkan di persidangan;
 - 6) mengoptimalkan dan membangun kemampuan digital dengan mengembangkan Data, *Digital Platform and Software (DDPS)* bertujuan mengintegrasikan ribuan aplikasi kepolisian yang sebelumnya terpisah (kumpulan data) ke dalam ekosistem yang terintegrasi dalam Satu Data Polri. (G.S).

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: meningkatkan keselarasan TI dengan organisasi melalui penyempurnaan dan penerapan arsitektur TI Polri (*IT Enterprise Architecture*) yang modern guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan penyelarasan antara strategi pelayanan kepolisian dengan teknologi digital; (G.S)
untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 12 (tiga belas) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) melanjutkan kegiatan pembangunan ruang RPK di Polres dan Polsek sesuai layanan yang ramah (ruang aman/ruang ramah anak, privasi) yang terintegrasi secara *online*;
(*giat5062/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/giat3071/progDukma/SP 5/ SS4/IKP2/MendukungTusi*);
 - b) pemenuhan almatsus Polri yang modern berbasis teknologi informasi guna mendukung kesiapan operasional yang berorientasi pada kebutuhan wilayah maupun kebutuhan satker dalam rangka

penanganan penyelidikan, pengindraan, ungkap kasus, pengamanan unjuk rasa, konflik sosial, lawan insurgensi serta pemeliharaan keamanan peralatan pendukung tugas yang bersifat layanan kepada masyarakat;

(giat3084,5060/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP2/MendukungReformasiPolri);

- c) mengoptimalkan pemenuhan peralatan dan materiil registrasi dan identifikasi fungsi lalu lintas yang berbasis teknologi serta melanjutkan pembangunan BPKB dan STNK *online* sesuai layanan yang ramah;

(giat3084,5060/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/giat3133/progHarkamtibmas/SP5/SS4/IKP2/MendukungReformasiPolri);

- d) melanjutkan kegiatan pengembangan Pembangunan provinsi NTB *Safety Driving Center* di kewilayahan;

(giat5060,5062/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/giat3133/progHarkamtibmas/SP5/SS4/IKP2/MendukungTusi);

- e) meningkatkan kualitas pembangunan RTMC/TMC di kewilayahan;

(giat5060,5062/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/giat3133/progHarkamtibmas/SP5/SS4/IKP2/MendukungTusi);

- f) mengoptimalkan pemasangan *ETLE* guna mendukung penegakan hukum secara transparan di jalan raya sebagai langkah strategis untuk mewujudkan transparansi dan keadilan dalam penegakan hukum lalu lintas;

(giat3084,5060/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/giat3133/progHarkamtibmas/SP5/SS4/IKP2/MendukungReformasiPolri);

- g) mengoptimalkan Faskes dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan, baik di tingkat pusat maupun wilayah serta memberikan layanan kesehatan yang prima kepada anggota Polri dan masyarakat umum sesuai layanan yang ramah dengan fokusnya adalah menciptakan sistem kesehatan yang inklusif, merata, dan humanis;

(giat5060,5062/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP2);

- h) meningkatkan dan mengembangkan pembangunan sistem komunikasi di wilayah perbatasan, pulau terluar dan wilayah rawan bencana agar terkoneksi dalam menjaga Harkamtibmas, yang merupakan langkah strategis dalam Ketahanan Komunikasi Nasional untuk memastikan tidak ada wilayah yang terisolasi (*blank spot*), terutama di titik-titik krusial kedaulatan negara;
 (giat3084,5060/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/giat5055/progDukma / SP5/SS4/IKP2/MendukungTusi);
 - i) melanjutkan kegiatan pemetaan terhadap rencana kebutuhan Alpalkam dan Almatsus Polri terkini (*MEPE*) guna memastikan pengadaan peralatan didasarkan pada skala prioritas dan karakteristik wilayah;
 (giat5060/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/giat5051/progDukmaSP5 / SS4/IKP2/SS5/IKP1/MendukungTusi/G.S);
 - j) pemenuhan peralatan penanganan awal/pasca bencana, Karhutla dan banjir sesuai dengan karakteristik wilayah dalam rangka *backup* wilayah dan pertolongan pertama;
 (giat3084,5060/progModernisasiSarprasPolri/SP5/SS4/IKP2/Mendukung Tusi); (RPJMN)
 - k) pemenuhan Almatsus Polri berbasis kendaraan listrik guna mendukung program pemerintah di bidang energi hijau;
 (giat3084/progModernisasiSarprasPolri/SP5/SS4/IKP2/Mendukung Tusi); (RPJMN)
 - l) pemenuhan Almatsus/Alpakam untuk digunakan dalam pengamanan nasional/internasional 2027, perbatasan dan destinasi wisata;
 (giat3084/progModernisasiSarprasPolri/SP5/SS4/IKP2/Mendukung Tusi); (RPJMN)
- 2) arah bijak: mendorong dan meningkatkan pemenuhan Almatsus Polri melalui peran Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) dan Industri

Swasta Nasional sebagai langkah krusial untuk mewujudkan kemandirian pertahanan dan keamanan dalam negeri;

untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) melanjutkan kerja sama dalam pembuatan *prototype* dengan BUMNIS dan Industri Swasta Nasional (ISN), fokusnya adalah menjembatani Riset/Litbang Polri dengan kemampuan manufaktur nasional untuk menghasilkan peralatan Polri yang sah secara hukum dan teknis sesuai standardisasi dan sertifikasi Alpalkam dan Almatsus Polri;
(giat5060/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP3/MendukungTusi);
 - b) meningkatkan dan memperhatikan penggunaan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam setiap pelaksanaan pengadaan Almatsus dan Alsus Polri merupakan komitmen terhadap nasionalisme ekonomi dan kemandirian teknologi keamanan. Mengutamakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pengadaan Alat Material Khusus (Almatsus) dan Alat Khusus Polri (Alsus) bukan sekadar aturan administratif, melainkan strategi kedaulatan;
(giat4341/progModernisasiAlmasusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP2/MendukungTusi);
- 3) arah bijak: meningkatkan pemenuhan rumah dinas pegawai Polri untuk meningkatkan kesejahteraan serta pembangunan fasilitas perkantoran/gudang dan mendorong secara aktif pembangunan rumah dinas termasuk di wilayah perbatasan, difokuskan pada percepatan pembangunan fisik dan integrasi dengan program nasional;
- untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan pembangunan fasilitas pergudangan, rumah dinas, flat/mess, barak siaga dan Rusun bagi personel Polri guna meningkatkan kesejahteraan, dengan fokus utamanya adalah

- mengurangi beban ekonomi anggota dan memastikan kesiapan operasional satuan;
(giat5062/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP2/MendukungTusi/RPJMN);
- b) mengoptimalkan pembangunan rumah sakit atau layanan kesehatan lainnya (FKTP/Poliklinik) yang dekat dengan personel dan masyarakat guna mendukung “Sistem Kesehatan Nasional” Fokusnya adalah mendekatkan layanan medis berkualitas ke titik terdekat personel dan pemukiman warga;
(giat5062/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP2/MendukungTusi/RPJMN);
- c) melanjutkan pembangunan fasilitas layanan kepolisian baik perkantoran (Polres/Polsek/Subsektor) sesuai layanan yang ramah (ruang aman/ruang ramah anak, privasi) serta mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan secara selektif prioritas dan berkelanjutan fokus pembangunan diarahkan pada standar pelayanan inklusif;
(giat5062/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP2/MendukungRPJMN);
- 4) arah bijak: melanjutkan kegiatan pengembangan laboratorium forensik di kewilayahan secara bertahap bertujuan untuk mewujudkan Investigasi Kejahatan Ilmiah (SCI), memastikan bahwa kasus kriminal diselesaikan berdasarkan bukti fisik yang tak terbantahkan, bukan hanya pengakuan;
untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melaksanakan pemetaan laboratorium forensik berdasarkan skala prioritas kebutuhan dalam pemenuhan sarana prasarana guna mendukung penegakan hukum yang didasarkan pada pembuktian berbasis ilmiah (*Scientific Crime Investigation*) yang akurat dan cepat di wilayah provinsi NTB;

(*giat3141/progLidikSidik/giat5062/progModernisasiAlmatsus SarprasPolri/SP5/SS4/IKP2/MendukungTusi*);

- b) melanjutkan pemenuhan bangunan laboratorium forensik beserta dukungan rumah dinasnya di tingkat kewilayahan dalam rangka mendukung percepatan pengungkapan kasus tindak pidana yang merupakan langkah krusial untuk mewujudkan penyidikan berbasis ilmiah (*Scientific Crime Investigation*) yang cepat dan akurat di provinsi NTB;

(*giat5062/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP2/MendukungTusi*);

- 5) arah bijak: melanjutkan kegiatan pengembangan Almatsus SCI sebagai strategi besar Polri untuk transisi dari pola penyidikan konvensional menuju pembuktian berbasis ilmiah yang tidak terbantahkan di persidangan; untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat strategi yang akan dilakukan yaitu:

- melaksanakan kegiatan pemetaan dan pemenuhan peralatan laboratorium forensik dan sidik jari dengan teknologi terkini dengan fokusnya adalah mempercepat identifikasi pelaku dan barang bukti melalui digitalisasi dan otomatisasi data;

(*giat3140/progSidikLidik/giat3084/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP4/MendukungTusi*);

- 6) arah bijak: mengoptimalkan dan membangun kemampuan digital dengan mengembangkan *Data, Digital Platform and Software (DDPS)* bertujuan mengintegrasikan ribuan aplikasi kepolisian yang sebelumnya terpisah (kumpulan data) ke dalam ekosistem yang terintegrasi dalam Satu Data Polri.

untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) melaksanakan pemetaan dan hasil kajian Satu Data Polri untuk pengadaan sistem informasi kepolisian secara bertahap yang

terintegrasi bertujuan untuk menciptakan ekosistem data kepolisian yang akurat, terpadu, dan dapat dibagipakaikan antar-satuan kerja;

(giat3084/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP2/MendukungReformasiPolri);

- b) meningkatkan kemudahan dan reliabilitas tindak lanjut pengaduan masyarakat (melalui, *Hotline, Police Superapp, Whatsapp For Business*, dan lain-lain) serta penataan infrastruktur layanan darurat/hotline kepolisian secara bertahap dengan nomor tunggal dalam rangka merespon dengan cepat pengaduan masyarakat. Langkah ini merupakan bagian dari transformasi *Digital Proactive Policing* yang bertujuan memangkas birokrasi pelaporan dan mempercepat *response time* petugas di lapangan;

(giat5055/progDukma/giat5062/progModernisasiAlmatsus SarprasPolri/SP5/SS4/IKP2/SS5/IKP4MendukungReformasiPolri);

- c) meningkatkan kegiatan pengembangan teknologi kepolisian dan sistem informasi berdasarkan hasil penelitian/kajian yang telah dilaksanakan dan Polri tidak lagi membeli atau membangun teknologi hanya berdasarkan tren, tetapi berdasarkan data dan kajian berdasarkan kebutuhan riil di lapangan;

(giat3084/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/giat5067/progDukma /SP5/SS4/IKP3/MendukungReformasiPolri).

- f. Sasaran Prioritas VI “Meningkatkan Tata Kelola dan Model Operasional Organisasi” terdiri dari 6 (enam) arah bijak sebagai berikut:

- 1) meningkatkan kegiatan penguatan penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis *Online* melalui *Redesain* interaksi kepolisian dan masyarakat kegiatan mencerminkan transformasi *Digital Humanism* dalam tubuh Polri. Fokusnya bukan sekadar memindahkan pengaduan ke aplikasi, tetapi merombak total pengalaman masyarakat saat berinteraksi dengan Polisi di ruang digital agar lebih setara, transparan, dan solutif; (G.S)

- 2) meningkatkan kegiatan Saber Pungli di lingkungan internal Polri guna menjadi instrumen vital dalam program "Polri Presisi" untuk memulihkan dan menjaga kepercayaan publik (*Public Trust*) Polri di tengah masyarakat;
- 3) melanjutkan dan meningkatkan kegiatan pencegahan korupsi di internal Polri dalam rangka *Good Government and Clean Governance* melalui transformasi pengawasan internal yang lebih sistematis dan berbasis teknologi;
- 4) meningkatkan tata kelola dari sistem manajemen kinerja, perencanaan, penganggaran dan keuangan Polri yang transparan dan akuntabel guna menghilangkan sekat-sekat birokrasi antara perencanaan (*Planning*) dan realisasi anggaran (*Spending*) agar setiap anggaran yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara publik;
- 5) melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan dan tata laksana Polres, Polsek dan Polsubsektor serta penguatan struktur organisasi Polri agar lebih efektif dan efisien langkah strategis ini untuk menciptakan organisasi yang adaptif terhadap dinamika keamanan modern, kebijakan ini difokuskan pada penguatan struktur di tingkat Kecamatan serta sinkronisasi organisasi dengan wilayah administrasi negara yang terbaru;
- 6) meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi Polri antara lain melalui pembangunan zona integritas, peningkatan indeks pelayanan publik, peningkatan pelayanan publik ramah kelompok rentan, penciptaan inovasi, pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan strategi pelayanan publik guna mewujudkan institusi yang bersih, akuntabel, dan melayani. Fokus utama strategi ini adalah mengubah budaya kerja dari "dilayani" menjadi "melayani" dengan standar internasional;

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: meningkatkan kegiatan penguatan penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis *Online* melalui redesain interaksi kepolisian dan masyarakat kegiatan mencerminkan transformasi *Digital Humanism* dalam tubuh Polri. Fokusnya bukan sekadar memindahkan

pengaduan ke aplikasi, tetapi merombak total pengalaman masyarakat saat berinteraksi dengan Polisi di ruang digital agar lebih setara, transparan, dan solutif; (G.S)

untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) mengoptimalkan kegiatan klarifikasi penanganan pengaduan masyarakat secara terpadu yang berbasis TI merupakan langkah Polri untuk memastikan setiap keluhan warga tidak hanya diterima, tetapi ditindaklanjuti secara transparan dan terukur;

(giat3089,3091/progDukma/SP6/SS5/IKP7/MendukungReformasi Polri);

- b) mengoptimalkan dan menyempurnakan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara *Online* difokuskan pada penguatan aspek transparansi, kecepatan respons dan integrasi antar-lembaga. Upaya ini bertujuan untuk memastikan setiap keluhan ditangani secara terukur dan profesional;

(giat3089,3091/progDukma/SP6/SS5/IKP7/MendukungReformasi Polri);

- c) meningkatkan percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawas *eksternal* dengan berbasis TI yang diteruskan oleh pengawas eksternal seperti Kompolnas, Ombudsman RI, Komnas HAM, dan DPR RI;

(giat3089,3091/progDukma/SP6/SS5/IKP7/MendukungReformasi Polri);

- 2) arah bijak: meningkatkan kegiatan Saber Pungli di lingkungan internal Polri guna menjadi instrumen vital dalam program "Polri Presisi" untuk memulihkan dan menjaga kepercayaan publik (*Public Trust*) Polri ditengah masyarakat;

untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 6 (enam) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan kegiatan sinergisitas dari Pokja Satgas Saber Pungli, Pokja UPP K/L dan Pokja UPP Pemda dalam memberantas pungli serta pelaporan yang terintegrasi difokuskan pada pengintegrasian sistem pelaporan antara pusat dan daerah guna menciptakan ekosistem pengawasan yang tanpa celah;
(*giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKP5/MendukungTusi*);
- b) mendorong pelayanan publik secara *Online* yang bersih, transparan dan akuntabel berbasis *Hotline, Police Superapp, Police Website*, dan *Social Media*, Polri mendorong transformasi digital untuk menciptakan ekosistem pelayanan publik yang bersih (bebas pungli), transparan (proses terpantau), dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan);
(*giat3091,3149/progDukma/SP6/SS5/IKP5/MendukungReformasi Polri*);
- c) melaksanakan kerja sama dengan *Stakeholder* terkait dalam pencegahan Pungli dan Polri memperkuat sinergi lintas sektoral untuk menutup celah pungutan liar (Pungli) melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan (*Stakeholders*). Fokus utamanya adalah membangun ekosistem pelayanan publik yang sistemik dan nirmonitor (tidak bergantung pada kehadiran fisik petugas);
(*giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKP5/MendukungTusi*);
- d) melaksanakan kegiatan pengamanan (kegiatan, Personel, Baket) dalam rekrutmen pendidikan pembentukan: Bintara, Akpol dan SIPSS guna menghindari rekrutmen masih diwarnai transaksional/ menggunakan uang;
(*giat3089,3090/progDukma/SP6/SS5/IKP5*);
- e) melaksanakan pengamanan kegiatan Personel, Baket terkait Pendidikan Pengembangan: SIP, Sespima, Sespimmen/PKN Tingkat 2, Sespimti/Lemhanas dan PKN Tingkat 1 merupakan bagian integral dari Rencana Kerja (Renja) Polri untuk menjamin proses seleksi dan operasional pendidikan berjalan secara objektif dan transparan;

(giat3089,3090/progDukma/SP6/SS5/IKP5/MendukungReformasi Polri);

- f) melaksanakan “operasi bersih” di internal dan di sentra pelayanan publik Polri baik terkait penanganan perkara pidana dan pelayanan publik (SIM, STNK,BPKB, SKCK) untuk memberantas praktik Pungli, penyalahgunaan wewenang, dan makelar kasus.

(giat3089,3090/progDukma/SP6/SS5/IKP5/MendukungReformasi Polri);

- 3) arah bijak: melanjutkan dan meningkatkan kegiatan pencegahan korupsi di internal Polri dalam rangka *Good Government and Clean Governance* melalui transformasi pengawasan internal yang lebih sistematis dan berbasis teknologi;

untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) mengoptimalkan layanan aduan melalui aplikasi *whistle blowing system*, serta meningkatkan peran serta dari seluruh anggota sebagai pengawas dan pemberi informasi terkait dugaan korupsi di tubuh Polri, Serta bersinergi dan berkolaborasi dengan lembaga pemeriksa *eksternal* serta aparat penegak hukum lainnya dalam upaya pencegahan korupsi;

(giat3089,3090,3091/progDukma/SP6/SS5/IKP5);

- b) mendorong kegiatan kepatuhan terhadap implementasi dari Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai langkah krusial untuk mewujudkan Polri yang bersih dan bebas dari korupsi;

(giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKP5/MendukungTusi);

- 4) arah bijak: meningkatkan tata kelola dari sistem manajemen kinerja, perencanaan, penganggaran dan keuangan Polri yang transparan dan akuntabel guna menghilangkan sekat-sekat birokrasi antara perencanaan (*planning*) dan realisasi anggaran (*spending*) agar setiap anggaran yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara publik;
untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat 5 (lima) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan pelaksanaan kegiatan *monitoring* dan evaluasi dalam perencanaan dan penganggaran Satker agar lebih efektif dan efisien dalam menjalankan program dan kegiatan guna menghadapi kebijakan efisiensi anggaran, penguatan Monev difokuskan pada sinkronisasi antara perencanaan (RKA Satker) dan realisasi anggaran untuk mencapai target kinerja yang akuntabel;
(*giat4339/progDukma/SP6/SS5/IKP6/MendukungTusi*);
 - b) meningkatkan sinergitas dalam penyusunan kebutuhan Polri diaplikasi E-Jakstra guna menyusun produk perencanaan dan penganggaran Polri secara *Bottom Up* (Domren Kapolri, Rancangan Renja Polri dan Renja Polri) agar selaras pembangunan di wilayah hukum Polda NTB dan semakin berkualitas;
(*giat5051/progDukma/SP6/SS5/IKP1*);
 - c) meningkatkan koordinasi, sinergi serta komitmen antara fungsi Pengawasan, fungsi Perencanaan, fungsi Logistik, fungsi Keuangan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku penanggungjawab tata kelola keuangan tingkat Satker;
(*giat3068,3091,4339,5054/progDukma/SP6/SS5/IKP6*);
 - d) melaksanakan kegiatan *Monitoring* dan evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Polri Semester dan Tahunan untuk memastikan kualitas belanja yang akuntabel dan efisien, fokus Monev diarahkan pada penguatan tata kelola keuangan melalui aplikasi digital dan koordinasi intensif antar Satker;

(*giat3068,3091,4339/progDukma/SP6/SS5/IKP6/MendukungTusi*);

- e) melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja dan anggaran di bidang pembinaan dan operasional guna mencegah adanya pemotongan anggaran pada tingkat Polres dan Polsek;

(*giat3068,4339,3091,5054/progDukma/SP6/SS5/IKP6/Mendukung ReformasiPolri*);

- 5) arah bijak: melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan dan tata laksana Polres, Polsek dan Polsubsektor serta penguatan struktur organisasi Polri agar lebih efektif dan efisien langkah strategis ini untuk menciptakan organisasi yang adaptif terhadap dinamika keamanan modern, kebijakan ini difokuskan pada penguatan struktur di tingkat Kecamatan serta sinkronisasi organisasi dengan wilayah administrasi negara yang terbaru; untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) melanjutkan *Monev* atas pemenuhan satu Kecamatan satu Polsek secara bertahap serta *Monev* hasil efektivitas mengubah kewenangan Polsek hanya untuk Harkamtibmas pada daerah tertentu (tidak melakukan penyidikan) penyesuaian kewenangan Polsek merupakan bagian dari program prioritas Polri untuk memperkuat pelayanan di lini terdepan (*Frontline Services*);

(*giat5052/progDukma/SP6/SS5/IKP1/MendukungTusi*);

- b) melanjutkan dan memonitor penguatan organisasi satuan kewilayahan sesuai dengan situasi Kamtibmas dan perkembangannya;

(*giat4339,5052/progDukma/SP6/SS5/IKP1/MendukungTusi*);

- c) penyempurnaan kaitan ABK dan DSPP serta peraturan tentang SOTK tingkat Polda, Polres, Polsek dan Polsubsektor serta menyusun kesiapan pembentukan Satwil melalui penyempurnaan instrumen manajemen SDM dan struktur organisasi merupakan langkah strategis Polri untuk menghadapi dinamika tugas;

(*giat5052/progDukma/SP6/SS5/IKP1/MendukungTusi*);

- 6) arah bijak: meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi Polri antara lain melalui pembangunan zona integritas, peningkatan indeks pelayanan publik, peningkatan pelayanan publik ramah kelompok rentan, penciptaan inovasi, pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan strategi pelayanan publik guna mewujudkan institusi yang bersih, akuntabel, dan melayani. Fokus utama strategi ini adalah mengubah budaya kerja dari "dilayani" menjadi "melayani" dengan standar internasional; untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat 8 (delapan) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan Bimtek kepada unit penyelenggara pelayanan publik di seluruh unit kerja Polri dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan strategi pelayanan publik melalui kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP), kegiatan ini menjadi kunci dalam mencapai predikat Pelayanan Prima (Nilai A) guna mewujudkan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien, akuntabel, humanis dan bebas dari korupsi;
(giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP4/MendukungTusi);
 - b) melaksanakan kegiatan asistensi penyelenggaraan pelayanan Publik di seluruh unit pelayanan publik Polri pada Polda/Polres/Polresta merupakan kegiatan strategis untuk memastikan standar pelayanan terpenuhi demi meningkatkan Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan kepercayaan masyarakat;
(giat5053/progDukmaSP6/SS5/IKP4/MendukungReformasiPolri);
 - c) melaksanakan bimbingan dalam keikutsertaan inovasi Polri yang memenuhi syarat ke ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) serta Pemantauan dan Keberlanjutan Replikasi Inovasi (PKRI) pelayanan publik merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi Polri sebagai institusi yang adaptif dan modern;
(giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP4/MendukungTusi);

- d) peningkatan kualitas pelayanan publik Polri melalui penyeragaman nomenklatur unit-unit pelayanan publik Polri merupakan langkah strategis untuk menciptakan standardisasi identitas (*Branding*) dan mempermudah masyarakat dalam mengenali serta mengakses layanan Polri di wilayah hukum Polda NTB;
(*giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP4/MendukungReformasiPolri*);
- e) peningkatan kualitas pelayanan publik Polri melalui penyediaan unit pelayanan publik yang ramah kelompok rentan, Polri berkomitmen menyediakan fasilitas yang inklusif bagi penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan anak-anak di seluruh unit layanan (Satpas, Samsat, SPKT, dan SKCK);
(*giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP4/MendukungTusi*);
- f) melanjutkan dan meningkatkan kegiatan asistensi pembangunan zona integritas kepada Satker/Satwil di lingkungan Polri yang berfokus pada keberlanjutan kualitas pelayanan dan integritas riil, bukan sekadar pemenuhan administrasi guna meningkatkan jumlah capaian Satker/Satwil berpredikat WBK dan WBBM;
(*giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP4/MendukungTusi*);
- g) memberikan asistensi dan bimbingan teknis untuk mendorong capaian jumlah unit kerja berpredikat WBK dan WBBM yang berfokus pada transformasi nyata, bukan sekadar pemenuhan dokumen administrasi;
(*giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP4/MendukungTusi*);
- h) sebagai *quality insurence* dengan melaksanakan *assessment* terhadap seluruh unit kerja yang sudah berpredikat baik WBK dan WBBM agar tetap mempertahankan dan meningkatkan predikat pembangunan zona integritas baik WBK dan WBBM, Satker yang ditemukan mengalami penurunan kinerja akan diberikan rekomendasi perbaikan dengan tenggat waktu tertentu. Jika tidak ada perbaikan, Satker tersebut berisiko diusulkan untuk pencopotan predikat oleh Tim Penilai Nasional.
(*giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP4/MendukungTusi*).

4. Arah kebijakan dan strategi Polres Lombok Barat tahun 2027

a. Sasaran Prioritas I "Meningkatkan Sinergisitas Polisi, Masyarakat dan Stakeholder dalam rangka Mendukung Keamanan dan Ketertiban Masyarakat secara Proaktif" terdiri dari 12 (dua belas) arah bijak sebagai berikut:

- 1) meningkatkan kolaborasi dan kinerja Polri sebagai bagian dari penguatan fungsi intelijen dalam melaksanakan deteksi aksi di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan lingkungan dalam negeri guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mendukung pemeliharaan keamanan dalam negeri;
- 2) meningkatkan peran deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan lingkungan dalam negeri melalui mengoptimalkan pengumpulan data inteljen;
- 3) mengendalikan ancaman gangguan Kamtibmas dan potensi kejahatan serta aksi terorisme melalui langkah-langkah proaktif yang dirancang untuk mengidentifikasi dan menangani risiko secara cepat dan tepat;
- 4) meningkatkan dan melanjutkan kegiatan "Pemolisian Prediktif" dalam rangka harkamtibmas guna menciptakan suasana kondusif di tengah masyarakat (Cooling System) dengan melibatkan peran aktif dari masyarakat;
- 5) meningkatkan "kehadiran Polisi" dalam penanganan konflik di tengah masyarakat secara humanis;
- 6) meningkatkan "kehadiran Polisi" dalam kegiatan Kamseltibcarlantas kepada masyarakat guna memberikan rasa aman saat berkendara, terjadi kemacetan dan saat pada jam rawan kejahatan;
- 7) meningkatkan peran aktif dan "kehadiran Polisi" di tengah masyarakat baik di wilayah bencana dan "slum area";
- 8) melaksanakan tahapan pengamanan kegiatan event nasional/internasional tahun 2027;

- 9) melaksanakan "Kehadiran Polisi" di kewilayahan untuk pengamanan unjuk rasa, penanganan konflik sosial dan menjalin sinergisitas dengan stakeholder terkait penanganan gangguan keamanan dan bencana;
- 10) meningkatkan kerja sama Kepolisian dalam/luar negeri guna mendukung Harkamtibmasdan Gakkum;
- 11) melaksanakan "Kehadiran Polisi" dalam penggelaran kegiatan patroli kapal dan pesawat udara Polri di seluruh wilayah Indonesia guna mendukung kegiatan keamanan laut;

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut::

- 1) arah bijak : penguatan politik, meningkatkan kolaborasi dan kinerja Polri sebagai bagian dari fungsi ekonomi , i intelijen dalam melaksanakan deteksi aksi di bidang sosial budaya, teknologi dan lingkungan dalam negeri guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam negeri:

untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan kegiatan deteksi aksi secara efektif dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat meliputi: deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini dari fungsi intelijen keamanan Polri melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan, penggalangan dan kontra intelijen yang mampu mendukung operasional fungsi kepolisian baik terhadap potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata serta menurunkan dan mengeliminasi setiap potensi gangguan keamanan dan konflik sosial ditengah masyarakat;
(giat 3112, 3114, 3115, 3116, 3117, 3128 / prog Harkamtibmas / SP1 / SS1 / IKU7);
- b) mengoptimalkan kegiatan penyelidikan dan penyidikan dengan fokus pada wilayah yang berpotensi terjadinya tindak pidana umum, narkoba, korupsi, perairan, dan kecelakaan lalu lintas guna mempercepat penyelesaian perkara secara transparan dan humanis;

(giat 3137, 3142, 3144, 3146, 4342, 4343 / prog LidikSidik / SP1 / SS1 / IKU9);

- c) meningkatkan kegiatan penguatan program Polmas guna menumbuhkan kembangkan paradigma dan perilaku yang berorientasi masyarakat (*citizen-centric*) dengan menanamkan prinsip-prinsip pemolisian masyarakat (*community policing*) melalui optimalisasi bimbingan masyarakat dan peran aktif Bhabinkamtibmas jajaran;

(giat 5076 / prog Harkamtibmas / SP1 / SS1 / IKU2);

- d) meningkatkan efisiensi dukungan manajemen internal, pelayanan publik, pemeliharaan sarana prasarana, modernisasi almatsus, serta kesiapsiagaan operasi kepolisian terpusat maupun kewilayahan secara akuntabel;

(giat 3070, 3073, 3130, 3131, 3133, 5059, 5061, 5079, 5082, 5086 / prog Dukma & Modernisasi / SP1 / SS5 / IKP1).

- 2) arah bijak: meningkatkan peran deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan lingkungan dalam negeri melalui mengoptimalkan pengumpulan data intelijen;

untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu;

- a) mengoptimalkan dalam pengumpulan data intelijen/informasi dengan mengembangkan produk perkiraan intelijen berkala dan laporan informasi khusus yang mengintegrasikan berbagai sumber input deteksi aksi secara terpadu;

(giat 3112 / prog Harkamtibmas / SP1 / SS1 / IKU7);

- b) meningkatkan kolaborasi lintas fungsi dan layanan publik melalui optimalisasi manajemen operasional helpdesk, pemanfaatan jaringan komunikasi pulsa PDA secara terintegrasi, serta pembuatan produk intelijen (*data-sharing*) pendukung kepada fungsi kepolisian terkait;

(giat 3128 / prog Harkamtibmas / SP1 / SS1 / IKU7).

- 3) arah bijak: mengendalikan ancaman gangguan Kamtibmas dan potensi kejahatan serta aksi terorisme melalui langkah-langkah proaktif yang dirancang untuk mengidentifikasi dan menangani risiko secara cepat dan tepat:

untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 7 (tujuh) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan "kehadiran Polisi" dan mengembangkan program berorientasi masyarakat (community-based program) untuk menyelesaikan masalah (problem solving) dan mencegah kejahatan secara kolaboratif dalam pemecahan masalah yang terjadi di tengah masyarakat;
(giat 5076 / prog Harkamtibmas / SP1 / SS1 / IKU2);
- b) meningkatkan dan melanjutkan kegiatan pencegahan sebagai bentuk "kehadiran Polisi" berupa: kontra radikal, kontranarasi dan kontra ideologi terhadap penyebaran propaganda kelompok terorisme baik pada kanal-kanal media online maupun komunitas masyarakat yang rentan terpapar oleh paham radikalisme dan terorisme;
(giat 3116, 3117 / prog Harkamtibmas / SP1 / SS1 / IKU9);
- c) meningkatkan pendekatan yang adaptif kepada masyarakat dengan melibatkan peran civil society dan tokoh agama yang telah mengikuti program moderasi beragama dalam penanganan kasus terorisme;
(giat 3114, 3116, 5076 / prog Harkamtibmas / SP1 / SS1 / IKU9);
- d) melanjutkan kegiatan sosialisasi dan kolaborasi dengan "stakeholder" dalam upaya pencegahan paham radikalisme, terorisme dan melaksanakan pembinaan terhadap eks nabi terorisme beserta keluarganya;
(giat 5076 / prog Harkamtibmas / SP1 / SS1 / IKU9);
- e) meningkatkan kegiatan menetralsir "informasi negatif" di tengah masyarakat yang dapat mengganggu Kamtibmas melalui pengelolaan opini publik, monitoring media siber, serta pembuatan produk laporan

informasi khusus (*infosus*) guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri; (giat 3116, 3128 / prog Harkamtibmas / SP1 / SS5 / IKP7);

- f) meningkatkan dan melanjutkan kegiatan "edukasi" dan himbauan kepada masyarakat berupa pesan Kamtibmas untuk pencegahan kejahatan melalui produksi "konten kreatif", melaksanakan *press release* tentang Kamtibmas dengan tujuan meningkatkan citra positif Polri di tengah masyarakat; (giat 3070 / prog Dukma / SP1 / SS5 / IKP7);

- g) meningkatkan "kehadiran Polisi" dan respon time melalui kegiatan patroli yang adaptif di wilayah rawan kejahatan dan kriminalitas serta melaksanakan pelacakan dan penangkalan di tempat Obvit/Obvitnas dan destinasi pariwisata;

(giat 3130, 3131 / prog Harkamtibmas / SP1 / SS1 / IKU5).

- 4) arah bijak: meningkatkan dan melanjutkan kegiatan "Pemolisian Prediktif" dalam rangka Harkamtibmas guna menciptakan suasana kondusif di tengah masyarakat (*Cooling System*) dengan melibatkan peran aktif dari Masyarakat

untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sambang kepada Toda, Toga dan Tomas serta masyarakat lainnya dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan guna menumbuhkan kembangkan paradigma dan perilaku yang berorientasi Masyarakat (*citizen-centric*) dengan menanamkan prinsip-prinsip pemolisian masyarakat (*community policing*);

(giat 5076 / prog Harkamtibmas / SP1 / SS1 / IKU2);

- b) peningkatan kegiatan pemberdayaan pengembalian kewenangan fungsi kepolisian terbatas kepada Satpam dan Polsus untuk mendukung "kehadiran Polisi" di tempat-tempat rawan kejahatan; (giat 5076 / prog Harkamtibmas / SP1 / SS1 / IKU2);

- c) meningkatkan kegiatan pembinaan FKPM/Pokdar Kamtibmas dalam rangka mengembangkan dan mengoptimalkan Polmas dalam menjaga

ketertiban dan keamanan lingkungan serta melaksanakan asistensi bagi penguatan KBPPP;

(giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2);

- d) meningkatkan pelaksanaan sosialisasi budaya tertib lalu lintas kepada masyarakat pengguna jalan guna mencegah terjadinya pelanggaran lalu-lintas dan kecelakaan;

(giat3133/progHarkamtibmas/SP1/SS/IKU1);

- 5) arah bijak: meningkatkan "kehadiran Polisi" dalam penanganan konflik ditengah masyarakat secara humanis:

untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan peran dan "kehadiran Polisi" utamanya dari para Bhabinkamtibmas dalam melakukan deteksi awal penanganan konflik sosial di Tengah Masyarakat secara humanis;

(giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2);

- b) meningkatkan dan melanjutkan kegiatan dalam mengorganisasikan masyarakat untuk mengalihkan potensi konflik sosial/politik dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan dengan melakukan aktivitas/kegiatan yang bersifat positif;

(giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2);

- c) meningkatkan respon cepat penggelaran pasukan pengendalian massa (Dalmas Satsamapta) dalam pengamanan konflik yang dilakukan secara humanis pada saat dan pasca konflik guna menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan;

(giat 3128, 5079/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU6);

- 6) arah bijak: meningkatkan "kehadiran Polisi" dalam kegiatan Kamseltibcarlantas kepada masyarakat guna memberikan rasa aman saat berkendara, terjadi kemacetan dan saat pada jam rawan kejahatan; untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan pelaksanaan kegiatan kepolisian yang adaptif sebagai bentuk "kehadiran Polisi" dalam pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli di tengah masyarakat;
(giat3130,3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU3);
 - b) meningkatkan "kehadiran Polisi" dalam kegiatan patroli, penjagaan yang adaptif di wilayah rawan kriminalitas pada saat jam rawan kejahatan dan rawan kecelakaan serta berperan aktif mengajak masyarakat untuk mewujudkan Kamtibmas dan Kamseltibcarlantas;
(giat3130, 3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU3);
 - c) meningkatkan kegiatan patroli dan penjagaan yang adaptif di Obvit/Obvitnas dan tempat destinasi pariwisata sebagai bentuk "kehadiran Polisi" saat jam-jam rawan kejahatan dan kecelakaan serta berperan aktif di tengah Masyarakat dalam mewujudkan Kamtibmas;
(giat3131/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU5);
- 7) arah bijak: meningkatkan peran aktif dan "kehadiran Polisi" di tengah masyarakat baik di wilayah kejadian bencana dan "*Slum Area*";
 untuk mewujudkan arah bijak 7, maka terdapat 4 (empat) strategi yang Akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan kesiapsiagaan kehadiran personel Satsamapta Polres Lombok Barat yang dibackup oleh fungsi operasional terkait guna menghadapi "ketanggapsegeraan" dalam penanganan bencana alam hidrometeorologi, keselamatan masyarakat, serta pengamanan intensif di wilayah rawan kriminalitas yang berintensitas tinggi;
(giat 3130, 5079 / prog Harkamtibmas / SP1 / SS1 / IKU6);
 - b) meningkatkan "kehadiran Polisi" guna memberikan dukungan atas penyelenggaraan dan pelayanan bantuan penanganan SAR terbatas dalam penanganan bencana dan keselamatan yang dilaksanakan oleh personel Samapta, Satpolairud, dan perkuatan unit taktis Polres Lombok

Barat;

(giat 3130 / prog Harkamtibmas / SP1 / SS1 / IKU3);

- c) meningkatkan akurasi dalam memetakan desa/wilayah rawan gempa, bencana tanah longsor, dan banjir rob oleh "Bhabinkamtibmas" jajaran Polres Lombok Barat yang wilayahnya didiami oleh masyarakat sebagai bentuk kehadiran Polisi guna memudahkan identifikasi masyarakat yang menjadi korban pada saat dan pasca bencana;

(giat 5076 / prog Harkamtibmas / SP1 / SS1 / IKU2);

- d) meningkatkan kerja sama dan kolaborasi dengan instansi terkait dalam penanganan "Pelayanan Kesehatan" dan bakti kesehatan lapangan pada daerah rawan gempa dan bencana alam melalui optimalisasi urusan kesehatan (Urkes) jajaran Polres Lombok Barat.

(giat 3070 / prog Dukma / SP1 / SS1 / IKU2 / SS3 / IKP1).

- 8) arah bijak: melaksanakan tahapan pengamanan kegiatan event Nasional/Internasional;

untuk mewujudkan arah bijak 8, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) melaksanakan perencanaan operasi kepolisian dalam rangka pengamanan event nasional/internasional tahun 2027;

(giat5079/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU8);

- b) meningkatkan kehadiran Polisi dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan event nasional/internasional tahun 2027 meliputi: Pengaturan, Patroli, Penjagaan, Pengawalan pada wilayah rawan kejahatan;

(giat,3130,3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU8);

- c) menyelenggarakan pengamanan pada wilayah rawan kejahatan dan kecelakaan pada wilayah objek vital di lokasi event;

(giat3130,3131/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU5)

- d) melaksanakan pengamanan event nasional tahun 2027 serta mengantisipasi meningkatnya kejahatan yang berskala ke intensitas tinggi; (*giat 3130, 5079/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU6*);
- 9) arah bijak: melaksanakan “kehadiran Polisi” kewilayahan untuk pengamanan unjuk rasa, penanganan konflik sosial dan menjalin sinergitas dengan *stakeholder* terkait penanganan gangguan keamanan dan bencana; untuk mewujudkan arah bijak 9, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan kolaborasi dan sinergisitas dalam membangun kerja sama dengan satuan kewilayahan tetangga serta para pemangku kepentingan (*stakeholder*) secara aktif guna mewujudkan situasi keamanan, pencegahan konflik sosial, dan ketertiban dalam negeri yang kondusif di wilayah Kabupaten Lombok Barat;
 (*giat 5076, 5079 / prog Harkamtibmas / SP1 / SS1 / IKU8*);
- b) meningkatkan pelaksanaan “kehadiran Polisi” dalam pengamanan kegiatan di tengah masyarakat yang sedang beraktivitas;
 (*giat3130,3131,3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU3*);
- c) meningkatkan “kehadiran Polisi” pada kegiatan pengamanan di kawasan obvitnas dan objek tertentu;
 (*giat3131/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU5*);
- d) meningkatkan “kehadiran Polisi” pada pelayanan pelacakan dan penangkalan di daerah rawan kejahatan dan bahaya narkoba;
 (*giat3130/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU3*);
- 10) rah bijak: meningkatkan kerja sama kepolisian dalam/luar negeri guna mendukung Harkamtibmas dan Gakkum; untuk mewujudkan arah bijak 10, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan pelaksanaan kegiatan kerja sama dalam negeri antara Polres Lombok Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, instansi vertikal, serta Kementerian/Lembaga sektoral dalam rangka

meningkatkan kolaborasi, pemeliharaan keamanan, dan sinergisitas dengan “stakeholder” terkait;

(giat 5076, 5079 / prog Harkamtibmas / SP1 / SS1 / IKU8);

- b) meningkatkan pelaksanaan koordinasi pengamanan jaminan keselamatan investasi asing (*safe guarding*) guna mendukung kerja sama kepolisian internasional dalam pemeliharaan keamanan kawasan pariwisata untuk meningkatkan citra positif Polri di wilayah hukum Polres Lombok Barat;

(giat 3116, 3131 / prog Harkamtibmas / SP1 / SS1 / IKU8);

- c) meningkatkan kerja sama keamanan, ketertiban, dan pemantauan pergerakan warga negara asing (WNA) secara lintas sektoral bersama instansi Imigrasi wilayah hukum Polres Lombok Barat

(giat 3117, 3128 / prog Harkamtibmas / SP1 / SS1 / IKU8 / MendukungTUSI);

- 11) arah bijak: melaksanakan “kehadiran Polisi” dalam penggelaran kegiatan patroli kapal di wilayah hukum Polres Lombok Barat guna mendukung kegiatan keamanan laut;

untuk mewujudkan arah bijak 11, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu

- a) meningkatkan “kehadiran Polisi” dalam pelaksanaan kegiatan penegakan hukum di wilayah perairan rawan kejahatan, penindakan tindak pidana umum perairan, serta penanggulangan aksi *destructive fishing* di sepanjang garis pantai dan kawasan gili pariwisata wilayah hukum Polres Lombok Barat;

(giat 4342 / prog LidikSidik / SP1 / SS1 / IKU4 /

MendukungReformasiPolri).

- 12) arah bijak: meningkatkan penguatan “kehadiran Polisi” dalam pengamanan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar berpenghuni;

untuk mewujudkan arah bijak 12, maka terdapat satu strategi yang akan dilakukan yaitu:

- meningkatkan dan mengoptimalkan kegiatan patroli, penjagaan dan pelacakan di wilayah rawan kejahatan serta obvit/obvitnas serta penguatan “kehadiran Polisi” di perbatasan dan pulau berpenghuni;
(giat3130,313 /progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU4);
- b. Sasaran Prioritas II “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Polri melalui Layanan Digital yang Semakin Inovatif”, terdiri dari 3 (tiga) arah bijak sebagai berikut:
 - 1) meningkatkan dan menyempurnakan kemudahan serta reliabilitas tindak lanjut pengaduan masyarakat secara multimoda dalam cara berkomunikasi;
 - 2) meningkatkan pelayanan yang adaptif dalam melayani masyarakat dengan memperhatikan alur pelayanan, biaya pelayanan dan waktu pelayanan guna meniadakan segala pungutan liar pada sentra pelayanan publik Polri;
 - 3) meningkatkan “ketanggap segeraan” dalam melayani masyarakat baik dalam pelayanan publik Polri, Harkamtibmas dan penegakan hukum sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP);

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut;

- 1) arah bijak: meningkatkan dan menyempurnakan kemudahan dan reliabilitas tindak lanjut pengaduan masyarakat secara multimoda dalam cara berkomunikasi;
untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 1 (satu) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan koordinasi dan penanganan tindak lanjut pelayanan pengaduan masyarakat yang masuk melalui sistem aplikasi terintegrasi maupun multimoda komunikasi guna memberikan kepastian pelayanan yang ramah, cepat, transparan, dan akuntabel di tingkat kewilayahan Polres Lombok Barat;
(giat 5086 / prog Dukma / SP2 / SS2 / IKU9).
- 2) arah bijak: meningkatkan pelayanan yang adaptif dalam melayani masyarakat dengan memperhatikan alur pelayanan, biaya pelayanan dan waktu pelayanan guna meniadakan segala pungutan liar pada sentra pelayanan publik Polri;

untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan pelayanan prima penerbitan SIM dan STNK secara adaptif di kantor pelayanan Satpas Polres Lombok Barat maupun gerai keliling di bidang lalu lintas guna memperluas jangkauan akses pelayanan kepada masyarakat luas;
(giat 3133 / prog Harkamtibmas / SP2 / SS1 / IKU1 / MendukungTusi);
 - b) meningkatkan kegiatan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengujian legitimasi kemampuan pengemudi guna memberikan jaminan keselamatan, kepastian hukum, dan keabsahan dokumen di jalan raya;
(giat 3133 / prog Harkamtibmas / SP2 / SS1 / IKU1 / MendukungTusi);
 - c) meningkatkan inovasi, transparansi, dan perbaikan yang adaptif dalam memberikan pelayanan Intelijen Keamanan serta optimalisasi sistem pelayanan SKCK guna menghasilkan produk intelijen yang modern, berintegritas, bersih dari pungli, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat;
(giat3112/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU7/ MendukungReformasiPolri);
 - d) mendorong penggunaan aplikasi pelaporan Binmas sistem daring (*Binmas Online*) guna mempercepat pelayanan pembinaan ketertiban sosial, koordinasi forum Polmas, serta peningkatan respon pelayanan pembinaan masyarakat di tingkat Polres hingga Bhabinkamtibmas desa.
(giat 5076 / prog Harkamtibmas / SP2 / SS1 / IKU2 / MendukungReformasiPolri).
- 3) arah bijak: meningkatkan “ketanggap segeraan” dalam melayani masyarakat baik dalam pelayanan publik Polri, Harkamtibmas dan Penegakan Hukum sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 1 (satu) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- merespon cepat tuntutan keamanan dan meningkatkan pelayanan jasa pengamanan serta asistensi sistem manajemen pengamanan objek vital nasional (seperti kawasan Pelabuhan Lembar/Gili Mas) dan objek tertentu perbankan secara adaptif sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 (giat 3130, 3131 / prog Harkamtibmas / SP2 / SS1 / IKU5 / MendukungReformasiPolri).;
- c. Sasaran Prioritas II “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Polri melalui Layanan Digital yang Semakin Inovatif”, terdiri dari 3 (tiga) arah bijak sebagai berikut:
 - 1) mengedepankan kolaborasi dan kerjasama antar penyidik dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna mewujudkan penegakan hukum yang lebih manusiawi dan beradab sesuai nilai-nilai keadilan di Masyarakat;
 - 2) meningkatkan kompetensi penyidik melalui pelaksanaan kegiatan pelatihan dan sertifikasi penyidik guna meningkatkan kualitas dan kemampuan penyidik Polri;
 - 3) meningkatkan dan mewujudkan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam penegakan hukum sebagai langkah prosedur hukum yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral serta memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;
 - 4) meningkatkan peran adaptifitas penanganan kejahatan Polri melalui pusat analisis tindak kejahatan di pusat data dan informasi kriminal nasional;

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut;

- 1) arah bijak: mengedepankan kolaborasi dan kerjasama antar penyidik dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna mewujudkan penegakan hukum yang lebih manusiawi dan beradab sesuai nilai-nilai keadilan di masyarakat;
 untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 8 (delapan) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan koordinasi dan kerja sama keamanan perairan antar penyidik dalam rangka penegakan hukum, penindakan tindak pidana umum perairan, serta penanggulangan aksi *destructive fishing* di wilayah laut jajaran Polres Lombok Barat; (giat 4342 / prog LidikSidik / SP3 / SS2 / IKU7 / MendukungTusi);
- b) meningkatkan kegiatan pengungkapan, penyidikan, dan penyelesaian berkas perkara tindak pidana konvensional, judi konvensional, peredaran gelap narkoba, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), serta kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (PPA) oleh Satreskrim dan Satresnarkoba dengan menghindari praktik kekerasan atau rekayasa kasus dalam proses penyidikan; (giat 3142, 3144 / prog LidikSidik / SP3 / SS2 / IKU2 / IKU3 / IKU4 / MendukungTusi);
- c) meningkatkan kegiatan penegakan hukum terhadap kejahatan perekonomian, pengawasan ketersediaan pangan/sembako, koordinasi penanganan konflik pertanahan Sekotong, serta penindakan tindak pidana korupsi secara transparan dengan menghindari praktik transaksional dalam penanganan perkara; (giat 3142, 3146 / prog LidikSidik / SP3 / SS2 / IKU4 / MendukungTusi);
- d) melaksanakan kegiatan penindakan tindak pidana di perairan jajaran Satpolairud dalam mendukung penegakan hukum laut yang bersih serta menghindari praktik kekerasan dan rekayasa kasus dalam proses penyidikan; (giat 4342 / prog SidikLidik / SP3 / SS2 / IKU7 / MendukungTusi);
- e) melaksanakan kegiatan penanganan, penyidikan, dan penindakan berkas perkara kecelakaan lalu lintas guna mewujudkan "Road Safety" serta melakukan penguatan penegakan hukum lalu lintas secara selektif dan humanis untuk menjaga kewibawaan hukum; (giat 3133 / prog Harkamtibmas, 4343 / prog SidikLidik / SP3 / SS1 / IKU1 / SS2 / IKU6 / MendukungReformasiPolri);

- f) melanjutkan pelaksanaan kegiatan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*Restorative Justice*) pada fungsi reserse kriminal tingkat Polres dan Polsek jajaran dengan menghindari tawar-menawar perkara guna memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat;
 (giat 3142 / prog LidikSidik / SP3 / SS2 / IKU1 / IKU2 / MendukungReformasiPolri);
 - g) mengoptimalkan kegiatan penindakan hukum terbatas/tindak pidana ringan (Tipiring) serta pengendalian massa oleh fungsi Samapta dalam rangka memelihara Harkamtibmas;
 (giat 3130 / prog Harkamtibmas / SP3 / SS2 / IKU9 / MendukungTusi);
 - h) meningkatkan dan mempercepat penyelesaian perkara-perkara pidana secara responsif, transparan, dan akuntabel guna memberikan kepastian hukum yang pasti kepada masyarakat serta menghindari konflik kepentingan dalam penanganan perkara;
 (giat 3142, 3144, 3146 / prog LidikSidik / SP3 / SS2 / IKU9 / MendukungTusi);
 - i) meningkatkan pemberian bantuan teknis penyidikan dalam rangka pengolahan TKP, urusan identifikasi, dan pengambilan rumus sidik jari (*scientific crime investigation*) oleh Unit Inafis guna memastikan pembuktian fisik dianalisis secara akurat untuk menemukan tersangka.
 (giat 3140 / prog LidikSidik / SP3 / SS2 / IKU9 / MendukungTusi).
- 2) arah bijak: meningkatkan dan mewujudkan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam penegakan hukum sebagai langkah prosedur hukum yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral serta memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;
- untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu;
- a) mengoptimalkan pelaksanaan pemberian SP2HP kepada pelapor/korban kejahatan agar penanganan perkara di tingkat Polres

dan Polsek berjalan transparan, akurat, tepat waktu, serta meminimalisir komplain dari masyarakat sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia guna meningkatkan kepercayaan publik; (giat 3137, 5086 / prog LidikSidik & prog Dukma / SP3 / SS2 / IKU9 / MendukungReformasiPolri);

- b) mengoptimalkan peran pengawasan melekat (*waskat*) dari atasan penyidik serta Seksi Pengawasan Polres bersama unit Wassidik Satreskrim untuk mengawasi jalannya proses penyidikan agar berjalan objektif, profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (giat 5086 / prog Dukma / SP3 / SS2 / IKU1 / IKU2 / IKU3 / IKU4 / IKU5 / IKU6 / IKU7 / IKU8 / MendukungReformasiPolri);
- c) mengoptimalkan penggunaan aplikasi *e-manajemen penyidikan* (e-MP) di seluruh unit reserse kriminal Polres dan Polsek jajaran sebagai sarana pengawasan perkara terpadu guna mewujudkan transparansi proses pelaporan perkara yang akurat dan akuntabel di tingkat kewilayahan. (giat 5086 / prog Dukma / SP3 / SS2 / IKU9 / MendukungReformasiPolri);

d. Sasaran Prioritas IV "Meningkatkan SDM Polri yang Adaptif, Kompeten dan Berintegritas melalui Internalisasi Nilai-Nilai Budaya Organisasi" terdiri dari 6 (enam) arah bijak sebagai berikut;

- 1) meningkatkan kualitas hasil lulusan Pendidikan dan Latihan Polri guna mewujudkan SDM Polri yang adaptif, kompeten dan berintegritas, memiliki moralitas serta siap pakai;
- 2) mengoptimalkan dan mendorong SDM Polri untuk memedomani Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE;
- 3) meningkatkan kualitas dan kapabilitas SDM Polri yang unggul dan humanis melalui penyelarasan jumlah dan keahlian personel dengan kebutuhan riil Polri di lapangan, serta menyusun ukuran organisasi yang optimal dengan menerapkan "*Strategic Workforce Planning*";

- 4) meningkatkan dan melanjutkan kerja sama pendidikan di dalam dan luar negeri untuk mencetak personel Polri yang memiliki wawasan global namun tetap mengakar pada nilai-nilai lokal;
- 5) melaksanakan dan melanjutkan penyempurnaan sistem meritokrasi dan kolaborasi antar fungsi dengan merancang ulang sistem manajemen kinerja secara menyeluruh (termasuk memperkenalkan konsep *shared KPIs* dan *mentorship*) bertujuan untuk menghilangkan ego sektoral (*silo mentality*) dan memastikan promosi jabatan berbasis prestasi objektif;
- 6) meningkatkan kesejahteraan SDM Polri melalui layanan kesehatan, perumahan dan keselamatan kerja sebagai fondasi utama untuk menciptakan postur Polri yang profesional dan berintegritas.

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: meningkatkan kualitas hasil lulusan Pendidikan dan Latihan Polri guna mewujudkan SDM Polri yang adaptif, kompeten dan berintegritas, memiliki moralitas serta siap pakai;
 untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 1 (satu) strategi yang akan dilakukan yaitu;
 - meningkatkan pelaksanaan latihan berkala, pemeliharaan dan peningkatan kemampuan (Harkatpuan) fungsi Negosiator, Dalmas Satsamapta, serta fungsi Binmas yang menjunjung tinggi HAM dalam rangka penanganan potensi konflik secara humanis guna menghadapi pengamanan kalender event pariwisata nasional dan internasional tahun 2027;(giat 3130, 5076 / prog Harkamtibmas / SP4 / SS1 / IKU3 / IKU6 / MendukungReformasiPolri);
- 2) arah bijak: mengoptimalkan dan mendorong SDM Polri untuk memedomani Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE;
- 3) arah bijak: meningkatkan kualitas dan kapabilitas SDM Polri yang unggul dan humanis melalui penyelarasan jumlah dan keahlian personel dengan

kebutuhan riil Polri di lapangan, serta menyusun ukuran organisasi yang optimal dengan menerapkan “*Strategic Workforce Planning*” (orang yang tepat, dengan keterampilan yang tepat, di posisi yang tepat, dan pada waktu yang tepat);

- 4) arah bijak: meningkatkan dan melanjutkan kerja sama pendidikan di dalam dan luar negeri untuk mencetak personel Polri yang memiliki wawasan global namun tetap mengakar pada nilai-nilai lokal;
- 5) arah bijak: melaksanakan dan melanjutkan penyempurnaan sistem meritokrasi dan kolaborasi antar fungsi dengan merancang ulang sistem manajemen kinerja secara menyeluruh (termasuk memperkenalkan konsep shared KPIs dan mentorship) bertujuan untuk menghilangkan ego sektoral (silo mentality) dan memastikan promosi jabatan berbasis prestasi objektif; untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat 1 (satu) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - meningkatkan koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan bimbingan teknis serta peningkatan kemampuan profesionalisme personel pengamanan swakarsa (Satpam) dan kepolisian khusus (Polsus) melalui fungsi pembinaan potensi keamanan jajaran Satbinmas Polres Lombok Barat.
(giat 5076 / prog Harkamtibmas / SP4 / SS1 / IKU2 / MendukungReformasiPolri).
- 6) arah bijak: meningkatkan kesejahteraan SDM Polri melalui layanan kesehatan, perumahan dan keselamatan kerja sebagai fondasi utama untuk menciptakan postur Polri yang profesional dan berintegritas: untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat 1 (satu) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - meningkatkan koordinasi pelayanan kesehatan berkala, pengawasan keselamatan kerja, pembinaan rohani dan mental (Binrohtal), serta fasilitasi konseling psikologis awal melalui fungsi urusan kesehatan dan sumber daya manusia (Bag SDM) Polres Lombok Barat guna mengatasi beban kerja serta mencegah kejenuhan (*burn out*) personel di lapangan.

(giat 3070 / prog Dukma / SP4 / SS3 / IKP1 / MendukungTusi).

e. Sasaran Prioritas V “Meningkatkan Infrastruktur Teknologi Kepolisian yang Modern guna Mendukung Pelaksanaan Tugas dengan Memanfaatkan *Big Data* dan *AI*” terdiri dari 6 (enam) arah bijak sebagai berikut:

- 1) meningkatkan keselarasan TI dengan organisasi melalui penyempurnaan dan penerapan arsitektur TI Polri (*IT Enterprise Architecture*) yang modern guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan penyelarasan antara strategi pelayanan Kepolisian dengan teknologi digital; (G.S).
- 2) mendorong dan meningkatkan pemenuhan Almatsus Polri melalui peran Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) dan industri swasta nasional sebagai langkah krusial untuk mewujudkan kemandirian pertahanan dan keamanan dalam negeri;
- 3) meningkatkan pemenuhan rumah dinas pegawai Polri untuk meningkatkan kesejahteraan serta pembangunan fasilitas perkantoran/gudang dan mendorong secara aktif pembangunan rumah dinas termasuk di wilayah perbatasan, difokuskan pada percepatan pembangunan fisik dan integrasi dengan program nasional;
- 4) melanjutkan kegiatan pengembangan laboratorium forensik di kewilayahan secara bertahap bertujuan untuk mewujudkan Investigasi Kejahatan Ilmiah (SCI), memastikan bahwa kasus kriminal diselesaikan berdasarkan bukti fisik yang tak terbantahkan, bukan hanya pengakuan;
- 5) melanjutkan kegiatan pengembangan Almatsus *SCI* sebagai strategi besar Polri untuk transisi dari pola penyidikan konvensional menuju pembuktian berbasis ilmiah yang tidak terbantahkan di persidangan;
- 6) mengoptimalkan dan membangun kemampuan digital dengan mengembangkan Data, *Digital Platform and Software (DDPS)* bertujuan mengintegrasikan ribuan aplikasi kepolisian yang sebelumnya terpisah (kumpulan data) ke dalam ekosistem yang terintegrasi dalam Satu Data Polri. (G.S).

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: meningkatkan keselarasan TI dengan organisasi melalui penyempurnaan dan penerapan arsitektur TI Polri (*IT Enterprise Architecture*) yang modern guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan penyelarasan antara strategi pelayanan kepolisian dengan teknologi digital; (G.S).
untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan optimalisasi penggunaan peralatan, materiil registrasi dan identifikasi, serta koordinasi layanan STNK dan pengujian pengemudi berbasis sistem elektronik transparan yang ramah pelayanan pada kantor Satpas Polres Lombok Barat:
(giat 3133 / prog Harkamtibmas / SP5 / SS4 / IKP2 / MendukungReformasiPolri);
 - b) mendukung jalannya koordinasi operasional penegakan hukum lalu lintas secara transparan melalui optimalisasi pemanfaatan validasi data pelanggaran tilang elektronik (ETLE) yang telah tergelar di wilayah hukum Polres Lombok Barat;
(giat 3133 / prog Harkamtibmas / SP5 / SS4 / IKP2 / MendukungReformasiPolri);
- 2) arah bijak: mendorong dan meningkatkan pemenuhan Almtsus Polri melalui peran Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) dan Industri Swasta Nasional sebagai langkah krusial untuk mewujudkan kemandirian pertahanan dan keamanan dalam negeri;
- 3) arah bijak: meningkatkan pemenuhan rumah dinas pegawai Polri untuk meningkatkan kesejahteraan serta pembangunan fasilitas perkantoran/gudang dan mendorong secara aktif pembangunan rumah dinas termasuk di wilayah perbatasan, difokuskan pada percepatan pembangunan fisik dan integrasi dengan program nasional;
- 4) arah bijak: melanjutkan kegiatan pengembangan laboratorium forensik di kewilayahan secara bertahap bertujuan untuk mewujudkan Investigasi

- Kejahatan Ilmiah (SCI), memastikan bahwa kasus kriminal diselesaikan berdasarkan bukti fisik yang tak terbantahkan, bukan hanya pengakuan;
- 5) arah bijak: melanjutkan kegiatan pengembangan Almatsus SCI sebagai strategi besar Polri untuk transisi dari pola penyidikan konvensional menuju pembuktian berbasis ilmiah yang tidak terbantahkan di persidangan; untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat 1 (satu) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- meningkatkan optimalisasi pelaksanaan pelayanan identifikasi tindak pidana, pengambilan rumus sidik jari, serta pemanfaatan peralatan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) oleh Unit Inafis Satreskrim guna mempercepat identifikasi pelaku kejahatan dan barang bukti berbasis ilmiah di tingkat kewilayahan Polres Lombok Barat; (giat 3140 / prog LidikSidik / SP5 / SS4 / IKP4 / MendukungTusi).
- 6) arah bijak: mengoptimalkan dan membangun kemampuan digital dengan mengembangkan *Data, Digital Platform and Software (DDPS)* bertujuan mengintegrasikan ribuan aplikasi kepolisian yang sebelumnya terpisah (kumpulan data) ke dalam ekosistem yang terintegrasi dalam Satu Data Polri.
- f. Sasaran Prioritas VI “Meningkatkan Tata Kelola dan Model Operasional Organisasi” terdiri dari 6 (enam) arah bijak sebagai berikut;
- 1) meningkatkan kegiatan penguatan penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis *Online* melalui *Redesain* interaksi kepolisian dan masyarakat kegiatan mencerminkan transformasi *Digital Humanism* dalam tubuh Polri. Fokusnya bukan sekadar memindahkan pengaduan ke aplikasi, tetapi merombak total pengalaman masyarakat saat berinteraksi dengan Polisi di ruang digital agar lebih setara, transparan, dan solutif; (G.S).
 - 2) meningkatkan kegiatan Saber Pungli di lingkungan internal Polri guna menjadi instrumen vital dalam program “Polri Presisi” untuk memulihkan dan menjaga kepercayaan publik (*Public Trust*) Polri di tengah masyarakat;

- 3) melanjutkan dan meningkatkan kegiatan pencegahan korupsi di internal Polri dalam rangka *Good Government and Clean Governance* melalui transformasi pengawasan internal yang lebih sistematis dan berbasis teknologi;
- 4) meningkatkan tata kelola dari sistem manajemen kinerja, perencanaan, penganggaran dan keuangan Polri yang transparan dan akuntabel guna menghilangkan sekat-sekat birokrasi antara perencanaan (*Planning*) dan realisasi anggaran (*Spending*) agar setiap anggaran yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara publik;
- 5) melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan dan tata laksana Polres, Polsek dan Polsubsektor serta penguatan struktur organisasi Polri agar lebih efektif dan efisien langkah strategis ini untuk menciptakan organisasi yang adaptif terhadap dinamika keamanan modern, kebijakan ini difokuskan pada penguatan struktur di tingkat Kecamatan serta sinkronisasi organisasi dengan wilayah administrasi negara yang terbaru;
- 6) meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi Polri antara lain melalui pembangunan zona integritas, peningkatan indeks pelayanan publik, peningkatan pelayanan publik ramah kelompok rentan, penciptaan inovasi, pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan strategi pelayanan publik guna mewujudkan institusi yang bersih, akuntabel, dan melayani. Fokus utama strategi ini adalah mengubah budaya kerja dari "dilayani" menjadi "melayani" dengan standar internasional;

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: meningkatkan kegiatan penguatan penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis *Online* melalui redesain interaksi kepolisian dan masyarakat kegiatan mencerminkan transformasi *Digital Humanism* dalam tubuh Polri. Fokusnya bukan sekadar memindahkan pengaduan ke aplikasi, tetapi merombak total pengalaman masyarakat saat berinteraksi dengan Polisi di ruang digital agar lebih setara, transparan, dan solutif; (G.S).

untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 1 (satu) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- meningkatkan optimalisasi pelaksanaan verifikasi, klarifikasi, dan tindak lanjut aduan masyarakat (*dumas*) yang diterima multimoda secara transparan, profesional, dan terukur oleh Seksi Pengawasan dan Seksi Propam guna memberikan kepastian hukum kedinasan di tingkat kewilayahan Polres Lombok Barat; (giat 5086 / prog Dukma / SP6 / SS5 / IKP7 / MendukungReformasiPolri).

- 2) arah bijak: meningkatkan kegiatan Saber Pungli di lingkungan internal Polri guna menjadi instrumen vital dalam program "Polri Presisi" untuk memulihkan dan menjaga kepercayaan publik (*Public Trust*) Polri ditengah masyarakat;

untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 1 (satu) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- melaksanakan "operasi bersih", penegakan disiplin, serta pengawasan melekat secara berkala di internal mako dan sentra pelayanan publik kewilayahan (sentra pelayanan SIM, SKCK, dan SPKT) untuk memberantas praktik pungli, penyalahgunaan wewenang, maupun transaksional perkara guna meningkatkan integritas institusi. (giat 5086 / prog Dukma / SP6 / SS5 / IKP5 / MendukungReformasiPolri).

- 3) arah bijak: melanjutkan dan meningkatkan kegiatan pencegahan korupsi di internal Polri dalam rangka *Good Government and Clean Governance* melalui transformasi pengawasan internal yang lebih sistematis dan berbasis teknologi:

untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 1 (Satu) strategi yang akan dilakukan yaitu;

- mendorong kegiatan kepatuhan terhadap implementasi dari Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kepolisian Negara Republik

Indonesia sebagai langkah krusial untuk mewujudkan Polri yang bersih dan bebas dari korupsi;

(giat 5086 / prog Dukma / SP6 / SS5 / IKP5 / MendukungTusi).

- 4) arah bijak: meningkatkan tata kelola dari sistem manajemen kinerja, perencanaan, penganggaran dan keuangan Polri yang transparan dan akuntabel guna menghilangkan sekat-sekat birokrasi antara perencanaan (*planning*) dan realisasi anggaran (*spending*) agar setiap anggaran yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara publik; untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- meningkatkan pelaksanaan kegiatan monitoring, analisa, dan evaluasi berkala terhadap realisasi penyerapan anggaran operasional dan capaian target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) guna memastikan kualitas belanja yang akuntabel, efisien, serta mencegah adanya pemotongan anggaran pada tingkat Polres maupun Polsek jajaran;

(giat 5086 / prog Dukma / SP6 / SS5 / IKP6 / MendukungTusi);

- meningkatkan koordinasi, sinergi, dan komitmen kedinasan terpadu antara fungsi Pengawasan (Siwas), Perencanaan (Bagren), Logistik (Baglog), Keuangan (Sikeu), dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku penanggungjawab tata kelola anggaran keuangan di tingkat Satker Polres Lombok Barat.

(giat 5086 / prog Dukma / SP6 / SS5 / IKP6 / MendukungReformasiPolri).

- 5) arah bijak: melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan dan tata laksana Polres, Polsek dan Polsubsektor serta penguatan struktur organisasi Polri agar lebih efektif dan efisien langkah strategis ini untuk menciptakan organisasi yang adaptif terhadap dinamika keamanan modern, kebijakan ini difokuskan pada penguatan struktur di tingkat Kecamatan serta sinkronisasi organisasi dengan wilayah administrasi negara yang terbaru;

- 6) arah bijak: meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi Polri antara lain melalui pembangunan zona integritas, peningkatan indeks pelayanan publik, peningkatan pelayanan publik ramah kelompok rentan, penciptaan inovasi, pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan strategi pelayanan publik guna mewujudkan institusi yang bersih, akuntabel, dan melayani. Fokus utama strategi ini adalah mengubah budaya kerja dari "dilayani" menjadi "melayani" dengan standar internasional;
- untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat 1 (satu) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- meningkatkan kualitas pelayanan publik Polres Lombok Barat yang inklusif melalui penyediaan, pemeliharaan, dan optimalisasi unit fasilitas pelayanan yang ramah bagi kelompok rentan (penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan anak-anak) pada sentra Satpas SIM, ruang SPKT, dan ruang pelayanan SKCK;
- (giat 5086 / prog Dukma / SP6 / SS5 / IKP4 / TusiPolresLobar);

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN DAN USULAN PAGU INDIKATIF
POLRES LOMBOK BARAT TAHUN 2027

1. Program Polri dan kegiatan Polres Lombok Barat

a. Program Dukungan Manajemen.

1) tujuan

Terwujudnya tata kelola Polri yang “Good Governance Dan Clean Government” melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan kemampuan manajemen dan informasi Kepolisian, sinkronisasi perencanaan kebijakan program, anggaran dan integrasi serta kerja sama lintas sektoral.

2) kegiatan

- a) pelayanan administrasi keuangan Polri dengan anggaran;
- b) penerangan masyarakat;
- c) penyelenggaraan teknologi informasi;
- d) pelayanan Kesehatan Polri dengan anggaran;
- e) dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri dengan anggaran;
- f) pertanggungjawaban profesi;
- g) penyelenggaraan pengamanan Internal Polri dengan anggaran;
- h) penegakan Tata Tertib dan Disiplin Polri;
- i) penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan;
- j) pengelolaan multimedia;
- k) pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum;
- l) kerja sama dan penyuluhan hukum;
- m) monev pelaksanaan kinerja dan anggaran Polri;
- n) penyusunan Kebijakan Polri;
- o) penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Polri/;
- p) reformasi Birokrasi Polri;
- q) manajemen anggaran dengan anggaran;

- r) pengelolaan informasi dan dokumen;
- b. Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri.
 - 1) tujuan.

Mendukung terpeliharanya Harkamtibmas dan penegakan hukum melalui tata kelola dan moderisasi Almatsus serta sarana prasarana guna mendukung pelaksanaan tugas fungsi Polri dibidang pembinaan dan operasional.
 - 2) kegiatan.
 - a) Dukungan manajemen dan teknik Sarpras; 1.0 Layanan, Laporan, Dokumen;
 - b) Pengembangan perbekalan umum; 1.0 Layanan, Laporan, Dokumen; Usulan pembangunan fasilitas fisik sarpras sumber anggaran Rupiah Murni (RM), BLU, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Polres Lombok Barat (Usulan Belanja Modal Baru T.A. 2027):
 - 1. Pembangunan Rumah Dinas Jabatan Kapolsek Kediri Type 54 (1 Unit);
 - 2. Pembangunan Gedung Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Lantai 2 Polres Lombok Barat (1 Unit);
 - 3. Pembangunan Rumah Dinas Anggota Polsek Kediri Type 38 (8 Unit);
 - 4. Pembangunan Rumah Dinas Jabatan Kapolsek Labuapi Type 54 (1 Unit);
 - 5. Pembangunan Rumah Dinas Anggota Polsek Labuapi Type 38 (2 Unit);
 - 6. Pembangunan Rumah Dinas Jabatan Kapolsek Lembar Type 54 (1 Unit);
 - 7. Pembangunan Rumah Dinas Anggota Polsek Lembar Type 38 (5 Unit).
- c. Program Profesionalisme SDM Polri.
 - 1) tujuan.

terwujudnya postur SDM Polri yang profosional, modern dan terpercaya berdasarkan kompetisi dan kinerja yang optimal melalui infrastruktur SDM

yang berkualitas di era 5.0, bermanfaat dan berkelanjutan guna mendukung produktivitas kerja, disiplin dan tanggungjawab personel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya guna meningkatkan *value* organisasi.

2) kegiatan.

- a) Dukma dan teknis profesionalisme SDM Polri;
- b) Penyelenggaraan Administrasi perawatan pegawai negeri;
- c) Pembinaan karier Personel Polri;
- d) Pelayanan Psikologi anggota Polri.

d. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

1) tujuan.

terpeliharannya Kamtibmas melalui peningkatan kemampuan manajemen operasional Polri dan informasi kepolisian serta melaksanakan kerjasama lintas sektoral yang fokus pada pelaksanaan tugas fungsi deteksi aksi/dini, preemtif dan preventif.

2) kegiatan.

- a) Analisis Keamanan (Satintelkam Polres); 398.0 Laporan;
- b) Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik (Satintelkam & Polsek Jajaran); 391.0 Laporan;
- c) Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi (Satintelkam & Polsek Jajaran); 223.0 Laporan;
- d) Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya (Satintelkam & Polsek Jajaran); 175.0 Laporan;
- e) Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara (Satintelkam & Polsek Jajaran); 429.0 Laporan;
- f) Dukungan Manajemen dan Teknis Harkamtibmas (Satintelkam/SKCK & Bagops); 1.0 Layanan, Laporan, Dokumen;
- g) Penyelenggaraan Fungsi Samapta Polri (Satsamapta & Unit Patroli Polsek); 354.0 Hari Operasi;
- h) Penyelenggaraan Fungsi Pamobvit Polri (Unit Pamobvit/PNBP); 365.0 Hari Operasi;

- i) Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lalu Lintas (Satlantas); 1.0 Layanan;
 - j) Pembinaan Potensi Keamanan (Satbinmas & Unit Binmas Polsek); 12.0 Laporan;
 - k) Pembinaan Operasi Kepolisian (Bagops/Manajemen Operasi Kewilayahan dan Terpusat); 1.0 Dokumen, Layanan, Laporan
- e. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.
 - 1) tujuan.
 terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban melalui penegakan hukum yang profesional, proporsional dan akuntabel serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
 - 2) kegiatan.
 - a) dukungan manajemen dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; 1.0 Layanan, Laporan, Dokumen;
 - b) penindakan Tindak Pidana Umum; 471.0 Perkara, Berkas Perkara;
 - c) Penindakan Tindak Pidana Narkoba; 41.0 Perkara, Berkas Perkara;
 - d) Penindakan Tindak Pidana Korupsi; 1.0 Perkara, Berkas Perkara;
 - e) Penindakan Tindak Pidana Perairan; 2.0 Perkara, Berkas Perkara;
 - f) Penindakan Tindak Pidana Laka Lantas, 82.0 Perkara, Berkas Perkara;
 - g) Pembinaan Operasi Lidik Sidik Tindak Pidana; 1.0 operasi, Hari Operasi;
 - h) Pengawasan penyidikan. 5.0 Dokumen, Layanan, Laporan;
- 2. Usulan Pagu Indikatif Polres Lombok Barat
 - a. Usulan Pagu Indikatif Polres Lombok Barat sebesar Rp 87,546,886,000.- dengan perincian komposisi kebutuhan anggaran sebagai berikut:
 - 1) rincian Kebutuhan Anggaran T.A. 2027 per Jenis Belanja sebagai berikut:
 - a) belanja pegawai : Rp. 69.765.427.000,-
 - b) belanja barang : Rp. 17.781.459.000,-
 - c) belanja modal : Rp. 1.352.206.520.-

- 2) rincian kebutuhan Anggaran T.A. 2027 per sumber anggaran sebagai berikut:
 - a) Rupiah Murni : Rp. 85,283,230,000,-
 - b) PNBP : Rp 2,263,656,000,-
 - c) SBSN : Rp. 1.352.206.520.-
- b. Program Profesionalisme SDM Polri (Nihil - Rp 0,- / Pengangggaran melekat pada Program Dukungan Manajemen Satker) dengan rincian operasional fungsi sebagai berikut:
 - 1) Dukma dan teknis profesionalisme SDM Polri;
 - 2) penyelenggara administrasi perawat pegawai Polri;
 - 3) pembinaan karier pegawai Polri;
 - 4) pelayanan psikologi anggota Polri.
- c. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana sebesar Rp 3,545,032,000,- dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) dukungan manajemen dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
 - 2) penindakan Tindak Pidana Umum;
 - 3) penindakan Tindak Pidana Narkoba;
 - 4) penindakan Tindak Pidana Ekonomi Khusus;
 - 5) penindakan Tindak Pidana Korupsi;
 - 6) penindakan Tindak Pidana Siber;
 - 7) penindakan Tindak Pidana Perairan;
 - 8) penindakan Tindak Pidana Laka Lantas;
 - 9) pembinaan operasional penyelidikan dan penyidikan TP;
 - 10) penindakan Tindak Pidana Tertentu;
 - 11) pengawasan penyidikan.
- d. Program Modernisasi Almitsus dan Sarana Prasarana Polri sebesar Rp 538,858,000,- dengan rincian anggaran masing-masing kegiatan sebagai berikut:
 - 1) dukungan manajemen dan teknik;
 - 2) pengembangan perbekalan umum;

- 3) usulan pembangunan belanja modal fasilitas konstruksi di Polres Lombok Barat Polda NTB adalah sebagai berikut:
 - a) sumber SBSN:
 - (1) Polres Lombok Barat Polda NTB
 - (a) pembangunan Rumah Jabatan Kapolsek Lembar T.54 (1 Unit);
 - (b) pembangunan Rumah Dinas anggota Polsek Lembar T.38 (5 Unit).
- e. Program Pemeliharaan Kamtibmas sebesar Rp 9.127.099.000,- dengan rincian anggaran masing-masing kegiatan sebagai berikut:
 - 1) analisa Keamanan;
 - 2) penyelenggaraan Strategis Kamtib Bidang Politik;
 - 3) penyelenggaraan Strategis Kamtib Bidang Ekonomi;
 - 4) penyelenggaraan Strategis Kamtib Bidang Sosbud;
 - 5) penyelenggaraan Strategis Kamtib Bidang Kamneg;
 - 6) dukungan manajemen dan teknis pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - 7) pembinaan fungsi pelayanan Sabhara;
 - 8) penyelenggaraan Pam Obyek Vital;
 - 9) peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang Lantas;
 - 10) pembinaan Potensi Keamanan;
 - 11) pembinaan operasi Kepolisian;
- f. Program Dukungan Manajemen sebesar RP 74,335,897,000,- dengan rincian anggaran masing-masing kegiatan sebagai berikut:
 - 1) pelayanan administrasi keuangan Polri dengan anggaran;
 - 2) penerangan masyarakat;
 - 3) penyelenggaraan teknologi informasi;
 - 4) pelayanan Kesehatan Polri dengan anggaran;
 - 5) dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri dengan anggaran;

- 6) pertanggungjawaban profesi;
 - 7) penyelenggaraan pengamanan Internal Polri dengan anggaran;
 - 8) penegakan Tata Tertib dan Disiplin Polri;
 - 9) penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan;
 - 10) pengelolaan multimedia;
 - 11) pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum;
 - 12) kerja sama dan penyuluhan hukum;
 - 13) monev pelaksanaan kinerja dan anggaran Polri;
 - 14) penyusunan Kebijakan Polri;
 - 15) penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Polri/;
 - 16) reformasi Birokrasi Polri;
 - 17) manajemen anggaran dengan anggaran;
 - 18) pengelolaan informasi dan dokumen.
3. kegiatan yang berdasarkan pagu indikatif T.A. 2027 guna mendukung kegiatan-kegiatan Polres Lombok Barat sebagai berikut:
- a. mengakomodir kebutuhan pembayaran gaji, tunjangan termasuk tunjangan kinerja, pemenuhan intake Polri Tahun 2027;
 - b. kegiatan operasional anggaran perkantoran (biaya pemeliharaan, BMP, pemeliharaan dan perawatan jajaran Polres Lombok Barat, kebutuhan daya dan jasa serta keperluan sehari-hari perkantoran);
 - c. kegiatan fungsi teknis Kepolisian, berupa: deteksi potensi gangguan keamanan, pencegahan dan penanggulangan keamanan, pembinaan pelayanan dan perlindungan masyarakat, terorisme, korupsi, Narkoba perdagangan orang, keamanan dalam negeri, Kamtibmas, keamanan laut, kejahatan Siber dan penegakan hukum lainnya serta untuk mendukung tercapainya Proyek Prioritas Nasional 2027 di wilayah hukum Polres Lombok Barat;
 - d. penguatan sarana prasarana dalam rangka meningkatkan pelayanan publik Polri, penanganan gejolak sosial, penanganan kasus menonjol, terorisme, berita Hoax dan penegakan hukum terhadap kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, dan penanganan peristiwa

yang berimplikasi kontinjensi serta pembangunan perumahan dan kesehatan bagi personel Polri;

- e. melaksanakan pelatihan, pelayanan psikologi, perawatan personel dan pembinaan karier personel Polda NTB dalam rangka peningkatan kualitas dan kapabilitas personel Polri, baik di bidang fungsi pembinaan maupun operasional agar semakin profesional modern dan terpercaya;
- f. meningkatkan kegiatan preemtif dan preventif secara maksimal dengan mengoptimalkan petugas Bhabinkamtibmas melalui “strategi Polmas” dengan penerapan “*Personal Smart Tools*” dalam menghadapi ancaman gangguan Kamtibmas;
- g. meningkatkan kegiatan keamanan laut sebagai poros Maritim dengan memperkuat satuan Polairud baik di tingkat perairan pantai barat hingga perairan selatan jajaran Polres Lombok Barat;
- h. meningkatkan pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli pada tempat-tempat dan jam rawan gangguan Kamtibmas di daerah Kabupaten Lombok Barat;
- i. melaksanakan penyusunan dan penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan terkait tugas dan fungsi Polri serta pemberian advokasi terhadap institusi Polri, anggota Polri maupun keluarga Polri PoldaNTB dan Polres Lombok Barat;
- j. meningkatkan kinerja 70 personel Bhabinkamtibmas satu Desa/Kelurahan di jajaran Polres Lombok Barat;
- k. mendukung kegiatan pengamanan, *event-event* internasional/nasional, pengamanan pulau terluar dalam menjaga keamanan di wilayah;
- l. 4 (empat) arah kebijakan utama Presisi mengakomodir kegiatan program Prioritas Kapolri (*Quick wins Presisi*) yang terdiri dari :
 - 1) Transformasi organisasi ;
 - 2) Transformasi oprasional ;
 - 3) Transformasi Pelanyan Publik ;
 - 4) Transformasi Pengawasan.
- m. Progran (*Quik Wins Presisi*) meliputi :

- 1) Membangun Budaya integritas Organisasi;
- 2) Menerapkan budaya integritas berbasis digital;
- 3) Mengembangkan sumber daya manusia unggul;
- 4) Menciptakan suasana kondusif di masyarakat (*Cooling System*)
- 5) Memantapkan pemeliharaan Kamtibmas;
- 6) Mengoptimalkan Penegakkan hukum;
- 7) Meningkatkan pelayanan publik;
- 8) Mengoptimalkan pengawasan.

BAB V
PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Kepala Kepolisian Resor Lombok Barat T.A. 2027 disusun sebagai bahan masukan/pedoman jajaran fungsi dan Polsek di jajaran Polres Lombok Barat, dalam melaksanakan kegiatan operasional dan pembinaan dalam melaksanakan tugas di bidang Harkamtibmas dan Penegakkan Hukum T.A. 2027.

Lembar, 30 Juni 2026

KEPALA KEPOLISIAN RESOR LOMBOK BARAT POLDA NTB



YASMARA HARAHAP, S.I.K., M.Si.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 82041469

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESOR LOMBOK BARAT



RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
POLRES LOMBOK BARAT
T.A. 2027

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESOR LOMBOK BARAT

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) POLRES LOMBOK BARAT T.A. 2027

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2027	KET
1	2	4	6	7
	SI Keamanan dan Ketertiban masyarakat terkendali melalui kepolisian yang berintegritas, modern dan akuntabel	IKU Indeks keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Lombok Barat.	3,20	
	SS1 pemeliharaan keamanan dan ketertiban Masyarakat yang responsive dan prediktif.	IKU1 Indeks Harkamtibmas Polres Lombok Barat.	3,20	
		1 Road safety indeks	3,20	
		2 Indeks community policing	3,20	
		3 Tingkat efektivitas kehadiran samapta polres lombok barat	73	
		4 Tingkat keamanan di Perairan Wilkum polres lombok barat	13	
		5 Tingkat efektivitas pengamanan Obyek Vital nasional dan tartentu	73	
		6 Tingkat kualitas penanggulangan gangguan Kamtibmas intensitas tinggi.	78	
		7 Persentase reduksi potensi gangguan	73%	
		8 Persentase Tingkat keberhasilan operasi kepolisian	73	
		9 Tingkat efektifitas kontra terorisme dan deradikalisasi	85	
		10 Tingkat kepuasan masyarakat (aspek Harkamtibmas)	83	

	SS2 penegakan hukum yang humanis, akuntabel dan berkeadilan	IKU2 Indeks penegakan Hukum di wilayah hukum Polres Lobar	3,30	
		1 Clearance rate kejahatan konvensional	6,15	
		2 Clearance rate kejahatan transnasional (Siber, Narkoba, TTPO)	55,5	
		3 Clearance rate kejahatan terhadap perempuan dan anak (TTPA)	55,5	
		4 Clearance rate kejahatan kekayaan Negara (Korupsi, Minerba)	55,5	
		5 Clearance rate kejahatan kontijensi,	55,5	
		6 Clearance rate tindak pidana lantasi	55,5	
		7 Clearance rate tindakan pidana di perairan di wilayah hukum Polres Lobar	80,5	
		8 Clearance rate kasus terorisme	68	
		9 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja polri (aspek Gakkum Polri)	74	
	SS3 Pengembangan dan pengelolaan SDM Polri dan adaptif, kompeten dan berintegritas secara terpadu	IKP1 Indeks Profesional SDM Polri	71	
		IKP2 Indeks pembangunan dan pengembangan kapasitas SDM Polri.	85	
	SS4 infrastruktur Strategis kepolisian yang berdaya guna dan modern	IKP1 Indeks SPBE Polres Lombok Barat.	2,30	
		IKP2 Indeks tingkat pemenuhan Minimum Essential Police Equipment (MEPE)	81	

		IKP3	Indeks kualitas data Polres Lombok Barat	3,40	
	SS5 tata Kelola yang bersih, transfaran dan akuntabel	IKP1	Nilai SAKIP Polres Lobar	76,50	
		IKP2	Opini BPK atas laporan keuangan	WTP	
		IKP3	Indeks Reformasi Birokrasi	74	
		IKP4	Indeks internalisasi budaya integritas, kejujuran dan kehormatan pada Polri	81	
		IKP5	Nilai Kinerja Anggaran	92	
		IKP6	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelesaian pengaduan Polri	71	
		IKP7	Persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polres Lobar	78%	

Lembar, 30 Juni 2026

KEPALA KEPOLISIAN RESOR LOMBOK BARAT POLDA NTB



YASMARA HARAHAP, S.I.K., M.Si.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 82041469

**RENCANA KERJA KEMENTERIAN / LEMBAGA
(RENJA KL) VERSI BAPPENAS MANUAL
TAHUN ANGGARAN 2027**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESOR LOMBOK BARAT

REKAP 1 : K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2027

1. KEMENTERIAN/LEMBA : KEPOLISIAN RESOR LOMBOK BARAT

2. VISI : Terwujudnya wilayah hukum Polres Lombok Barat Aman, Tertib dan Berkeadilan melalui Kepolisian yang Berorientasi pada Masyarakat

3. MISI : Melindungan, Melayanai dan Mengayomi masyarakat di wilayah hukum Polres Lombok Barat

4. PRIORITAS NASIONAL

NO	PRIORITAS NASIONAL	ALOKASI 2027
02	Memantapkan Sisten pertahanan Kemananan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	-
07	Memperkuat Reformasi Politik Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	-
TOTAL		-

5. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L

NO	SASARAN STRATEGIS	TARGET 2027	ALOKASI 2027 (RIBU)
	Keamanan dan Ketertiban masyarakat terkendali melalui Kepolisian yang berintegrasi, modern dan akuntabel		
	Indeks keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Lombok B	3,2	
01	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Responsive dan akuntabel		9.127.099
01.01	Indeks Harkamtibmas Polres Lombok Barat.	3,2	

1.Road

NO	SASARAN STRATEGIS		TARGET 2027	ALOKASI 2027 (RIBU)
	1	<i>Road Safety</i> indeks	3,2	
	2	Indeks <i>community policing</i>	3,2	
	3	Tingkat efektivitas kehadiran Samapta Polres Lombok Barat	73	
	4	Tingkat keamanan di Perairan Wilkum Polres Lombok Barat	13	
	5	Tingkat efektivitas pengamanan Obyek Vital nasional dan tartentu	73	
	6	Tingkat kualitas penanggulangan gangguan Kamtibmas intensitas	78	
	7	Persentase Reduksi Potensi Gangguan	73%	
	8	Persentase Tingkat Keberhasilan Operasi Kepolisian	7300%	
	9	Tingkat efektifitas kontra terorisme dan deradikalisasi	85%	
	10	Tingkat kepuasan masyarakat (aspek Harkamtibmas)	83	
02	Penegakkan hukum yang humanis, akuntabel dan berkeadilan			3.545.032
02.01	Indeks Gakkum di wilayah hukum Polres Lombok Barat		3,3	
	1	<i>Clearance rate</i> kejahatan konvensional	6,15	
	2	<i>Clearance rate</i> kejahatan transnasional(Siber,Narkoba,TPPO)	55,5	
	3	<i>Clearance rate</i> kejahatan terhadap perempuan dan anak(TTPA)	55,5	
	4	<i>Clearance rate</i> kejahatan kekayaan negara(Korupsi Minerba)	55,5	
	5	<i>Clearance rate</i> kejahatan kontijensi.	55,5	
	6	<i>Clearance rate</i> tindak pidana lantas	55,5	
	7	<i>Clearance rate</i> tindak pidana di perairan di wilayah hukum Polres Lobar	80,5	
	8	<i>Clearance rate Kasus terorisme</i>	68	
	9	<i>Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja polri (aspek Gakkum Polri)</i>	74	

03. Pengembangan

NO	SASARAN STRATEGIS	TARGET 2027	ALOKASI 2027 (RIBU)
03	Pengembangan dan pengelolaan SDM Polri yang adaptif, kompeten dan berintegritas secara terpadu		
03.01	Indeks Profesional SDM Polri	71	
03.02	Indeks pembangunan dan pengembangan kapasitas SDM Polri.	85	
04	Infrastruktur strategis kepolisian yang berdayaguna dan modern		538,858
04.01	Indeks SPBE Polres Lombok Barat.	2,3	74,335,897
04.02	Indeks tingkat pemenuhan <i>Minimum Essential Police Equipment</i> (MEPE)	81	
04.03	Indeks kualitas data Polres Lombok Barat	3,4	
5	tata Kelola yang bersih, transparan dan akuntabel		74,335,897
05.01	Nilai SAKIP Polres Lobar	76,50	
05.02	Opini BPK atas laporan keuangan	WTP	
05.03	Indeks Reformasi Birokrasi	74	
05.04	Indeks internalisasi budaya integritas, kejujuran dan kehormatan pada Polri	81	
05.05	Nilai kinerja anggaran	92	
05.06	Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap Penyelesaian Pengaduan Polri	71	
05.07	Persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polres Lombok Barat	78%	
TOTAL			87.546.886

6. PROGRAM.....

6. PROGRAM DAN PENDANAAN (RIBU RUPIAH)

KODE	KEGIATAN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2027										TOTAL
		RM	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	
060.01.BI	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	3.427.731	117.301	-	-	-	-	-	-	-	-	3.545.032
060.01.BP	Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri	366.533	172.325	-	-	-	-	-	-	-	-	538.858
060.01.BQ	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban	9.121.549	5.550	-	-	-	-	-	-	-	-	9.127.099
060.01.WA	Program Dukungan Manajemen	74.335.897	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.335.897
TOTAL		87.251.710	295.176	-	-	-	-	-	-	-	-	87.546.886

Lembar, 30 Juni 2027

KEPALA KEPOLISIAN RESOR LOMBOK BARAT POLDA NTB



ASMAHA HARAHAP, S.I.K., M.Si.
 AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 82041469

REKAP 2: PROGRAM K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2027

- 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2 SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : Profesionlisme Sumber Daya Manusia
3 PROGRAM : Program profesionalisme Sumber Daya Manusia Polri
4 PRIORITAS NASIOAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2027 (RIBU)
02	Memantapkan Sistem pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, air, ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	-
02.04	Profesionalisme Pelahyanan Kepolisian	
Total		-

5 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2027	ALOKASI (RIBU)
01	Terpenuhinya SDM Polri yang mampu menjalankan tugas secara profesional		
01.01	Persentase SDM Polri yang mampu menjalankan tugas secara profesional		
Total			-

6 OUTPUT PROGRAM DAN OUTPUT INDIKATOR KINERJA PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM/OUTPUT INDIKATOR KINERJA PROGRAM	ALOKASI 2027 (RIBU)
01	SDM Polri yang kompeten	
01.01	Persentase SDM Polri yang memenuhi kompetensi minimal	
Total		-

7. KEGIATAN.....

7 KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	KEGIATAN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2027										
		RM	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
3096	Dukungan manajemen Profesionalisme Polri		-	-	-	-		-	-	-	-	-
3100	Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan		-	-	-	-		-	-	-	-	-
3105	Penyelenggaraan administrasi perawatan		-	-	-	-		-	-	-	-	-
3107	Pengendalian pegawai Polri		-	-	-	-		-	-	-	-	-
3108	Pembinaan karier Personel Polri		-	-	-	-		-	-	-	-	-
3110	Pelayanan psikologi anggota Polri		-	-	-	-		-	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-

Lembar, 22 Juni 2027

KEPALA KEPOLISIAN RESOR LOMBOK BARAT POLDA NTB



YASMARA HARAHAP, S.I.K., M.Si.
 AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 82041469

REKAP 2: PROGRAM K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2027

- 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2 SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : Penegakkan hukum yang berkeadilan
3 PROGRAM : Program penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana
4 PRIORITAS

KODE	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2027 (RIBU)
02	Memantapkan Sistem pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, air, ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	-
02.06	Kemanan Siber, Sandi dan Sinyal	
07	Memperkuat Reformasi Birokrasi Politik Hukum dan Birokrasi serta emmpерkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	4.470.567
07.06	Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba	
Total		4.470.567

5 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2027	ALOKASI (RIBU)
01	Terciptanya keadilan penegakkan hukum terhadap kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan berimplikasi kontijensi		4.470.567
01.01	Persentase mengungkapkan tindak pidana konvensional		
01.02	Persentase mengungkapkan tindak pidana transnasional		
01.03	Persentase mengungkapkan tindak pidana terhadap kekayaan negara		
01.04	Persentase mengungkapkan tindak pidana yang berimplikasi kontijensi		
Total			4.470.567

6 OUTPUT PROGRAM DAN OUTPUT INDIKATOR KINERJA PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM/OUTPUT INDIKATOR KINERJA PROGRAM	ALOKASI 2027 (RIBU)
01	Layanan penegakkan hukum oleh Polri	
01.01	Indeks penegakkan hukum Polri	
Total		4.470.567

8. KEGIATAN

7 KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	KEGIATAN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2027										TOTAL
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	
3137	Dukma dan teknis Lidik Sidik TP	674.625	-	-	-	-		-	-	-	-	674.625
3142	Penindakan TP umum	2.754.742	-	-	-	-		-	-	-	-	2.754.742
3144	Penindakan TP Narkoba	530.609	-	-	-	-		-	-	-	-	530.609
3145	Penindakan Ekonomi Khusus		-	-	-	-		-	-	-	-	-
3146	Penindakan TP Korupsi	380.000	-	-	-	-		-	-	-	-	380.000
3151	Penindakan Tp Siber		-	-	-	-		-	-	-	-	-
4342	Penindakan Tindak Pidana Perairan		-	-	-	-		-	-	-	-	-
4343	Penindakan Tindak Pidana Lalu Lintas	117.301	-	-	-	-		-	-	-	-	117.301
5082	Binops Lidik Sidik TP	3.000	-	-	-	-		-	-	-	-	3.000
5083	Penindakan TP Tertentu		-	-	-	-		-	-	-	-	-
5086	Pengawasan penyidikan	10.250	-	-	-	-		-	-	-	-	10.250
TOTAL		4.470.527	-	-	-	-		-	-	-	-	4.470.527

Lembar, 30 Juni 2027

KEPALA KEPOLISIAN RESOR LOMBOK BARAT POLDA NTB



MAHMARA HARAHAP, S.I.K., M.Si.
 AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 82041469

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESOR LOMBOK BARAT

REKAP 2: PROGRAM K/L
REVISI RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2027

- | | | |
|---|-------------------------------------|---|
| 1 | KEMENTERIAN/LEMBAGA | KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA |
| 2 | SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG | Modernisasi teknologi Polres Lombok Barat |
| 3 | PROGRAM | Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri |
| 4 | PRIORITAS | |

KODE	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2027 (RIBU)
02	Memantapkan Sistem pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, air, ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	-
02.04	Profesionalisme pelayanan Kepolisian	
Total		-

5 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2027	ALOKASI (RIBU)
01	Terselenggaranya operaional Polri yang optimal dalam pelaksanaan Harkamtibmas dan Gakkum serta layanan internal		538.858
01.01	Persentase pemanfaatan Almatsus dab Sarpras		
Total			538.858

6 OUTPUT PROGRAM DAN OUTPUT INDIKATOR KINERJA PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM/OUTPUT INDIKATOR KINERJA PROGRAM	ALOKASI 2027 (RIBU)	
01	Almatsus dan Sarpras		538.858
01.01	Persentase pemenuhan Almatsus dan Sarpras		
Total			538.858

7. KEGIATAN.....

7 KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	KEGIATAN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2027										
		RM	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
3084	Pengembangan peralatan Polri	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5059	Dukungan manajemen dan teknik sarpras	-	172.325		-	-	-	-	-	-	-	172.325
5061	Pengembangan Perbekalan Umum		366.533	-	-	-	-	-	-	-	-	366.533
5062	Pengembangan fasilitas dan konstruksi Polri			-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	538.858	-						-	-	538.858

Lembar, 22 Juni 2027

KEPALA KEPOLISIAN RESOR LOMBOK BARAT POLDA NTB



YASWARA HARAHAP, S.I.K., M.Si.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 82041469

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESOR LOMBOK BARAT

REKAP 2: PROGRAM K/L
REVISI RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2027

- | | | |
|---|-------------------------------------|---|
| 1 | KEMENTERIAN/LEMBAGA | KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA |
| 2 | SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG | Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat |
| 3 | PROGRAM | Program Harkamtibmas |
| 4 | PRIORITAS | |

KODE	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2027 (RIBU)
02	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	-
02.04	Pembangunan dikewilayahan	
Total		-

5 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	ALOKASI (RIBU)
01	Terjaganya ketertiban sosial dalam masyarakat sehingga mereka dapat meningkatkan produktifitasnya dalam kondisi bebas dari bahaya ancaman dan gangguan	9.127.089
01.01	Terjaganya ketertiban sosial dalam masyarakat sehingga mereka dapat meningkatkan produktifitasnya dalam kondisi bebas dari bahaya ancaman dan gangguan	
Total		9.127.089

6 OUTPUT PROGRAM DAN OUTPUT INDIKATOR KINERJA PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM/OUTPUT INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2027
01	Layanan pemeliharaan dan ketertiban masyarakat	9.127.089
01.01	Indeks Harkamtibmas	
TOTAL		9.127.089

7 KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	KEGIATAN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2027										TOTAL
		RM	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	
3112	Analisis Keamanan	98.054										98.054
3114	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik	223.131	5.177	-	-	-	-	-	-	-	-	228.308
3115	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi	229.792	1.295	-	-	-	-	-	-	-	-	231.087
3116	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya	253.872	1.295	-	-	-	-	-	-	-	-	255.167

3117. Penyelenggaraan.....

KODE	KEGIATAN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2027										TOTAL
		RM	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	
3117	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara	473.432	1.665	-	-	-	-	-	-	-	-	475.097
3120	Kerja Sama Keamanan dan Ketertiban K/L		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3128	Dukungan manajemen dan teknis Harkamtibmas	3.089.992	106.160	-	-	-	-	-	-	-	-	3.196.152
3130	Pembinaan pelayanan fungsi Sabhara	948.630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	948.630
3131	Penyelenggaraan pengaman Objek Vital		548.824	-	-	-	-	-	-	-	-	548.824
3133	Peningkatan pelayanan Kamselmas di bidang lantas		749.501	-	-	-	-	-	-	-	-	749.501
3134	Penyelenggaraan Kepolisian perairan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3150	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Khusus		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5076	Pembinaan Potensi Keamanan	1.743.294		-	-	-	-	-	-	-	-	1.743.294
5079	Pembinaan Operasi Kepolisian	652.975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	652.975
5080	Pengendalian Operasi Kepolisian			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5081	Pelacakan dan penangkalan Kamtib		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5087	Penanggulangan Keamanan dalam Negeri		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		7.713.172	1.413.917	-	-	-	-	-	-	-	-	9.127.089

Lembar, 30 Juni 2027

KEPALA KEPOLISIAN RESOR LOMBOK BARAT POLDA NTB



YASWARA HARAHAP, S.I.K., M.Si.
AJUNTA KOMISARIS BESAR POLISI NRP 82041469

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESOR LOMBOK BARAT

REKAP 2: PROGRAM K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2027

- 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- 2 SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG Sistem pengawasan dan akuntabel bersih terbuka dan melayani
- 3 PROGRAM Program Dukungan Manajemen
- 4 PRIORITAS

KODE	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2027 (RIBU)
04	Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia	-
	Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia	
Total		-

5 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2027	ALOKASI (RIBU)
01	Terselenggaraanya dukungan manajemen kepada internal Polri yang memenuhi standar pelayanan		74.146.389
01.01	Persentase pemenuhan layanan internal yang berkualitas		
Total			74.146.389

6 OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM/INDIKATOR OUT PROGRAM	ALOKASI 2027 (RIBU)
01	Layanan kepada internal Polri	74.146.389
01.01	Jumlah layanan yang diberikan sesuai SOP	
Total		74.146.389

7 KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	KEGIATAN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2027										TOTAL
		RM	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	
3068	Pelayanan Administrasi Keuangan Polri			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3070	Penerangan Maysarakat	81.333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.333
3071	Penyelenggaraan Teknologi Informasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3072	Pelayanankesehatan Polri										-	-
3073	Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri	74.146.389		-	-	-	-	-	-	-	-	74.146.389

3088. Pertanggungjawaban.....

KODE	KEGIATAN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2027										TOTAL
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	
3088	Pertanggungjawaban profesi	15.276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.276
3089	Penyelenggaraan Pegamanan Internal Polri	7.186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.186
3090	Penegakan Tata Tertib dan Disiplin Polri	10.627	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.627
3091	Penyelenggaraan Was dan Pemeriksaan	23.816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.816
3149	Pengelolaan Multimedia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3154	Pemberian Bantuan dan Nsehat Hukum		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3155	Kerjasama dan Penyuluhan Hukum	27.263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.263
4339	Monev Pelaksanaan Kinerja dan Anggaran Polri		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5051	Penyusunan Kebijakan Polri		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5052	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Polri		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5053	RBP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5054	Manajemen Anggaran	24.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.007
5056	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		74.302.808	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.335.897

Lembar, 30 Juni 2027

KEPALA KEPOLISIAN RESOR LOMBOK BARAT POLDA NTB



WASMARA HARAHAP, S.I.K., M.Si.
 A JUN KOMBARIS BESAR POLISI NRP 82041469

**SPRIN POKJA PENYUSUNAN
RENCANA KERJA POLRES LOMBOK
BARAT T.A. 2027**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESOR LOMBOK BARAT



SURAT PERINTAH
Nomor: Sprin/ 561 /VI/REN.1.3./2026

Pertimbangan: bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Polres Lombok Barat T.A. 2027, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 beserta perubahannya tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Kepolisian Daerah;
8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Kepolisian Tingkat Polres dan Polsek;
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia.

DIPERINTAHKAN

Kepada : NAMA, PANGKAT/NRP/NIP DAN JABATAN SEBAGAIMANA YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

Untuk : 1. di samping melaksanakan tugas dan Jabatan sehari-hari agar melaksanakan tugas sebagai Tim Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Kerja Polres Lombok Barat T.A. 2027;

2. mengadakan.....

2. mengadakan koordinasi dan kerja sama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait;
3. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kapolres Lombok Barat;
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Lembang

Pada tanggal : 22 Juni 2026

KEPALA KEPOLISIAN RESOR LOMBOK BARAT POLDA NTB



YASMARA HARAHAP, S.I.K., M.Si.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 8204149

DAFTAR TIM POKJA PENYUSUNAN
RENCANA KERJA POLDA NTB TAHUN ANGGARAN 2027

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	
			STRUKTURAL	TIM POKJA
1	2	3	4	5
1	YASMARA HARAHAP, S.I.K., M.Si.	AKBP	KAPOLRES LOMBOK BARAT	PENANGGUNGJAWAB
2	KADEK METRIA, S.Sos., SH., MH	KOMPOL	WAKAPOLRES	PENGARAH
3	BENHARD SIMANUNGKALIT	IPTU	P.S. KASIWAS	PENGAWAS
4	AGUS SUPRIYADI	AKP	KABAG REN	KETUA
5	I PUTU WIRAWAN, S.ADM., M.I.KOM	AKP	KABAG OPS	WAKIL KETUA/ PENANGGUNGJAWAB BIDANG OPS
7	TAUFIK HIDAYAT, S.H.	AKP	KABAG SDM	PENANGGUNGJAWAB BIDANG SDM
8	SONY HARTONO	AKP	P.S. KABAG LOG	PENANGGUNGJAWAB BIDANG LOGISTIK
9	JOKO RUDianto, S.H., M.H.	AKP	KASAT INTELKAM	PENANGGUNGJAWAB FUNGSI INTELKAM
10	HEDDY PERMANA PUTRA, S.TR.K., S.I.K.	IPTU	KASAT RESKRIM	PENANGGUNGJAWAB FUNGSI RESKRIM
11	HERWIN JONATHAN NABABAN, S.TR.K.	IPTU	KASAT RESNARKOBA	PENANGGUNGJAWAB FUNGSI RESNARKOBA
12	MUHAMMAD MAHRIP	IPTU	KASAT BINMAS	PENANGGUNGJAWAB FUNGSI BINMAS
13	ANTON PRASETYA WIJAYA, S.TR.K., S.I.K., M.H.	IPTU	KASAT LANTAS	PENANGGUNGJAWAB FUNGSI LANTAS
14	REZA IHYAUL ITSNAIN, S.H., M.H..	IPTU	KASAT SAMAPTA	PENANGGUNGJAWAB FUNGSI SAMAPTA DAN PAM OBVIT
15	LALU NURSIDI	AKP	KASAT POLAIR	PENANGGUNGJAWAB FUNGSI POLAIR

16	LALU MUHAMMAD MULYADI, S.H.	IPTU	KASI PROPAM	PENANGGUNGJAWAB FUNGSI PROPAM
17	AMIRUDDIN	IPTU	KASI HUMAS	PENANGGUNGJAWAB FUNGSI HUMAS
18	BAKHTIAR	AIPDA	P.S. KASI TIK	PENANGGUNGJAWAB FUNGSI TIK
19	I GUSTI GEDE SUDIARTHA	IPTU	KASI KUM	PENANGGUNGJAWAB FUNGSI HUKUM
20	KETUT WIDARSANE	AIPTU	P.S. KASIDOKKES	PENANGGUNGJAWAB FUNGSI DOKKES
21	LALU JOHAN, S.H.	IPDA	KASI KEU	PENANGGUNGJAWAB FUNGSI KEU
22	HERI NURDIN ATMAJA	IPDA	KASAT TAHTI	PENANGGUNGJAWAB FUNGSI TAHTI
23	GDE LEO ADI SAPUTRA	IPDA	KASIUM	PENANGGUNGJAWAB FUNGSI SIUM
24	MULIYADI	IPDA	KA SPKT	PENANGGUNGJAWAB FUNGSI SPKT
25	HARDI	IPDA	PAUR RENPROGAR	ANGGOTA
27	ACHID JUANDA S.H.	IPDA	PAUR BAGSTRAJEMEN DAN RB	ANGGOTA
26	I DEWA PUTU SUTHA I.	AIPDA	PAUR DALPROGAR	ANGGOTA
27	HERI AZHARI, S.H.	AIPDA	P.S. PAURMIN BAG REN	ANGGOTA
28	SAMSUL HAKIM , S.H.	AIPDA	BAMIN BAG REN	ANGGOTA
29	ENI KUSMAWATI	AIPDA	BAMIN BAG REN	ANGGOTA
30	I KETUT BUDIMANTARA	BRIGADIR	BAMIN BAG REN	ANGGOTA

31. YOGI PERMANA

31	YOGI PERMANA, S.H., M.I.Kom.	BRIGADIR	BAMIN BAG REN	ANGGOTA
32	LALU LINGGA SETIAWAN PERWANGSA	BRIGADIR	BAMIN BAG REN	ANGGOTA
33	I GEDE SOCE ARNAWA S.H	BRIGADIR	BAMIN BAG REN	ANGGOTA

Ditetapkan di : Lembar

Pada tanggal : 22 Juni 2026

KEPALA KEPOLISIAN RESOR LOMBOK BARAT POLDA NTB



YASMARA HARAHAP, S.I.K., M.Si.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 8204149